

SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM KONSERVASI LINGKUNGAN KAWASAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**(Studi Kasus: Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur,
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Muhammad Reza Tricahya

115030600111033



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2016**

**“Beladjar dengan tjara yang baik
Akan membentuk watak jang baik pula”
-Sjahrazad, *Indonesische Overpeinzingen*-**

**RENCANAKAN APA YANG AKAN DIJALANKAN DAN
JALANKAN APA YANG DIRENCANAKAN
- IMPALA UB-**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sinergitas *Stakeholders* Dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Muhammad Reza Tricahya

NIM : 115030600111033

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, Maret 2016

KOMISI PEMBIMBING

Ketua

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP

NIP. 851214 03 11 0130

TANDA PENGESAHAN

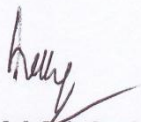
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2016
Jam : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Muhammad Reza Tricahya
Judul : *Sinergitas Stakeholders* Dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

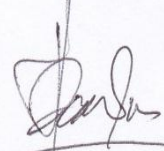
MAJELIS PENGUJI

Ketua



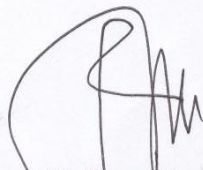
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota



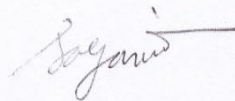
Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP
NIP. 851214 03 11 0130

Anggota



Dr. Imam Hanafi, M.Si, M.S
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Dr. Sujarwoto, SIP, M.Si, MPA
NIP. 19750130 200312 1 002

Karya ilmiah ini kutujukan kepada:

Negara & Bangsa Indonesia Tercinta

Mahasiswa Ilmu Administarasi

Pengampu Pengetahuan

Pemerintah & Masyarakat Pesisir

Ayahanda & Ibunda Tercinta

RINGKASAN

Tricahya, Muhammad Reza, 2016, **Sinergitas Stakeholders dalam Konservasi Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi: Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)**, Skripsi, 1) Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, 2) Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP

Wilayah Kondang Merak merupakan kawasan yang terdiri dari hutan, laut dan masyarakat desa. Dalam pengelolaan kawasan terdapat *stakeholder* yang terlibat antara lain pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat dan masyarakat desa. Kurangnya rasa percaya, komunikasi yang kurang efektif, *feedback* yang belum optimal dan minimnya kreativitas yang dihasilkan antar *stakeholder*, menyebabkan terhambatnya pembangunan kawasan.

Tujuan penelitian antara lain untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas antar *stakeholder* dalam konservasi lingkungan serta dampak yang ditinjau dari aspek *sustainable development*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari 3 jenis yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terdapat di kawasan Kondang Merak yaitu Perum Perhutani, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, LMDH Sumber Bening, Kelompok Masyarakat Karya Mina dan masyarakat desa. Hubungan yang terjalin antar *stakeholder* sebagai berikut: 1) *defensive*: Perum Perhutani dengan LSM Sahabat Alam; Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Nelayan, 2) *respectful*: LSM Sahabat Alam dengan LMDH; LMDH Sumber Bening dengan Perum Perhutani, *Aspinal Foundation* dengan Perum Perhutani; LSM Sahabat Alam dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, 3) *synergistic*: LSM Sahabat Alam dengan Kelompok Nelayan; LSM Sahabat Alam dengan *Aspinal Foundation*.

Dengan tingkat pemberdayaan masyarakat fase partisipatoris bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa faktor pendukung sinergi *stakeholder* antara lain perjanjian antar instansi, dukungan dari pemerintah dan LSM, kesadaran masyarakat mengenai konservasi lingkungan. Faktor penghambat yaitu pemahaman aktor dalam perjanjian kerjasama terbatas dan minimnya pemahaman tentang konservasi, minimnya kepercayaan dan komunikasi antar aktor, tidak adanya *blueprint* pengelolaan kawasan Kondang Merak. Dampak yang terjadi berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan antara lain dampak ekonomi yaitu peningkatan penghasilan perekonomian, adanya alternatif pekerjaan bagi masyarakat; dampak sosial yaitu kesadaran masyarakat mengenai konservasi lingkungan, kecemburuan sosial antar desa; dampak ekologi yaitu keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan lindung dan laut mulai membaik, limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik di kampung nelayan, berkurangnya lahan hutan alami.

Kata Kunci: sinergi, *stakeholder*, konservasi, pemberdayaan masyarakat

SUMMARY

Tricahya, Muhammad Reza, 2016, **Stakeholders Sinergy of Enviromental Conservation Based on Community Empowerment (Study: Kondang Merak Beach, Sumber Bening Village, Bantur District, Malang Regency)**, Thesis, 1) Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, 2) Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP

Kondang Merak Region is an area consisting of forest, sea and village society. In the area of management are involved stakeholders include goverments, Non Governmental Organization (NGO), community gropus and village society. Lack of trust, lack of effective communication, feedback is not optimal and lack of creativity resulting among stakeholders, impede the region development.

The purpose of this research are to describe and analyze the synergy between the stakeholders in the conservation of the environment and the impact from the aspect of sustainable development. This research uses descriptive research with a qualitative approach to data collection technique consists of 3 types of interview, observation, and documentation. Data analysis technique uses a spiral model analysis by John Creswell.

The results showed that at several local stakeholders Kondang Merak is called Perum Perhutani, the Department of Marine and Fisheries Malang, the NGO Sahabat Alam, Aspinall Foundation, LMDH Sumber Bening, Mina Karya Community Groups and villagers. The relationship between the stakeholders as follows: 1) the defensive; Perum Perhutani with the NGO Sahabat Alam; Marine and Fisheries Agency with Group of Fishermen, 2) respectful: NGO Sahabat Alam with LMDH; LMDH Sumber Bening with Perhutani, Aspinall Foundation with Perum Perhutani; NGO Sahabat Alam with the Department of Marine and Fisheries, 3) synergistic: NGO Sahabat Alam with Group of Fishermen; NGO Sahabat Alam with the Aspinall Foundation.

With the level of participatory community development phase that the process of empowerment comes from the government with communities, governments and the public. Several factors supporting stakeholder synergy among others agreements between institutions, support from the government and NGOs, public awareness of environmental conservation. Inhibiting factor is understanding the actors in the limited partnership agreement and the lack of understanding of conservation, lack of trust and communication between actors, the absence of normative rules regarding the planning, implementation and monitoring and evaluation in the management of forests, beaches and sea. Impacts that occur based on the perspectives of sustainable development, among others, the economic impact of increased income economy, the existence of alternative employment for the community; social impact that public awareness of environmental conservation, social jealousy among villages; namely the ecological effects of biodiversity and ecosystem protection forests and the sea began to improve, household waste is not managed properly in fishing villages, dwindling natural forest land.

Keyword: synergy, conservation, community empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang taat serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW, manusia mulia, *rohmatan lil 'aalamin*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sinergitas *Stakeholder* dalam Konservasi Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”.

Dalam kajian ini, hubungan dan interaksi antar *stakeholder* dalam konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam akan diuraikan secara ringkas dan terstruktur. Uraian tersebut mengenai *stakeholder* yang terlibat, aktivitas masing-masing *stakeholder*, bentuk hubungan dan sinergitas antar *stakeholder*, faktor pendukung dan penghambat dalam sinergi anatar *stakeholder*, serta dampaknya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Choirul Saleh M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Dr. Hermawan S.IP, M.Si selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan arahan, saran dan motivasi sejak awal penulisan hingga penyelesaian skripsi.

5. Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP selaku anggota dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan motivasi sejak awal penulisan makalah hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya dan membuka wawasan keilmuan selama penulis mengampu perkuliahan.
7. Pimpinan dan staf Perum Pehutani KPH Malang, atas izin, bantuan dan informasi yang diberikan hingga terselesainya tugas akhir perkuliahan ini.
8. Pimpinan dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, atas informasi dan bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi.
9. Rekan-rekan LSM Sahabat Alam, yang telah memberikan informasi, berbagi pengalaman dan wawasan pengetahuan hingga terselesainya skripsi.
10. Rekan-rekan anggota *Aspinal Foundation*, yang telah memberikan informasi, berbagi pengalaman dan wawasan pengetahuan selama penyelesaian skripsi.
11. Ketua dan anggota LMDH Sumber Bening, yang telah memberikan informasi dan berbagi pengalaman selama penyelesaian skripsi.
12. Kelompok Nelayan Karya Mina, yang telah memberikan informasi dan berbagi pengalaman selama penyelesaian skripsi.
13. Masyarakat pesisir Kondang Merak yang atas bantuan, informasi dan pengalaman serta wawasan kehidupan yang diberikan hingga terselesainya penelitian lapangan.
14. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perencanaan Pembangunan angkatan tahun 2011 yang selama menempuh perkuliahan telah banyak memberikan bantuan, dukungan, doa, motivasi, jalinan kerjasama, persahabatan dan persaudaraan yang baik dan berkesan.
15. Rekan-rekan, mas-mas, mba-mba serta adik-adik tercinta anggota Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UB) atas bantuan dan dukungan moril, pembentukkan mental, pemikiran dan kepribadian,

pengalaman, wawasan kehidupan dan pengetahuan serta kebersamaan, persahabatan dan persaudaraan yang baik dan dinamis selama menempuh keseharian dan seterusnya.

16. Terima kasih yang mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, ibunda Endang Heriyanti dan ayahanda Akhroni Mardja, yang merupakan pembimbing awal dalam memulai dan menghirup nafas kehidupan hingga saat ini, yang telah membesarkan dan mengajarkan dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang mengenai keimanan, akhlak kehidupan, dan nilai-nilai baik yang tidak mampu diuraikan seluruhnya.
17. Kakak tercinta Muhammad Rizky Pratama, yang telah memberikan dukungan, doa, perhatian, motivasi kepada penulis.
18. Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat menjadi suatu karya ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik khususnya hubungan antar lembaga. Diharapkan pula dapat menjadi suatu pertukaran pengetahuan serta menjadi *input* dan *output* pengetahuan yang berkualitas dan bermanfaat bagi *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Kondang Merak.

Akhirnya, penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan seluruh daya dan upaya untuk lebih cermat dan teliti. Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari banyak keterbatasan dalam studi ini. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi.

Malang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	16
B. Pembangunan	18
1. Konsep Pembangunan	18
2. Pembangunan Berkelanjutan.....	20
C. Pemberdayaan Masyarakat	26
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	26
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	30
D. <i>Stakeholders</i>	34
1. Konsep <i>Stakeholders</i>	34
2. <i>Stakeholders</i> dalam Teori <i>Quintuple Helix</i>	36
E. Kebijakan Lingkungan	49
1. Dasar Kebijakan Lingkungan	49
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3. Konservasi Lingkungan.....	54
4. Kawasan Pesisir.....	58
F. Konsep Sinergi	60

G. Sinergi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.....	64
 BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Fokus Penelitian	69
C. Lokasi dan Situs Penelitian	70
D. Jenis dan Sumber Data	71
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Instrumen Penelitian.....	75
G. Metode Analisis Data	76
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	80
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	80
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	80
2. Gambaran Umum Desa Sumber Bening	85
B. Penyajian Data	98
1. Sinergi <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan	98
a. Aktor yang Terlibat dalam Konservasi Lingkungan	98
1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat.....	98
2) Swasta.....	99
3) Masyarakat	100
4) Pemerintah	101
b. Aktivitas <i>Stakeholders</i> dalam Konservasi Lingkungan	103
1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat.....	103
2) Swasta.....	117
3) Masyarakat	121
4) Pemerintah	124
c. Bentuk Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Konservasi Lingkungan	132
d. Faktor yang Berpengaruh pada Sinergitas <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan.....	136
1) Faktor Pendukung.....	136
a) Adanya Perjanjian Antar Instansi/Lembaga.....	136
b) Dukungan dari Pemerintah dan LSM.....	138
c) Kesadaran Masyarakat mengenai Konservasi	139
2) Faktor Penghambat.....	141
a) Pemahaman Aktor dalam Perjanjian Kerjasama Terbatas serta Minim Pengetahuan Konservasi	141
b) Minim Kepercayaan dan Komunikasi Antar Aktor ...	144
c) Tidak Adanya <i>Blueprint</i> Pengelolaan Kawasan	

Kondang Merak.....	146
2. Dampak Sinergi <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan	153
a. Dampak dari Segi Ekonomi	153
1) Peningkatan Penghasilan Perekonomian.....	153
2) Adanya Alternatif Pekerjaan bagi Masyarakat.....	154
b. Dampak dari Segi Sosial	156
1) Kesadaran Masyarakat Mengenai Konservasi	157
2) Kecemburuan Sosial Antar Desa.....	158
c. Dampak dari Segi Lingkungan.....	159
1) Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Hutan serta Laut Membaik	159
2) Limbah Rumah Tangga Tidak Terkelola dengan Baik	161
3) Berkurangnya Lahan Hutan Alami.....	161
C. Analisis Data	163
1. Sinergi <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan	163
a. Aktor Yang Terlibat dalam Konservasi Lingkungan	163
1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat	164
2) Swasta	164
3) Masyarakat	165
4) Pemerintah	167
b. Aktivitas <i>Stakeholders</i> dalam Konservasi Lingkungan.....	168
1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat	168
2) Swasta	170
3) Masyarakat	175
4) Pemerintah	179
c. Bentuk Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Konservasi Lingkungan	186
d. Faktor yang Berpengaruh pada Sinergitas <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan	202
1) Faktor Pendukung.....	202
a) Adanya Perjanjian Antar Instansi/Lembaga.....	202
b) Dukungan dari Pemerintah dan LSM.....	203
c) Kesadaran Masyarakat mengenai Konservasi	204
2) Faktor Penghambat.....	205
a) Pemahaman aktor dalam Perjanjian Kerjasama Terbatas serta Minim Pengetahuan Konservasi	206
b) Minim Kepercayaan dan Komunikasi Antar Aktor ...	207
c) Tidak Adanya <i>Blueprint</i> Pengelolaan Kawasan Kondang Merak.....	209
2. Dampak Sinergi <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dilihat	

Dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan	211
a. Dampak dari Segi Ekonomi	211
1) Peningkatan Penghasilan Perekonomian.....	212
2) Adanya Alternatif Pekerjaan bagi Masyarakat.....	213
b. Dampak dari Segi Sosial	214
1) Kesadaran Masyarakat Mengenai Konservasi	214
2) Kecemburuan Sosial Antar Desa.....	217
c. Dampak dari Segi Lingkungan.....	218
1) Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Hutan serta Laut Membaik	218
2) Limbah Rumah Tangga Tidak Terkelola dengan Baik	220
3) Berkurangnya Lahan Hutan Alami.....	221
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	223
B. Saran	228
 KEPUSTAKAAN	232
 LAMPIRAN.....	237

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sumberbening	89
2.	Jumlah Penduduk Desa Sumberbening	89
3.	Aktor yang Terlibat dalam Konservasi Lingkungan	103
4.	Aktivitas Aktor dalam Konservasi Lingkungan	131
5.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Konservasi Lingkungan.....	151
6.	Alternatif Pekerjaan Masyarakat	156
7.	Dampak Sinergitas <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan ...	162

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Aspek Pembangunan Berkelanjutan	23
2.	Model <i>State Centric; Laissez Faire</i> dan <i>Triple Helix</i>	38
3.	Subsistem dalam Model <i>Quintuple Helix</i>	42
4.	Model <i>Quintuple Helix</i> dan Fungsinya	47
5.	Inovasi dan Produksi Pengetahuan dalam Konteks Ekonomi, Sosial, Lingkungan.....	48
6.	Kerangka Berpikir	67
7.	Model Spiral Analisis Data Kualitatif John Creswell	77
8.	Peta Wilayah Kondang Merak	88
9.	Penanaman Terumbu Karang dan Mangrove	107
11.	Aktivitas Peneliti Pengamatan dan Wawancara dengan Media	113
12.	Monitoring Satwa di Hutan Lindung.....	117
13.	Kondisi Kampung Nelayan Kondang Merak	120
14.	Pelibatan Media Televisi di Kondang Merak.....	122
15.	Pemasangan Rumpon di Laut dan Baliho Himbauan.....	123
16.	Salah Satu Jenis Burung dan Ikan Laut di Kondang Merak.....	160
17.	Bentuk Sinergitas <i>Stakeholder</i> dalam Konservasi Lingkungan di Kondang Merak.....	195
18.	Model <i>Quintuple Helix</i> di Kondang Merak.....	201

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Pengantar Izin Riset	237
2.	Surat Disposisi Kepala Perum Perhutani Jawa Timur.....	238
3.	Surat Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani dengan LMDH	239
4.	Media Publikasi.....	240
5.	Pedoman Wawancara	242
6.	Dokumentasi Lapangan.....	244
7.	<i>Curriculum Vitae</i>	246

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil, dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau (www.bakorsutanal.go.id). Sedangkan garis panjang pantai yang dimiliki sekitar 18.000km², sehingga luas wilayah Indonesia merupakan 2/3 wilayah lautan. Oleh sebab itu Indonesia sering disebut sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki kawasan pesisir yang sangat berpotensi untuk pembangunan.

Pembangunan di Indonesia tampak terlihat masih terkonsentrasi di daratan, sehingga tekanan kegiatan pembangunan di darat akan semakin tinggi oleh proses pembangunan. Wilayah pesisir pun menjadi opsi untuk dijadikan dan dikembangkan sebagai arah pembangunan setelah banyaknya area-area pembangunan di daratan yang menunjukkan bahwa intensitasnya terlalu tinggi. Hampir 60% jumlah penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar menyebar ke daerah pesisir (Dahuri dkk, 2008). Pada tahun 2010, penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 237.556.363 jiwa yang

akan memberikan tekanan yang besar kepada wilayah pesisir (www.bps.go.id). Hal ini disebabkan pula oleh sumber daya alam di daratan yang semakin menipis serta melimpahnya kekayaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga menimbulkan terjadinya pergeseran dari negara terestrial (daratan) menuju negara maritim.

Menurut UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sehingga ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, yang saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, banyak wilayah pesisir berbatasan langsung dengan hutan (daratan) dan lautan.

Dalam rangka pembangunan kawasan pesisir perlu diperhatikan aspek sumber daya alam dan energi yang ada. Sumber daya alam dan energi, baik itu dapat diperbaharui (*renewable resources*), tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*), dan berkelanjutan (*continous resources*) sangat penting artinya bagi kelangsungan regenerasi kehidupan manusia. Untuk itu, sumber daya alam yang tersebar di darat dan di laut haruslah dijaga, dipelihara dan dilestarikan demi kelangsungan kehidupan manusia.

Terdapat dua aspek yang secara terus menerus harus diperjuangkan dalam pengelolaan sumber daya alam (Saifullah, 2007:51-52), yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan

secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berwujud dalam kerusakan habitat, eksploitasi sumber daya alam hayati, pencemaran, perubahan pola penggunaan tanah, penerapan teknologi berbahaya (tidak aman dan ramah lingkungan), yang memberikan tekanan terhadap sumber daya alam yang semakin besar khususnya kerusakan dan kepunahan kondisi flora dan fauna. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan serta kepentingan terhadap sumber daya alam yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) membutuhkan waktu yang lama atau sama sekali tidak akan ada.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup di daratan dan di laut yang sangat memprihatinkan. Terjadi krisis keanekaragaman hayati serta pencemaran air, tanah dan udara dimana-mana. Hasil laporan IUCN 2000, CITES 2004, CITES Plan Commite 2004 menjelaskan bahwa akibat eksploitasi dan fragmentasi habitat muncul indikasi kepunahan lebih dari 100 spesies (Purwanto, 2007:12). Belum lagi punahnya berbagai jenis anggrek asli, rusaknya trumbu karang serta terancam punahnya beberapa satwa misalnya anoa, harimau, komodo. Krisis ini sangat dipengaruhi oleh lemahnya hukum Indonesia, tumpang tindihnya kebijakan dan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia, tidak efektifnya pengawasan dan peredaran flora dan fauna, kesadaran lingkungan yang rendah serta diperparah oleh keputusan-keputusan politik yang tidak

berpihak (Muhtaman dan Kartika, 1999:37). Sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Selain itu terdapat pengurangan lahan hutan atau deforestasi hutan yang berdampak pada punahnya ekosistem daratan yang disebabkan untuk pembukaan lahan baru pertambangan. Khusus permasalahan hutan yang terjadi di Pulau Jawa, menurut Awang (2007:79-80) antara lain:

1. Pertambahan penduduk yang cepat tetapi tidak didukung oleh sumber daya lahan yang tersedia;
2. Jumlah penduduk sangat banyak di Jawa, lebih dari 130 juta jiwa dengan luas areal 6% dari luas Indonesia, sehingga kepemilikan lahan setiap keluarga 0,2 – 0,3 ha dan berdampak kepada masalah sosial politik dan ekonomi yang serius;
3. Peluang kerja dan berusaha di pedesaan sangat terbatas, padahal angkatan kerja banyak di desa. Dengan demikian sektor pedesaan desa menerima beban sangat tinggi untuk menanggulangi pengangguran;
4. Kebutuhan air pada masa mendatang terus meningkat untuk kepentingan keluarga, industri, dan kegiatan lainnya baik di desa maupun kota. Hutan memegang peranan penting dalam mengatur air tanah di Jawa, dan
5. Hutan komunal adat dan hutan rakyat belum disejajarkan dengan hutan negara/publik dalam hukum Indonesia, padahal hutan rakyat tersebar merata di Pulau Jawa, hutan adat telah terbukti mampu dijaga fungsinya oleh masyarakat dan mampu menjadi penyangga kebutuhan air Pulau Jawa di masa yang akan datang. Diperkirakan dengan kondisi hutansaat ini, suplai air di Jawa hanya mampu mendukung sebesar 45% dari total kebutuhan penduduk di Pulau Jawa.

Permasalahan lain mengenai kerusakan laut juga menjadi fakta menarik yang terjadi di Indonesia. Kerusakan terumbu karang dan mangrove menjadi perhatian yang serius karena berhubungan dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati laut. Fakta menunjukkan bahwa, Indonesia telah kehilangan sebagian besar mangrovenya. Dari 1982 hingga 2000, Indonesia telah kehilangan lebih dari

setengah hutan mangrove, dari 4,2 juta hektar hingga 2 juta hektar. Selain itu, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2012) mengungkapkan hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik. Sementara 27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. Bahkan Burke, dkk. menyebutkan setengah abad terakhir ini degradasi terumbu karang di Indonesia meningkat dari 10% menjadi 50% (www.Greenpeace.or.id).

Banyaknya permasalahan di hutan (daratan) dan lautan, menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. Padahal, keanekaragaman sumber daya hayati memegang peranan penting di masa mendatang dalam pembangunan nasional karena kebutuhan akan bahan-bahan hayati baru untuk obat, varietas baru tanaman, pertanian dan ternak, proses industri, dan pengolahan limbah. Hal ini tidak akan di capai Indonesia jika erosi keanekaragaman hayati di Indonesia, baik dari segi ekosistem, spesies maupun genetik, masih mengkhawatirkan. Berbagai faktor diantaranya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, merusakkan habitat alami akibat tekanan terhadap lahan dari pembangunan dan pertanian, pencemaran sungai, lahan basah serta lautan, dan introduksi spesies eksotik telah menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati. Faktor ini terkait pula dengan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan terjadinya erosi keanekaragaman hayati.

Dengan banyaknya isu kerusakan lingkungan terkait pembangunan, perlu adanya aspek-aspek yang penting untuk diperhatikan yaitu keberlanjutan. Tidak

hanya mengedapankan keunggulan ekonomi, melainkan sosial dan lingkungan juga diperhatikan. Konsep pembangunan berkelanjutan harus memikirkan sekarang dan masa depan. Aspek ekonomi, sosial dan ekologi diperhatikan keberlangsungannya. Artinya bahwa keserasian antara laju kegiatan pembangunan dengan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam, untuk menjamin tersedianya aset sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) untuk generasi mendatang masih tersedia dan tercukupi.

Dengan demikian, adanya pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan jangka panjang yang menuntut adanya solidaritas antar generasi dengan tujuan agar generasi mendatang dapat menikmati dan memanfaatkan secara adil sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan mereka. Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya pesisir dan kelautan perlu diperhatikan daya dukung dan kemampuan wilayah laut, pesisir dan daratan dalam hubungan ekologis, ekonomis, dan sosial. Kestinambungan ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam penerapannya, pembangunan berkelanjutan melaksanakan kaidah konservasi. Dimana memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan bijaksana serta meninggalkan sumber daya tersebut untuk masa mendatang tanpa mengetahui kebutuhan akan datang seperti apa. Konservasi merupakan konsep perlindungan serta pengembangan sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 3 Tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tujuan konservasi yaitu untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Untuk itu perlu adanya kesadaran bersama terkait tujuan konservasi yaitu kesejahteraan mutu kehidupan manusia.

Selain itu, permasalahan muncul dari masyarakat itu sendiri. Dimana pelibatan dan aktivitas masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam masih jauh dari baik. Seperti kebanyakan kasus, keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi seringkali diartikan sebagai tekanan terhadap keberadaan dan kelestarian kawasan konservasi. Hal ini dikarenakan manusia selalu diposisikan berada diluar dari lingkungan hutan itu sendiri (Awang, 2007). Kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi seringkali digambarkan dengan kondisi yang miskin, dengan pembatasan akses kedalam kawasan yang merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat membuat kondisi semakin parah.

Sembiring et al (tt:2-4) dalam laporan penelitiannya menyampaikan bahwa kawasan-kawasan konservasi tersebut saat ini tengah berada dalam ancaman kerusakan, penurunan mutu, dan upaya-upaya eksploitasi. Ancaman terhadap kawasan konservasi, disamping muncul dari sebab alam, juga disebabkan leh aktivitas manusia. Lebih lanjut menjelaskan bahwa ancaman lain yang tidak kalah besar dampaknya terhadap keberadaan kawasan konservasi muncul dari masyarakat sekitar hutan. Ancaman tersebut berupa pengambilan kayu,

pembukaan lahan ataupun perburuan liar. Akan tetapi upaya masyarakat sekitar hutan yang tidak bertanggung jawab tersebut lebih didasarkan oleh motivasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu dalam pengelolaan pesisir diperlukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Hal ini merupakan amanat dari UU No. 5 tahun 1990 pasal dan UU No. 27 tahun 2007 bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, dimana pelibatan aktif masyarakat diperlukan dalam proses pembangunan.

Hal lain yang menjadi ancaman atau perhatian khusus yaitu mengenai keterlibatan aktif stakeholder terkait. Pendapat Setyowati (2008:34) yang menyampaikan bahwa ancaman konservasi sangat terkait dengan pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi selama ini yang sering dinilai masih kurang partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Konsekuensi dari pola pengelolaan tersebut adalah kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat dan para pihak/pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk ikut berbagi tanggung jawab (*sharing of responsibility*) dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Hal tersebut terdapat makna tersirat bahwa harus adanya sinergi antar *stakeholder* dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Kemitraan para *stakeholder* mutlak diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat terlaksana. *Stakeholder* yang dimaksud yaitu pemerintah, swasta, civitas akademik, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat. Dari

sekian banyak *stakeholder* dalam pembangunan, perlu adanya sinergi diantaranya. Menurut Wahab (2002:160) sinergi dirumuskan sebagai hubungan yang saling memperkuat antara pemerintah dan kelompok-kelompok kerja antara pemerintahan dan warga lokal, biasanya diterima oleh kedua pihak. Sinergi akan menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam proses pembangunan.

Konsep sinergi muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi oleh pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis (Wahab, 2002:160). Hal ini mendasari bahwa peran masyarakat pun mempunyai andil besar dalam pembangunan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Masyarakat diberdayakan dalam suatu konsep sinergi pembangunan. Untuk itu pemberdayaan masyarakat harus ada dalam mensinergikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seperti halnya di kawasan konservasi Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang.

Pantai Kondang Merak, Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang merupakan kawasan pesisir dimana terdapat pantai, laut dan hutan lindung. Kawasan konservasi Pantai Kondang Merak mempunyai sumber daya laut dan hutan yang dapat digunakan untuk berbagai penelitian multidimensi keilmuan. Adanya hutan lindung satu-satunya di Kabupaten Malang dengan luas 679 ha dengan keanekaragaman hayati satwa hutan seperti burung, kupu-kupu, macan, lutung, dan lainnya serta keanekaragaman hayato laut seperti terumbu karang, padang lamun, hutan

mangrove dan ikan laut baik ikan hias maupun ikan konsumsi menjadi modal awal dalam mewujudkan kawasan konservasi. Kondisi yang masih alami ini perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Dalam mengelola kawasan Kondang Merak terdapat beberapa stakeholders yang terlibat, antara lain: Perum Perhutani, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, Kelompok Nelayan Karya Mina dan masyarakat desa dengan lembaganya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Bening. Masing-masing stakeholder berjalan dengan bagiannya. Artinya pengelolaan Kondang Merak dibagi menjadi dua jenis yaitu, pengelolaan laut dan hutan lindung/pantai (daratan). Pengelolaan ini dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya tata kelola bersama. Belum adanya sinergitas dalam tata kelola kawasan Kondang Merak menyebabkan lamanya pembangunan kawasan.

Terdapat dampak yang ditimbulkan dari hubungan antar stakeholder yang terkait berdasarkan aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu: Tinjauan dari aspek ekonomi, dampaknya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan adanya alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat. Hal ini merupakan dampak yang terjadi dari pola hubungan yang baik antar beberapa *stakeholder*. Tinjauan dari aspek sosial, beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain kesadaran masyarakat mengenai konservasi, kecemburuan sosial antar desa karena adanya kemajuan di kampung nelayan dan terkenalnya kampung nelayan sebagai masyarakat yang sadar lingkungan. Sedangkan tinjauan dari aspek

lingkungan yaitu kenakeragaman hayati dan ekosistem hutan lindung dan laut mulai membaik, limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik di kampung nelayan, dan berkurangnya lahan hutan alami.

Dengan kompleksitas kawasan Kondang Merak baik bentukan alam maupun stakeholder yang terlibat, maka pendekatan *quintuple helix* merupakan pendekatan yang cocok dengan kondisi ini. *Quintuple helix* merupakan model yang menyeluruh dan mengkhususkan pada sejumlah interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan dalam bernegara untuk mempromosikan dan memvisualisasikan sistem kerjasama dalam ilmu pengetahuan, *know-how*, dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan (Carayannis dan Campbell 2010 dalam Carayannis, Barth, Campbell, 2012:4). Lebih lanjut menjelaskan bahwa stakeholder dibagi menjadi lima subsistem yaitu, sistem pendidikan (akademika), sistem ekonomi (industri/swasta), sistem politik (pemerintah/pemerintahan), masyarakat berbasis media dan budaya, dan lingkungan alam.

Dalam pengaplikasian model *quintuple helix* secara optimal, dibutuhkan sinergi diantara stakeholders. Jika hubungan antar stakeholders dalam tahap sinergi, maka inovasi untuk pembangunan berkelanjutan dan antar stakeholder akan tercapai. Untuk itu diperlukan hubungan yang sinergi dengan persyaratan utama atau parameter sinergi menurut Doctoroff (1977) dalam Tschacher, Schiepek dan Brunne (1992, h.359) adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat dan kreativitas diantara pihak-pihak yang bekerjasama.

Berbagai ancaman dan hambatan sering terjadi dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di kawasan Kondang Merak. Beberapa ancaman tersebut yaitu perburuan hewan secara ilegal dan kerusakan terumbu karang sebagai habitat ikan. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan maupun pengunjung pantai Kondang Merak. Untuk itu, kelestarian lingkungan hidup dalam memanfaatkan sumber daya alam sesuai kaidah konservasi perlu dilakukan.

Dengan banyaknya potensi dan hambatan serta *stakeholder* yang terlibat, perlu adanya sinergi antara *stakeholder* dalam mengelola kawasan Pantai Kondang Merak ini agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan Kondang Merak ini menjadi menarik untuk diteliti karena kompleksitas kawasan dari bentukan alam ataupun *stakeholder* yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Sinergitas Stakeholders Dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana dampak sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa dampak sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Aspek teoritis memberikan sumbangan ilmiah di bidang sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Aspek praktis dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dan *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan penelitian sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat dan memberikan telaah empiris mengenai kawasan konservasi.

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini memuat mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan adalah

mengulas tentang penyajian data, analisis data penelitian, dan interpretasi hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan saran hasil penelitian. Diuraikan secara garis besar temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian, baik yang bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan pula implementasi dari hasil pembahasan. Sedangkan saran, merupakan rekomendasi terhadap studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan kedepan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa efektif dan efisien. Ada tiga pilar administrasi publik yaitu: 1.) perilaku organisasi dan perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi, 2.) teknologi manajemen dan institusi-institusi implementasi kebijakan, dan 3.) kepentingan publik yang terkait dengan pilihan etis setiap individu dan masalah-masalah publik (Henry, 1988:31-32).

Pengertian administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Indradi (2006:115) menyebutkan bahwa administrasi publik itu adalah:

- a. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;
- b. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan: eksekutif, yudikatif dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya;
- c. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik;
- d. Amat berbeda dengan administrasi privat;
- e. Berhubungan dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya peran administrasi publik menurut Frederick A. Cleceland sebagaimana dikutip oleh Keban (2004:15), sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi, dimana administrasi publik melalui pelayanan publiknya dapat memberikan atau menciptakan demokrasi atau apa yang disebut dengan *orginezed democracy*. Kegiatan pemberian pelayanannya dapat berupa pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik dan pembangunan kualitas manusia, dalam rangka mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran.

Menurut Keban (2004:10) untuk melihat secara garis besar ruang lingkup teoritis dari administrasi publik, maka perlu diketahui aspek atau dimensi strategis yang dibicarakan dalam administrasi publik atau yang paling menentukan dinamika administrasi publik, yaitu: dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara/alternatif terbaik untuk mencapai tujuan; dimensi organisasi berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit, penetapan prosedur, aturan dan standar untuk mencapai tujuan organisasi; dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang dapat di implementasikan untuk mencapai tujuan tertentu melalui prinsip-prinsip tertentu; dimensi etika dan moral memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, yang baik dan yang buruk; dimensi lingkungan diibaratkan dengan suasana dan kondisi sekitar yang

mempengaruhi dimensi yang lain; dan dimensi akuntabilitas kinerja menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik dalam suatu negara. Jadi, administrasi publik yang ideal adalah yang benar-benar mampu menggunakan keahlian dan keterampilan di bidang kebijakan, organisasi, manajemen, menerapkan prinsip-prinsip etika yang berlaku dan mampu mengenal dan menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan serta memberikan hasil nyata dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk kinerja.

Dengan banyaknya pengertian dan penjabaran mengenai administrasi publik, dapat ditegaskan kembali bahwa administrasi publik merupakan hubungan pemerintah dan masyarakat (swasta, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, civitas akademik dan masyarakat itu sendiri), yang menekankan pada kebijakan, organisasi, manajemen, etika dan moral, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

B. Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan mutlak harus terjadi jika suatu negara ingin mengarah kepada kemajuan. Pembangunan segala bidang menuju perubahan yang lebih baik tentunya. Menurut Kartasasmita (1997:9) pembangunan adalah perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat sedang berkembang. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik, secara materiil maupun sprituil. Sehingga pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan (Munir, 2002:24-25).

Muchdie dkk. eds. (2001:3-4) mengemukakan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti *development*, bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya, dalam hal ini penduduk setempat. Sebaliknya, pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain.

Menurut Sulistyani dalam Surjono dan Trilaksono (2007:11-13) yang menyatakan ada tiga paradigma pembangunan yaitu:

- 1) Paradigma pembangunan Pertumbuhan (*growth paradigm*)
Merupakan azas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama masyarakat dari paradigma pertumbuhan adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan negara. Di sisi lain paradigma pertumbuhan ini mengandung eksternalitas negatif yang tidak diharapkan yaitu jurang pemisah yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin.

2) Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Adanya kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengondisikan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memperhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/non renewable*.

3) Paradigma *Human Development*

Belajar dari kegagalan maka pendekatan pembangunan menggunakan pendekatan baru yang lebih humanis, yaitu pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi *sustainable development*. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elit penguasa. Dengan demikian konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha kaum lemah.

Menelaah dari pengertian maupun paradigma tersebut di atas, bahwa pembangunan merupakan perubahan dari berbagai bidang maupun aspek kehidupan yang membawa dampak positif bagi pelaksanaannya khususnya masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang untuk melihat tolak ukur ketercapaian pembangunan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Sumarwoto

(2006) dalam Sugandhy (2007:21), pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahnya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.

Secara implisit, definisi tersebut menurut Hegley, Jr (1992) dalam Sugandhy (2007:21-22) mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- a) Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi.
- b) Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
- c) Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerjasama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
- d) Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup.
- e) Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.
- f) Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

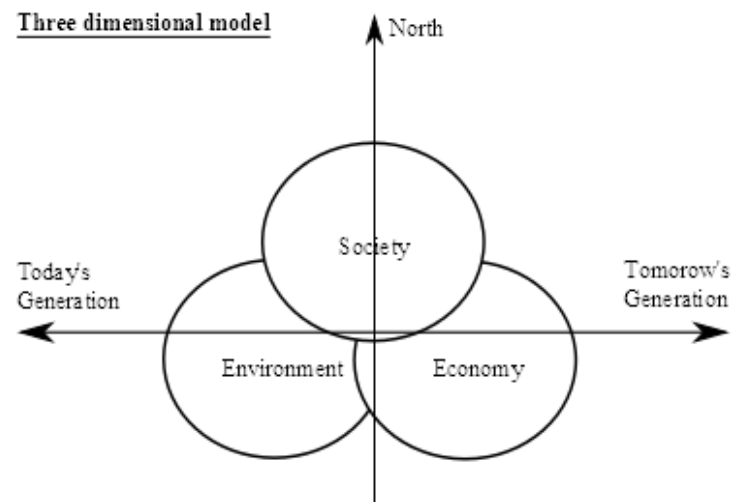
Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Hal tersebut

sependapat dengan Giddens (1999) dalam Saifullah (2007:9) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan kemampuan generasi sekarang untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena generasi sekarang tidak mengetahui generasi mendatang, atau bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam, gagasan pembangunan berkelanjutan tidak pernah akurat, dan karena itu tidak mengejutkan bahwa ada empat puluh definisi yang berbeda tentang hal itu. Pembangunan berkelanjutan dengan demikian lebih merupakan prinsip panduan ketimbang sebuah formula yang akurat.

Senada dengan hal tersebut Keraf (2006) dalam Helmi (2012:13) menyatakan bahwa hingga kini paradigma pembangunan berkelanjutan tidak banyak di implementasikan. Penyebabnya, pertama, paradigma tersebut kurang dipahami sebagai memuat prinsip-prinsip kerja yang menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. Kedua, penyelenggaraan pembangunan masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Masih terjadi ketidakseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan

sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi pertimbangan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut (Sugandhy, 2007:22-23).



Gambar 1. Model Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Von Stokar et al dalam Sugandhy (2007:22)

Dari gambar di atas terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan dimana dalam hubungan antar sinergi akan menelaah dampak dari masing-masingnya. Menurut Otto Soemarwoto (2003:38), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut bisa bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Berikut aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Aspek Ekonomi

Secara umum yang dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) adalah dalam pengertian mempertahankan kapital atau menjaga agar kapital (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan

ketika kapital tersebut dimanfaatkan (Dieren, 1995 dalam Asdak, 2012:41). Hal ini juga mempunyai pesan tersirat bahwa modal lingkungan alam tidak boleh dirusak ataupun hilang karena berkaitan dengan modal ekonomi. Asdak (2012:39) juga menambahkan bahwa keseluruhan proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Atas dasar tersebut perekonomian diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dahuri dkk (2008:144) menjelaskan secara ekonomi, konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa, manfaat yang diperoleh dari kegiatan penggunaan suatu wilayah pesisir serta sumber daya alamnya harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan terutama mereka yang termasuk dalam ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri.

2. Aspek Sosial

Kombinasi dari kohesi sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, moralitas, akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk dikuantitaskan, tapi penting untuk diperhatikan (Asdak, 2012:40). Dari pendapat tersebut di dapat beberapa aspek dari modal sosial yaitu interaksi sosial, budaya masyarakat, kelembagaan, kepercayaan masyarakat, hukum, disiplin dan moralitas atau kemanusiaan.

Putnam dalam Asdak, (2012:40) menjelaskan bahwa keberlanjutan sistem sosial dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis. Lebih lanjut menegaskan bahwa dimensi sosial mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi keuntungan secara adil, partisipasi, pemberdayaan masyarakat serta penghapusan kemiskinan.

3. Aspek Lingkungan

Menurut Dahuri, dkk (1996:142-145) menjelaskan dalam aspek lingkungan terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan yaitu: 1) keharmonisan spasial, 2) kapasitas asimilasi dan 3) pemanfaatan berkelanjutan. Pertama, keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, hendaknya tidak seluruhnya dimanfaatkan menjadi zona pemanfaatan tetapi juga dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi. Kedua, kapasitas asimilasi adalah kemampuan suatu ekosistem pesisir untuk menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. Ketiga, yaitu pemanfaatan berkelanjutan menafsirkan bahwa setiap kegiatan pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai sehingga membentuk suatu pemanfaatan yang harmonis.

Lebih lanjut Asdak (2012:39), menerangkan bahwa dimensi ekologi lebih menekankan pada pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekologi (*ecological service*). Oleh karenanya

tuntutan ke arah konservasi ekosistem makin besar karena meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati oleh pertumbuhan jumlah penduduk, anomali iklim, pola konsumsi dan oleh sebab antropogenik lainnya.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sugijoko dan Kusbiantoro eds. (1997:172), pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, *empowerment*. Konsep ini digunakan sebagai alternatif terhadap konsep-konsep pembangunan yang selama ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan (*power*) dan ketimpangan (*inequity*).

Menurut Sumodiningrat (1998:20), Sugijoko dan Kusbiantoro (1997:176-177) menyatakan pemberdayaan dari istilah Indonesia, bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah khas Indonesia dari pada barat. Di barat, istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau bahkan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Pemberdayaan (*empowerment*) berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari “dalam”, dan dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari “luar”. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996:9-10; 55-70)

Menurut Muhadjir (2000:29-30), membantu dalam konsep pemberdayaan tampil dalam kerangka rancangan dan implementasi yang secara berkelanjutan dan persuasif ditumbuhkan inisiatif dan upaya masyarakat itu sendiri. Bantuan yang diberikan lebih merupakan kondisi supportif. Pandangan hidup dan keyakinan kepribadian mandiri serta dimiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan bangsa itu pangkal atau dasar pemberdayaan.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, Kartasasmita (1996:159), mengatakan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana.
- 3) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakkan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya.

Wiratnolo dan Dwijowiyoto (2007:3) mengatakan pemberdayaan itu

sendiri terdiri dari 3 tahapan yang harus diperhatikan:

- 1) Tahap penyadaran
Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.
- 2) Tahap pengkapasitasan
Pengkapasitasan sering diistilahkan dengan “*capacity building*” atau dalam bahasa yang sederhana dikenal dengan memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu.
- 3) Pemberian daya
Adalah pemberian daya itu sendiri atau “*empowerment*” dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang dimiliki.

Pendapat lain yang hampir sama disampaikan oleh Sulistiyani

(2004:83), yang mengatakan tahapan pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat yang diberdayakan. Penciptaan iklim yang kondusif menjadi prioritas utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. langkah selanjutnya adalah menyadarkan penduduk, bahwa mereka memiliki potensi baru untuk dikembangkan. Setelah mereka menyadari bahwa mereka memiliki potensi, selanjutnya diberikan power berupa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan untuk mengatur diri agar mencapai kemandirian. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka pikirkan (Sulistiyani, 2004:80).

Pendapat berbeda juga dikemukakan oleh Pranaka dan Priyono (1996) mengenai tahap pemberdayaan masyarakat yaitu: 1.) Fase Inisiasi adalah bahwa semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah; 2.) Fase Partisipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian; dan 3.) Fase Emansipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan

untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase ini masyarakat telah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri (fase emansipatoris).

Pentingnya keterlibatan NGO dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1996) bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, seperti LSM baik lokal maupun nasional, mempunyai potensi dan peran besar pemberdayaan masyarakat. NGO dapat juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Peran swasta biasanya pada segi operasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi.

Dengan banyaknya pemikiran dan pemahaman konsep dari pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring serta evaluasi program dan kegiatan yang berlangsung. Peran masyarakat diperhitungkan, bukan hanya sebagai objek dari pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan dengan tujuan kemandirian masyarakat.

4) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya, yakni di kawasan pesisir (laut), dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya) merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, sumber daya perikanan mengambil peranan yang besar sebagai penggerak dinamika ekonomi lokal di kawasan pesisir.

Masyarakat pesisir yang sebagian besar sebagai nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris petani. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang dikerjakannya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal maka nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan cenderung memiliki karakteristik yang khas, yakni keras, tegas dan terbuka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pesisir khususnya nelayan sulit menerima perubahan karena menganggap perubahan itu akan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan mereka.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Menurut Kusnadi (2009:27-31) pemberdayaan masyarakat pesisir diartikan sebagai usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat pesisir dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan tawar menawar (*bargaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi dinamis.

Lebih lanjut menjelaskan bahwa kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik (Kusnadi, 2009:31). Beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:

- a. Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat dan kepercayaan diri menguat;
 - b. nilai tabungan dan investasi bertambah;
 - c. kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan;
 - d. kondisi kualitas SDM berkembang baik.
- 2) Kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.
 - 3) Kelembagaan sosial atau pranata-pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
 - 4) Potensi sumber daya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 - 5) Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi: informasi, kapital, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan.
 - 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
 - 7) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan sebuah proses sosial yang cukup panjang untuk mencapai tujuan. Di samping sebagai proses sosial, pemberdayaan adalah strategi, sarana, fasilitas, media dan instrumen untuk mengantar masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan bukan merupakan suatu tujuan atau hasil yang ingin dicapai, melainkan sarana dalam proses untuk mencapai tujuan.

D. Stakeholders

1. Konsep *Stakeholders*

Stakeholders adalah individu atau kelompok organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara

positif maupun negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Ada tiga *stakeholders* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Hetifah, 2009:29).

Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh *stakeholders* terhadap suatu isu, maka *stakeholders* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, antara lain:

- a) *Stakeholders* Utama (Primer).
Merupakan *stakeholders* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dalam suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti tokoh masyarakat yang akan menjadi objek kebijakan atau program, pimpinan instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara langsung dalam pengambilan dan implementasi program, ataupun perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam mendanai implementasi program.
- b) *Stakeholders* Pendukung (Sekunder).
Merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan ataupun program, namun memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap suatu masalah tertentu sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Contohnya yaitu: lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab secara langsung; Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- c) *Stakeholders* Kunci

Merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholders* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program. Misalnya *stakeholders* kunci untuk suatu keputusan program dalam level Kabupaten yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten dan Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. (hmp_humas_USAHID, 2008).

Pengkategorian tipe *stakeholders* ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing *stakeholders* dalam sebuah usaha kerjasama yang mereka bentuk, baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun kebijakannya. Artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam hubungan yang saling mendukung tersebut. Masing-masing unsur memiliki arah tujuannya yang bersifat harmonis dengan tujuan bersama yang lebih besar (*social whole*) yang dilalui dengan kerjasama.

2. *Stakeholders* dalam Teori *Quintuple Helix*

a) Triple Helix

Dalam model inovasi *triple helix*, akademik (perguruan tinggi, universitas), pemerintah, dan industri/swasta menyusun menjadi tiga helix yang berkolaborasi satu dengan lainnya untuk membuat atau menemukan pengetahuan baru, teknologi, produk dan jasa. Dalam model inovasi ini, universitas dan peneliti mempunyai peran yang kuat dalam pengetahuan. Peran pemerintah adalah merumuskan kebijakan dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan teknologi. Perkumpulan perusahaan/swasta mengembangkan strategi dan pemasaran produk serta

melakukan produksi dan inovasi proses (Etzkowitz 1998, 2003; Leydesdorff & Meyer 2006 dalam Arnkil dkk, 2010:12).

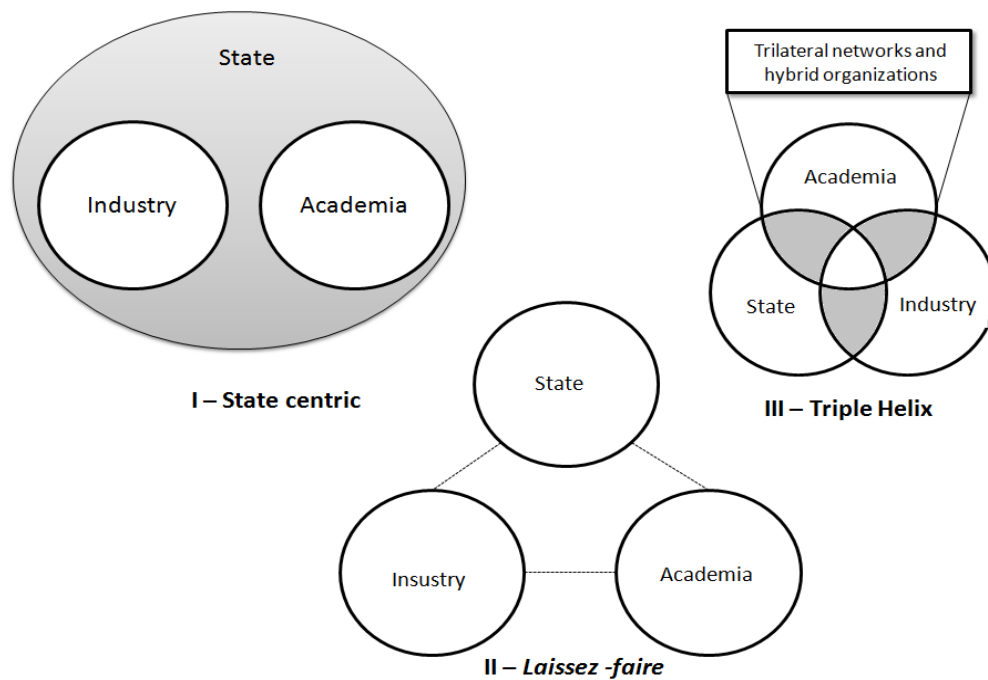
Triple helix dibagi kedalam tiga model dasar menurut (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000 dalam Farinha dan Fereirra (2013:13). Dalam model pertama, (I – pemerintah terpusat) peran pemerintah mendominasi pihak lainnya (lingkaran spiral) lain. Perkembangan sistem inovasi dan kemitraan dan kelembagaan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai mediator dalam mengatur hubungan industri, transfer teknologi dan peraturan institusional.

Model kedua, (II – *Laissez faire*) terdiri atas tiga lingkaran kelembagaan yang terpisah dengan garis batas yang kuat, dan hubungan antara lingkaran tersebut sangat terbatas. “Ketegasan” peran secara “tradisional” mencirikan model ini. Misalnya, peran perguruan tinggi adalah menyediakan SDM (melalui pendidikan tinggi secara formal) dan lebih banyak melaksanakan riset dasar. Sementara itu peran pemerintah dibatasi oleh “kaidah” umum intervensi menurut pandangan arus utama ekonomi (*mainstream economics*), yaitu mengatasi kegagalan pasar.

Model ketiga, (III – *Triple Helix*) kelembagaan universitas, industri, dan pemerintah, di samping melakukan fungsi-fungsi tradisional mereka, masing-masing juga menggunakan peran pihak lain, antara lain dengan menggunakan jasa universitas untuk menumbuhkan industri, atau melihat peran pemerintah sebagai pengelola inovasi lokal dan regional.

Perkembangan pola kemitraan yang kompleks dan dinamis antara ketiga aktor utama sistem inovasi. Para aktor berperan dalam penciptaan infrastruktur pengetahuan dalam bentuk lingkaran spiral yang tumpang-tindih (*overlapping*), di mana setiap lingkaran mengambil peran pihak lainnya dan pada antarmukanya berkembang organisasi-organisasi hibrida.

Gambar 2. Model *State Centric*; *Laissez Faire* dan *Triple Helix*



Sumber: Etzkowitz (2003) dalam Farinha dan Fereirra (2013:13)

b) *Quadruple Helix*

Dalam konteks ini, *quadruple helix* menambahkan heliks keempat yang teridentifikasi dua makna yaitu masyarakat berbasis media dan berbasis budaya, seperti masyarakat sipil.” (Carayannis and Campbell (2009); Danilda et al. (2009); Lindberg et al. (2012) ; Colapinto and Porlezza (2012)

dalam Carayannis dan Campbell, 2012:13). Ini berarti masyarakat dilibatkan dalam *quadruple helix*, dan semakin kompleks sistem yang terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut Carayannis and Campbell (2009) dalam Carayannis, Bath, Campbell, (2012:5) menjelaskan bahwa masyarakat berbasis media tidak hanya mendukung penyebaran pengetahuan dalam negara, tetapi juga masyarakat yang berbasis budaya dengan nilai-nilai, pengalaman, tradisi, dan visi yang memunculkan pengetahuan bagi pengetahuan masyarakat. Hal tersebut menerangkan ada dua masyarakat dalam *quadruple helix*. Pertama, masyarakat berbasis media yang mendukung tersebarnya pengetahuan dan informasi seperti koran, surat kabar, televisi, media online dan lainnya. Kedua, masyarakat berbasis budaya yaitu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai, etika dan budaya luhur masyarakat setempat. Bisa juga dikatakan masyarakat dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Quadruple helix bertujuan memberi perhatian pada mekanisme inovasi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas maupun teknologi. Proses *quadruple helix* diarahkan pada produksi, sektor teknologi tinggi dan mengintegrasikan antara inovasi pengetahuan, *output* akhir barang dan jasa dan peran *civil society* diarahkan sisi komunikasi: teknologi pengetahuan, barang dan jasa dan output ekonomi secara keseluruhan. Jadi elemen *quadruple helix* adalah pemerintah, fasilitas, riset dan pengembangan, laboratorium universitas dan *civil society* sebagai dasar sumber inovasi dan

pengetahuan serta *intellectual capital* mampu meningkatkan kapabilitas inovasi.

c) *Quintuple Helix*

Model *Quintuple helix* didasarkan oleh model *triple helix* dan model *quadruple helix* dengan menambahkan satu bidang yaitu lingkungan alam (*nature environment*). Tujuan dan kepentingan memasukkan lingkungan alam ke subsistem pengetahuan dan inovasi dalam model *quintuple helix*, karena alam menjadi pusat dan penyeimbang komponen dari dan untuk produksi pengetahuan dan inovasi. Seperti yang dilansir oleh Carayannis 2012:5 bahwa “*The goal and interest of the Quintuple Helix are to include natural environment as a new subsystem for knowledge and innovation models, so that ‘nature’ becomes established as a central and equivalent component of and for knowledge production and innovation.*”

Lebih lanjut Carayannis, Barth, Campbell menerangkan bahwa lingkungan alam untuk proses produksi pengetahuan dan penciptaan inovasi baru adalah bagian penting karena berfungsi sebagai kelestarian, kelangsungan hidup, kemanusiaan, dan dapat membuat teknologi ramah lingkungan. Melalui pendapat tersebut terdapat maksud tersirat bahwa konsep konservasi yang terdiri dari perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan tetap ada dalam konsep *quintuple helix*.

“The Quintuple Helix is a model which grasps and specializes on the sum of the social (societal) interactions and the academic exchanges in a state (nation-state) in order to promote and visualize a cooperation system of knowledge, know-how, and innovation for more sustainable development.”

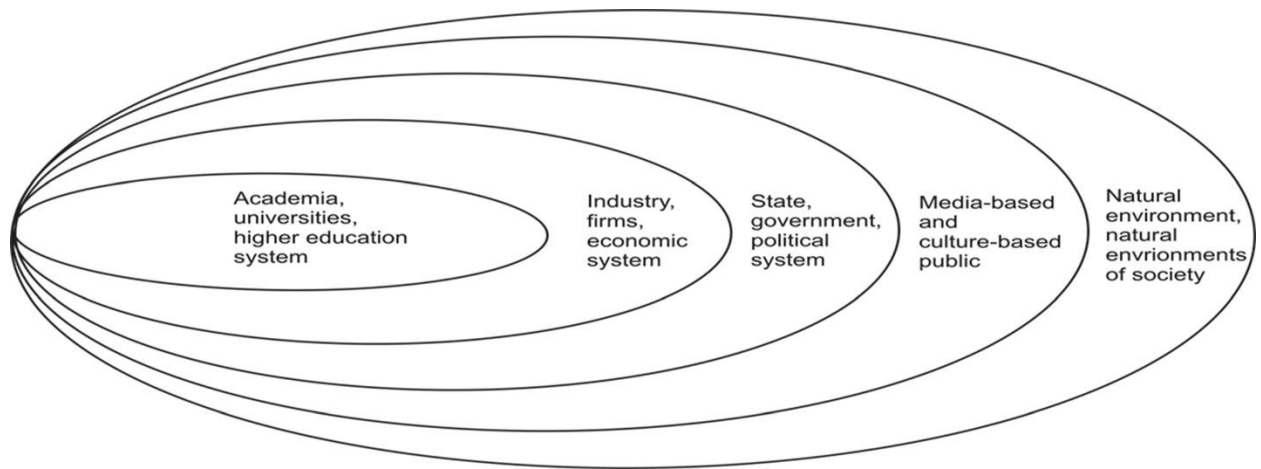
Quintuple helix merupakan model yang menyeluruh dan mengkhususkan pada sejumlah interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan dalam bernegara untuk mempromosikan dan memvisualisasikan sistem kerjasama dalam ilmu pengetahuan, *know-how*, dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan (Carayannis dan Campbell 2010 dalam Carayannis, Barth, Campbell, 2012:4). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa kata kunci dalam *quintuple helix* yaitu interaksi sosial, pertukaran pengetahuan dan sistem kerjasama dalam ilmu pengetahuan (masukan pengetahuan), *know-how*, dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Interaksi sosial dalam *quintuple helix* merupakan hubungan antar unsur yang saling terkait satu sama lain. Menurut Muluk (2007:312-313) unsur ini juga sering disebut sebagai subsistem dan dapat berfungsi sebagai sistem pula. Antar subsistem harus melakukan interaksi agar menciptakan sinergi. Sinergi ditentukan oleh interaksi antar unsur tersebut. Interaksi berarti pengikat atau penghubung antar unsur.

Unsur/subsistem dalam *quintuple helix* antara lain akademika/pendidikan, industri/swasta, pemerintah/pemerintahan, masyarakat berbasis media dan budaya, serta lingkungan alam. Seperti yang

dikatakan oleh Carayannis and Campbell (2010) dalam Carayannis, Barth, Campbell (2012:5) bahwa:

The Quintuple Helix, thereby, visualizes the collective interaction and exchange of knowledge in a state (nation-state) by means of the following five subsystems (i.e., helices): (1) education system, (2) economic system, (3) natural environment, (4) media based and culture-based public (also civil society), (5) and the political system.



Gambar 3. Subsistem dalam Model *Quintuple Helix*

Sumber: Etzkowitz dan Leydesdorff (2000:111) dan Carayannis dan Campbell (2009:207; 2010:62).

Dari bagan diatas terdapat beberapa elemen dalam sistem pada *quintuple helix* yaitu sistem pendidikan (akademika), sistem ekonomi (industri/swasta), sistem politik (pemerintah/pemerintahan), masyarakat berbasis media dan budaya, dan lingkungan alam.

- a. Sistem pendidikan: Sistem pendidikan, merupakan subsistem pertama, mendefinisikan sebagai akademisi, universitas, sistem pendidikan tinggi,

dan sekolah. Dalam helix ini, yang diperlukan adalah 'modal manusia' (misalnya: siswa, guru, ilmuwan/peneliti, kewirausahaan akademik).

- b. Sistem ekonomi: Sistem ekonomi, sebagai subsistem kedua, terdiri dari industri, perusahaan, layanan dan bank. Helix ini memfokuskan pada 'modal ekonomi' (misalnya; kewirausahaan, mesin, produk, teknologi, uang).
- c. Lingkungan alam: Lingkungan alam sebagai subsistem ketiga adalah menentukan untuk pembangunan berkelanjutan pembangunan dan memfokuskan pada 'modal alam' (misalnya; sumber daya alam, tanaman-tanaman, satwa-satwa)
- d. Masyarakat berbasis media dan berbasis budaya. Subsistem keempat ini, mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk 'modal'. Di satu sisi, helix ini memiliki 'modal sosial' melalui masyarakat berbasis budaya (misalnya: tradisi, nilai-nilai, dan lainnya). Di sisi lain, helix ini memiliki modal informasi melalui masyarakat berbasis media (misalnya: televisi, internet, surat kabar, dan lainnya) yang berisi informasi mengenai berita, komunikasi, jaringan sosial.
- e. Sistem politik: Sistem politik, sebagai subsistem kelima, juga sangat penting, karena merumuskan kebutuhan, untuk negara masa sekarang dan masa depan. Demikian juga mendefinisikan untuk mengatur serta administrasi kondisi umum negara. Oleh karena itu, helix ini memiliki 'modal politik dan hukum' (misalnya: ide, hukum, rencana, politisi).

Kata kunci kedua adalah pertukaran pengetahuan. Dalam konteks *quintuple helix*, masing-masing subsistem dan *stakeholder* memiliki sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, masing-masing subsistem mempunyai masukan (*input*) atau keluaran (*output*) dari pengetahuan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya pertukaran pengetahuan antar subsistem. Tujuan dari konsepsi *helix* adalah terampil melalui sumber daya pengetahuan yang memproduksi nilai tambah bagi masyarakat untuk mengarahkan pembangunan berkelanjutan (Carayannis, Barth, Campbell, 2012:5). Artinya bahwa pengetahuan merupakan hal penting yang harus ada pada konsep ini untuk menghasilkan nilai lebih agar terjalinnya interaksi antar subsistem.

Hal senada juga disampaikan Barth, (2011a) dalam Carayannis, Barth, Campbell (2012:5), bahwa yang lebih penting dari pemilihan unsur *quintuple helix* terlepas dari faktor manusia adalah sumber daya pengetahuan yang melalui sirkulasi (*circulation of knowledge*) antar subsistem, perubahan inovasi dan keluaran pengetahuan (*know-how*). Dari hal tersebut dinyatakan bahwa dalam seluruh proses *quintuple helix* memerlukan pertukaran pengetahuan melalui sirkulasi pengetahuan yang bergerak secara terus menerus apabila terdapat sinergi antar unsur.

Kata kunci ketiga adalah sistem kerjasama dalam ilmu pengetahuan (masukan pengetahuan), keluaran pengetahuan, dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini titik tekannya kepada sistem, dimana sistem didefinisikan sebagai “keseluruhan interaksi antar unsur dari

sebuah objek dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan (Aminullah dan Soesilo, 2001 dalam Muluk, 2007:312).

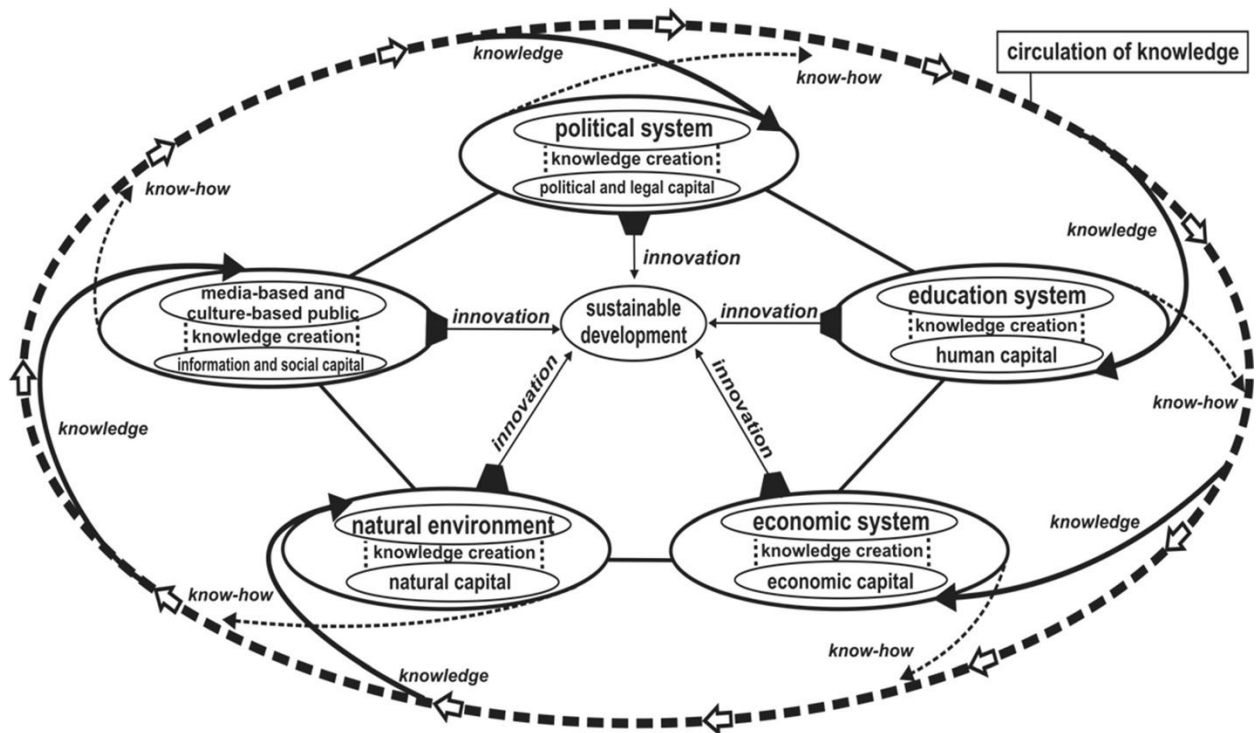
Lebih lanjut Muluk menerangkan bahwa kinerja dari suatu sistem ditentukan oleh fungsi setiap unsurnya sehingga gangguan terhadap fungsi salah satu unsur dapat mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Untuk itu masing-masing unsur atau subsistem dalam suatu sistem harus dapat menghasilkan interaksi yang menuju kepada sebuah sinergi antar subsistem.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam konsep *quintuple helix* bahwa subsistem saling berinteraksi pada pertukaran pengetahuan. Dimana masing-masing subsistem mempunyai modal tersendiri sesuai dengan bidangnya. Selain itu masing-masing subsistem mempunyai *input knowledge* dan *output knowledge*. *Input* dan *output knowledge* ini membentuk suatu sirkulasi antar subsistem yang menghasilkan suatu sistem model.

Menurut Carayannis, Barth, Campbell, (2012:6) menerangkan bahwa sirkulasi pengetahuan dari subsistem ke subsistem menyiratkan bahwa pengetahuan memiliki kualitas *input* dan *output* dari dan untuk subsistem. Jika masukan pengetahuan (*input of knowledge*) merupakan kontribusi kepada lima subsistem, maka penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*) terjadi. Keluaran dari penciptaan pengetahuan (*Output of knowledge creation*) masing-masing subsistem terdapat dua jalan: (1) jalan pertama *output* mengarah untuk produksi inovasi untuk lebih berkesinambungan; (2) jalan kedua *output* mengarah kembali ke sirkulasi pengetahuan. Melalui

sirkulasi pengetahuan, *output* baru yang dibuat dari keluaran pengetahuan subsistem menjadi *input* pengetahuan yang berbeda bagi subsistem lainnya dalam *quintuple helix*.

Lebih lanjut Carayannis dan Campbell, (2006) dalam Carayannis, Barth, Campbell, (2012:6) menjelaskan bahwa, di satu sisi, pengetahuan berfungsi sebagai *input* atau sumber daya untuk masyarakat maju dan ekonomi, yang semakin bergantung pada pengetahuan. Di sisi lain, produksi pengetahuan (*knowledge creation*) juga menghasilkan pengetahuan sebagai *output*, yang kemudian adalah kembali (daur ulang) sebagai masukan pengetahuan. Dalam hal ini berarti keluaran dari masing-masing subsistem adalah pengetahuan. Dimana ada dua keluaran, pertama untuk pembangunan berkelanjutan; kedua, untuk sirkulasi pengetahuan yang telah berjalan dan nantinya juga sebagai masukan pengetahuan baru bagi subsistem lainnya. Berikut model *quintuple helix* dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) yang dimodifikasi oleh Carayannis dan Campbell (2006, 2009, 2010) dan Bart (2011a) dalam Carayannis, Barth, Campbell, 2012:7).

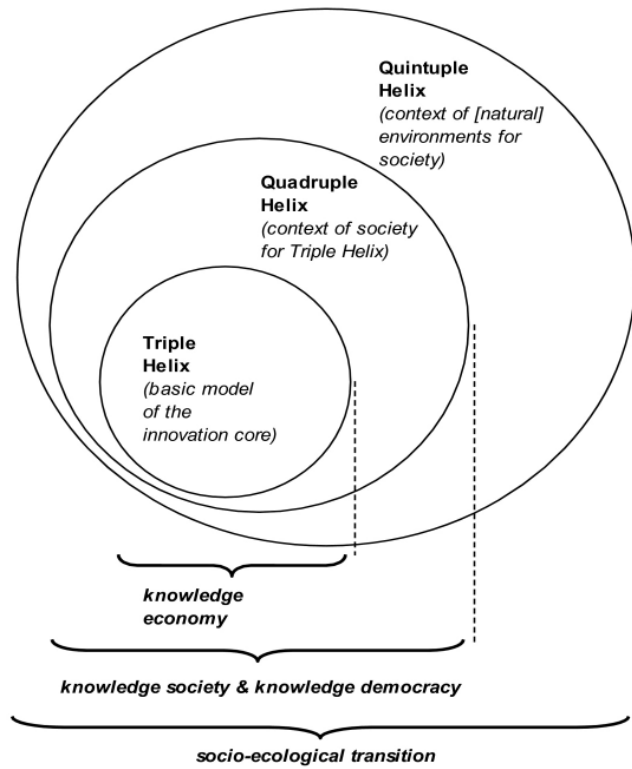


Gambar 4. Model *Quintuple Helix* dan Fungsinya

Sumber: Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), dalam Carayannis dan Campbell (2006, 2009, 2010), dan dalam Barth (2011a).

Secara global konsep *triple helix*, *quadruple helix* dan *quintuple helix* merupakan konsep pengembangan antar satu sama lain dan saling melengkapi. Masing-masing mempunyai nilai lebih dari setiap konsepnya. Konsep *triple helix* fokus kepada pengetahuan ekonomi. *Quadruple helix* lebih mengarah kepada perspektif pengetahuan sosial/masyarakat dan demokrasi. Dari hal tersebut model *quadruple helix*, berevolusi bersama membentuk pengetahuan ekonomi dan pengetahuan sosial (Dubina et al. 2012 dalam Carayannis, Barth, Campbell, 2012:4). Selanjutnya, menjadi *quintuple helix* dengan perspektif sosial ekologi dari lingkungan alam dan

sosial masyarakat. Sosial ekologi berfokus pada interaksi, pengembangan bersama, evolusi bersama dengan masyarakat dan alam (Carayannis dan Campbell 2010 dalam Carayannis, Barth, Campbell, 2012:4).



Gambar 5. Inovasi dan Produksi Pengetahuan dalam Konteks Ekonomi, Sosial, Lingkungan

Sumber: Carayannis dan Campbell (2012:18), Etzkowitz dan Leydesdorff (2000:112) dan Danilda et al. (2009)

E. Kebijakan Lingkungan

1. Dasar Kebijakan Lingkungan

Dalam Konferensi Stockholom tahun 1972, muncul gagasan konsep *eco-development* atau pembangunan berwawasan ekologi. Komitmen untuk mengimplementasikan pembangunan berwawasan lingkungan dipertegas dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992; bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan sekarang dan mendatang. Sepuluh tahun kemudian diadakan *World Summit On Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada bulan September 2002. Masyarakat global menilai bahwa operasional prinsip-prinsip Rio dan agenda 21 masih jauh dari harapan, sehingga dalam *Millennium Development Goals* yang dicetuskan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 muncul komitmen untuk menetapkan bahwa 8 sasaran harus dicapai pada tahun 2015. Pelaksanaan komitmen besar tersebut belumlah mampu melawan lajunya tingkat konsumsi yang melumat dan menghancurkan sumber daya alam.

Konsep Pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable development*) yang pertama kali diadopsi dari hasil Konferensi Stockholm 1972 ke dalam GBHN Indonesia tahun 1973, yang merupakan landasan kebijakan bagi pelaksanaan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Namun kelemahannya adalah belum disertai dengan perangkat hukum yang menjamin pembangunan sosial dan

perlindungan, sehingga proses ini melahirkan Undang-Undang lingkungan hidup Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1982 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1997. Berdasarkan perkembangan baru, maka ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, yang merupakan sebuah refleksi untuk menjawab adanya sistem hukum sumber daya alam Indonesia di bawah konsep pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus mengutamakan aspek berkelanjutan. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 44 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 15 dan Pasal 18 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas dan jelas menjelaskan bahwa Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh menteri negara lingkungan hidup. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b) Kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup.

Aspek lingkungan hidup harus dipastikan telah dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, agar dampak dan atau resiko lingkungan hidup dapat dicegah sejak proses di hulu. Selain itu perlu adanya sinergi atau integritas antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam tataran kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi perlu mengandung unsur lingkungan hidup agar kelestarian alam tetap terjaga.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan program.

Dalam konteks KLHS, suatu proses kajian dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan program sejak dini. Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang mempunyai dampak signifikan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai. KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan/atau program. Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS

digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan risiko negatif terhadap lingkungan.

Dalam proses tersebut keterkaitan antar regulasi dan kebijakan perlu ditinjau dari segi pembangunan berkelanjutan melalui KLHS. Keterkaitan dan integrasi tersebut mengharuskan adanya aspek-aspek keberlanjutannya baik untuk sekarang maupun masa mendatang. KLHS merupakan penyaring dari kebijakan, rencana dan program dalam kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

3. Konservasi Lingkungan

Gagasan konservasi muncul diakibatkan oleh kekhawatiran yang semakin mencekam akan langkahnya persediaan sumber daya alam dan energi. Sumber daya alam dan energi terbatas adanya, jadi apabila terus menerus diambil dan diolah maka persediaannya akan semakin berkurang dan akhirnya akan habis. Untuk itulah dilakukan berbagai gerakan sadar

konservasi yang bersandarkan pada penyelamatan lingkungan untuk kehidupan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan konservasi yaitu untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Lebih lanjut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa kegiatan konservasi meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Konservasi dalam makna yang hakiki memuat konsep perlindungan (*preservation*) serta pengembangan (*development*) sumber daya alam dan energi untuk kebutuhan umat manusia di bumi pada masa kini dan mendatang. Oleh sebab itu dalam konsep konservasi secara implisit memuat pula aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam dan energi untuk generasi yang mendatang (Saifullah, 2007:26).

Menurut Gifford Pinchot dalam Saifullah (2007:67) menyatakan bahwa konservasi adalah penggunaan sumber daya alam dan energi terbesar, terbanyak dan selama mungkin. Dalam usaha konservasi sudah terkandung di dalamnya aspek pengembangan (*development*) dan perlindungan (*preservation*). Dalam penerapannya, konsep tersebut saling bertentangan antara aliran pengembangan dan aliran perlindungan. Selain itu, Pinchot juga mengemukakan bahwa upaya konservasi hendaknya didasarkan atas tiga prinsip, yaitu: 1.) pengembangan (penggunaan sumber daya yang ada untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang); 2.) pencegahan pemborosan sumber daya alam; dan 3.) pengembangan sumber daya alam untuk kepentingan umum. Pengertian ini membedakan konservasi dengan eksploitasi dan preservasi. Dimana eksploitasi adalah penggunaan sumber daya alam secara penuh dan maksimum, di dalamnya tidak ada aspek pelestarian. Sedangkan preservasi berarti perlindungan secara penuh terhadap sumber daya alam dan tidak ada penggunaan.

Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan pola pengelolaan kawasan pesisir dilakukan dalam bentuk zonasi. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang

berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Sistem zonasi terdiri dari zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan terbatas. Zona inti diperuntukkan antara lain untuk:

- a) Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
- b) Perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan rentan terhadap pertumbuhan;
- c) Perlindungan situs budaya/adat tradisional;
- d) Penelitian; dan
- e) Pendidikan.

Zona inti dalam kawasan konservasi pesisir dapat terdiri dari:

- 1) Daerah tempat berpijah (*spawning ground*), tempat bertelur (*nesting site*), daerah asuhan (*nursey ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*) ikan dan/atau biota perairan lainnya;
- 2) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan tidak terganggu; dan
- 3) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan.

Kemudian zona penyangga merupakan zona perlindungan yang didalamnya terdapat satu atau lebih zona inti. Zona ini terdiri dari vegetasi alamiah yang harus disisakan sepanjang pantai. Peruntukkan zona ini antara lain:

- a) Perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b) Pariwisata dan rekreasi;
- c) Penelitian dan pengembangan; dan/atau
- d) Pendidikan.

Sedangkan pemanfaatan terbatas merupakan zona yang masih memiliki nilai konservasi tertentu, tetapi masih mentolerir pemanfaatan oleh manusia dan layak bagi kegiatan eksploitasi yang diizinkan dalam kawasan lindung. Konservasi merupakan pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam. Untuk itu perlu menerapkan kaidah-kaidah konservasi dalam setiap pembangunan baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

4. Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut dimana batas kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat air laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti penggundulan hutan, pertanian dan pencemaran (Soegiarto dalam Dahuri dkk, 2008:8).

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Selain itu juga menjelaskan perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa panyau, dan laguna. Kawasan pesisir adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka wilayah pesisir memiliki dua batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah. Akan tetapi, penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan, dengan kata lain batas wilayah pesisir berbeda dari satu negara ke negara yang lain, karena setiap negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem pemerintahan tersendiri (Dahuri dkk, 2008:5).

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan (*manmade*). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai

berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuari, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman (Muhammad, 2012: 120-124)

Menurut Dahuri dkk (2008:11-12), menyatakan bahwa sumber daya di wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam cepat pulih dan sumber daya alam yang tidak dapat pulih. Sumber daya alam yang dapat pulih antara lain: sumber daya perikanan (plankton, benthos, ikan moluska, krustasea, dan mamalia laut), rumput laut, padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya tak dapat pulih antara lain: minyak dan gas, bijih besi, timah, bauksit dan mineral serta bahan tambang lainnya. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks ini keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang keilmuan dan keterkaitan ekologis.

F. Konsep Sinergi

Sinergi berasal dari kata *syn-ergo* suatu kata Yunani yang berarti bekerjasama (Hampden-Turner, 1990 dalam Sulasmi, 2006:219). Menurut Walton (1999), dalam Sulasmi (2006:219) definisi yang paling sederhana dari sinergi adalah hasil upaya kerjasama atau '*co-operative effort*', karena itu inti

dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey (1989) dalam Sulasmi (2006:220), menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*'. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sinergi dalam suatu kerjasama akan tercapai melalui interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama.

Konsep lain dikemukakan Wahab dkk, (2002:160) yang menyatakan bahwa konsep sinergi muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi oleh pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis. Sinergi dirumuskan sebagai hubungan yang saling memperkuat antara pemerintah dan kelompok-kelompok kerja antara pemerintahan dan warga lokal, biasanya diterima oleh kedua pihak.

Hampden-Turner (1990) dalam Sulasmi (2006:223) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.

Dengan adanya sinergi negara bukan satu-satunya aktor dalam pembangunan yang dominan karena telah berbagi kepentingan dengan pihak lain.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Wahab dkk, (2002:159) bahwa negara harus rela berbagi peran, berbagi kekuasaan (*sharing of power*) dan bekerjasama (yang saling menguntungkan) dengan kekuatan-kekuatan sosial otonom dalam masyarakat (*state-civic cooperation*).

Lasker dan Weiss (2003:125) menjelaskan beberapa keuntungan apabila dua atau lebih individu atau kelompok bersinergi dalam mengatasi sebuah masalah, yaitu:

- a. Mampu mendapatkan informasi akurat yang akan berguna dalam menentukan langkah-langkah yang harus diprioritaskan dalam mengatasi masalah.
- b. Mampu melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang masing-masing *stakeholders* yang terlibat.
- c. Mampu menggabungkan informasi yang bersifat statistik dan kualitatif guna memahami akar permasalahan yang sesungguhnya.
- d. Mampu memahami nilai-nilai lokal yang akan digunakan dalam mengidentifikasi strategi yang harus dipakai dalam mengatasi masalah.

Sinergi antar *stakeholders* sangat diperlukan untuk mengintegrasikan atau mensinergikan berbagai kepentingan, yang diperlukan dalam baik pengambilan kebijakan, pelaksanaan maupun monitoring evaluasinya. Sinergi ini mengarah ke satu tujuan utama yang dicapai secara bersama-sama dengan mengesampingkan ego sektoral.

Covey (1989) dalam Sulasmi (2006:223) menggunakan istilah sinergistik dalam suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Pengertian sinergi ini dapat dipersamakan sebagai suatu perkembangan kreativitas yang dibangun secara bersama dari rasa saling percaya dan semangat

kerjasama yang sangat tinggi, hingga kedua belah pihak akan mampu menyatakan dengan terbuka gagasan dan pendapat masing-masing, tanpa merasa diri mereka terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi. Menurut Covey, komunikasi yang sinergistik dibangun dari suatu bentuk keberanian dan ketegasan, dengan sekaligus konsiderasi yang tinggi pula. Makin relevan dan signifikan permasalahan yang menjadi fokus dalam hubungan kerjasama itu, sinergi yang dihasilkannya akan lebih bermakna pula untuk kepentingan organisasi.

Sinergi merupakan hubungan kerjasama tidak semata-mata untuk membangun kebersamaan, tetapi juga membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota kelompok membentuk kreativitas secara kolektif. Hubungan interaktif antar anggota dalam kelompok akan saling memacu daya pikir, yang pada akhirnya akan menghasilkan gagasan baru, yang berjalan melalui suatu proses yang berkesinambungan sehingga terjadi proses pengembangan pengetahuan dan wawasan yang semakin tinggi kualitasnya. Pengembangan pengetahuan dan wawasan sebagai perwujudan dari sinergi itulah yang dirasakan penting sekali untuk diwujudkan (Sulasmi, 2006:220). Persyaratan utama atau parameter bagi suatu sistem yang sinergi menurut Doctoroff dalam Tschacher (1992:359), adalah:

- a) Kepercayaan, dengan adanya kepercayaan diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat tercipta sinergi karena dengan kepercayaan akan menimbulkan perasaan nyaman dan tidak menimbulkan kecurigaan.

- b) Komunikasi yang efektif, harus adanya komunikasi yang efektif diantara pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada pesan yang salah diartikan.
- c) *Feedback* yang cepat, ada *feedback* yang cepat supaya diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat mengetahui respon dari pihak lain secara cepat.
- d) Kreativitas diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dinilai dapat menghancurkan sinergi itu sendiri.

Parameter ini untuk mensyaratkan suatu hubungan mencapai sinergi atau tidak. Masing-masing aspek harus ada untuk menghasilkan sinergitas. Parameter tersebut juga digunakan dalam penempatan tingkatan sinergi menurut English (2005:48) meliputi :

1. *Defensive*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang rendah akan menimbulkan pola hubungan komunikasi kerja sama yang bersifat pasif atau hati-hati
2. *Respectful*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang baik memunculkan suatu pola komunikasi diantara pihak yang bekerja sama bersifat saling menghargai.
3. *Synergistic*. Tingkat kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerja sama yang terjalin akan menghasilkan “*output*” yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak.

G. Sinergi antar *stakeholder* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat

Pembangunan hakikatnya menuntut perubahan kearah yang lebih baik atau maju dari sebelumnya. Perubahan ini dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan yang mengarah kepada masyarakat. Implementasi dari pembangunan adanya program dan kegiatan yang nyata untuk kepentingan masyarakat.

Sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah, hampir seluruh aspek diserahkan kepada daerah. Begitu pula dengan program dan kegiatan guna pembangunan, seluruhnya di serahkan kepada daerah. Harapannya agar melalui pembangunan daerah ini, suatu daerah dapat maju dan berkembang kearah yang lebih baik dengan potensi serta kemampuan daerahnya itu sendiri.

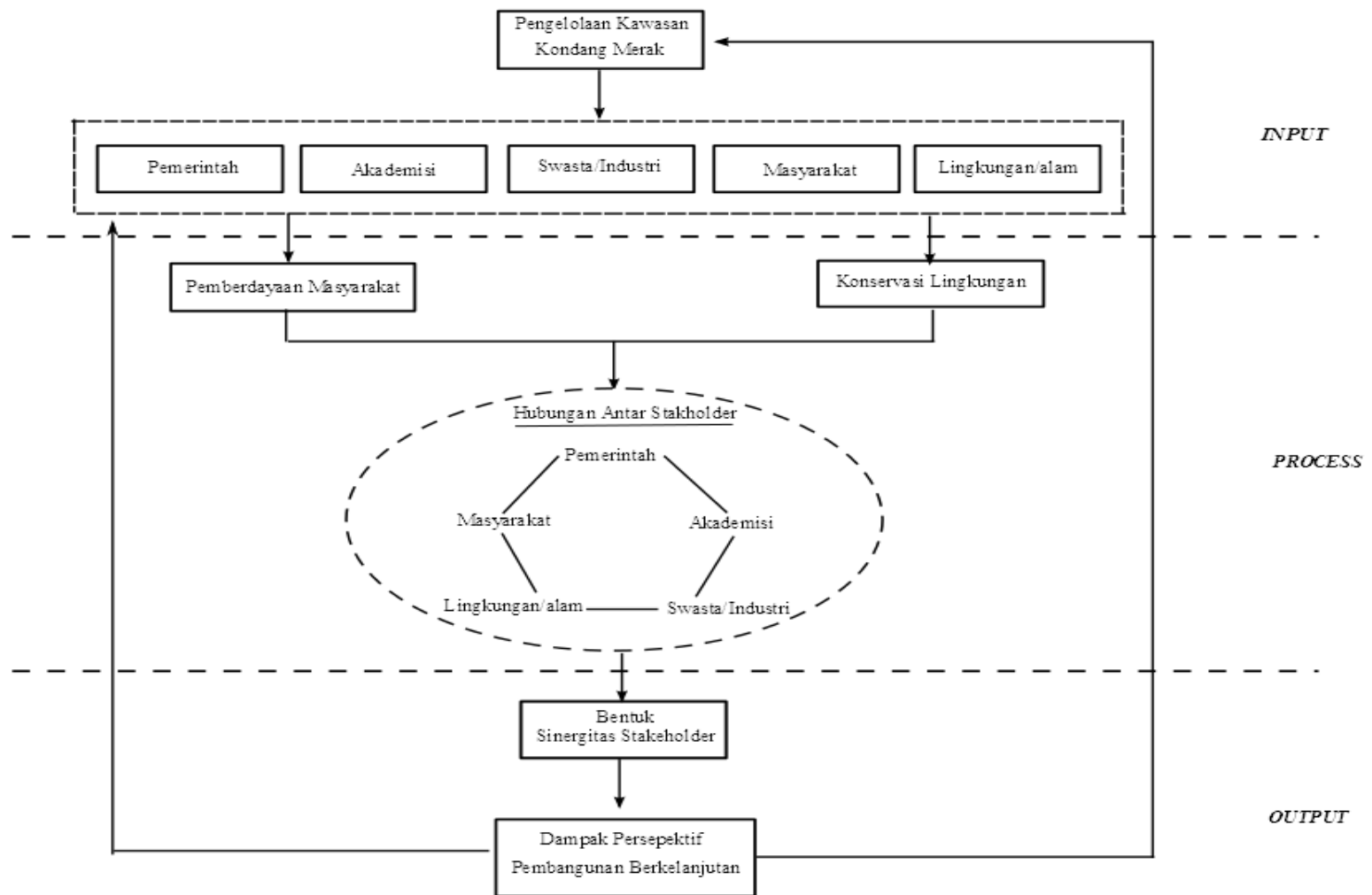
Dengan adanya konsep tersebut, daerah berlomba-lomba mengembangkan wilayahnya untuk pembangunan kearah yang lebih baik. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal dalam mengembangkan wilayah, daerah mulai berkembang. Selain pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara terus menerus, pembangunan juga berdampak pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pertanyaannya bagaimana pembangunan yang dilakukan bukan hanya untuk generasi sekarang saja tetapi juga generasi mendatang? Untuk itu, perlu adanya pembangunan yang dilakukan dengan kaidah konservasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan yang dimaksud ialah pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan ini juga tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera

(Soemarwoto, 1992 dalam Helmi, 2012:29). Pembangunan memiliki 3 pillar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kemitraan para *stakeholder* pun mutlak diperlukan agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana. *Stakeholder* yang dimaksud yaitu pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, masyarakat dan lingkungan alam. Dari sekian banyak *stakeholder* dalam pembangunan, perlu adanya sinergi diantaranya. Menurut Wahab dkk, (2002:160) sinergi dirumuskan sebagai hubungan yang saling memperkuat antara pemerintah dan kelompok-kelompok kerja antara pemerintahan dan warga lokal, biasanya diterima oleh kedua pihak. Sinergi akan menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam proses pembangunan. Menurut beberapa peneliti yang dapat dirangkum kedalam pendapat Doctoroff dalam Tschacher (1992:359) mengenai syarat adanya sinergi yaitu, *count trust , effectif communication, rapid feedback and creativity among the prerequisites for positive synergistic effects*. Dimana sinergi menuntut adanya hasil lebih dari suatu kerjasama atau kerja sendiri yaitu dapat menciptakan kreativitas, inovasi dan pengetahuan baru yang dilakukan bersama.

Jika di telaah melalui teori *quintuple helix*, maka hubungan antar stakeholder dan subsistem harus mencapai tahapan sinergi. Karena dengan tahapan sinergi maka akan muncul suatu pengetahuan baru untuk perputaran pengetahuan dan interaksi positive antar subsistem serta muncul inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, hubungan yang bertahap sinergi mutlak diperlukan untuk suatu pembangunan berkelanjutan.



Gambar 6. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic*, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005:6). Menurut Sugiyono (2009:6) disebut juga metode *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Lebih lanjut menurut Danim (2002:51) terdapat lima ciri utama penelitian kualitatif, yaitu:

- 1) Penelitian kualitatif mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung.
- 2) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.
- 3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses kerja, yang seluruh fenomena yang dihadapi diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari.
- 4) Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif.
- 5) Penelitian kualitatif memberi tekanan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut dengan masalah kehidupan.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat. Akhir dari laporan ini dilakukan analisis terhadap data dan fenomena yang diperoleh dari penelitian lapangan guna dapat disajikan pada laporan penelitian. Hasil akhir penelitian kualitatif tergantung pada

perkembangan di lapangan, yang didasarkan kepada kemampuan peneliti untuk menggali dan mengelola berbagai masukan yang diperoleh dalam penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi penelitian dalam perspektif kerja yang jelas sehingga objek yang diteliti tidaklah meluas dan tidak terjebak pada data yang banyak diperoleh di lapangan. Merujuk pada Moleong (2009:7) fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat di Pantai Kondang Merak, Kabupaten Malang.
 - a. Aktor yang terlibat dalam sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - b. Aktivitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Bentuk sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - d. Faktor yang berpengaruh pada sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Dampak sinergitas *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan.
 - a. Dampak dari segi ekonomi;
 - b. Dampak dari segi sosial;
 - c. Dampak dari segi lingkungan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan, Moleong (2005:26) menyatakan bahwa cara terbaik yang bisa ditempuh adalah dengan jalan penulis bersperspektif ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang diteliti berlangsung. Lokasi penelitian dilakukan di Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pantai Kondang Merak merupakan wilayah konservasi karena terdapat hutan lindung satu-satunya di Kabupaten Malang yang tersisa dengan luas sekitar 679 ha. Selain itu, terdapat keanekaragaman hayati baik itu flora, fauna dan sumber daya alam yang harus dilindungi, dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana demi keberlanjutan dan kelestarian alam.
2. Terdapat potensi yang bisa dikembangkan baik itu laut maupun hutannya. Potensi tersebut dapat berupa olahraga alam bebas, ekowisata dan penelitian bagi civitas akademik.
3. Rusaknya ekosistem laut dan hutan karena aktivitas manusia merupakan ancaman bagi keberlangsungan ekosistem flora dan fauna serta sumber daya alam sekitarnya. Ancaman ini datang dari pemangku kebijakan, wisatawan maupun masyarakat.

Situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini situs-situs penelitian sebagai berikut:

1. Perum Perhutani KPH Malang
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
3. LSM Sahabat Alam
4. *Aspinal Foundation*

5. LMDH Sumber Bening
6. Kelompok Nelayan Karya Mina

D. Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Pemahaman mengenai macam sumber data merupakan bagian yang penting bagi peneliti, karena ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh (Sutopo dalam Bakri, 2003;111). Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan. Data juga diperoleh dari hasil observasi terhadap gejala atau proses yang menjadi kaitan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pemberi informasi adalah:

- a) Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon dan Kepala Bidang Lingkungan Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengelola hutan negara untuk itu perlu diketahui tindakan yang telah dilakukan.

- b) Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana aktivitas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan konservasi dengan pelibatan masyarakat di Kondang Merak
- c) LSM Sahabat Alam, dengan alasan karena LSM Sahabat Alam merupakan LSM konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang telah ada di Kondang Merak, untuk itu perlu diketahui aktivitasnya dalam pembangunan dan pengembangan kawasan Kondang Merak.
- d) *Aspinal Foundation*, dengan alasan ingin mengetahui keterlibatan *Aspinal Foundation* pada sinergi *stakeholder* dalam konservasi lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat di Kondang Merak.
- e) LMDH Sumber Bening, untuk mengetahui sejauh mana aktivitas masyarakat desa pada sinergi *stakeholder* dalam konservasi lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat di Kondang Merak.
- f) Kelompok Nelayan Karya Mina, untuk mengetahui sejauh mana aktivitas masyarakat kampung nelayan pada sinergi *stakeholder* dalam konservasi lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat di Kondang Merak.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya yang dapat berupa dokumen-dokumen, laporan, artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh berupa profil

Desa Sumber Bening tahun 2011, Keputusan Direksi Perum Perhutani tentang tugas dan fungsi Perum Perhutani KPH Malang, Ketetapan Bupati Malang mengenai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, dokumen perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Sumber Bening dan *Aspinal Foundation*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk itu fenomena ini perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil di lapangan. Menurut Danim (2002:121) mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apapun, termasuk pada penelitian kualitatif yang desain penelitiannya tidak kaku alias dapat dimodifikasi setiap saat, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat strategis bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data yang dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan observasi secara fleksibel melihat kondisi objek dan lokasi penelitian pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan seluruh

panca indra yang dimiliki oleh peneliti dan disesuaikan dengan objek peneliti dan berlandaskan teori dan pengetahuan peneliti.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi dan partisipasi sesuai dengan kondisi lapangan. Observasi non partisipasi, yakni peneliti tidak melibatkan diri dalam lingkungan yang diamati sehingga mempengaruhi objek amatan tersebut, peneliti hanya sebagai pengumpul data saja. Sedangkan partisipasi, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2003:113-114). Sejalan dengan hal tersebut Narbuko dan Achmadi (2003:83-85) mengemukakan bahwa tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat informan.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti saat dilapangan yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin dimana, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan proses wawancara berlangsung mengikuti situasi serta pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ada jawaban atau pernyataan menyimpang.

Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara keluar dari fokus yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan pengumpulan data pada arsip, laporan, gambar-gambar, foto-foto, peraturan, kebijakan dan data sekunder lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penjalanannya dapat dilakukan dengan mencatat dan menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi dan situs penelitian yang dianggap relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

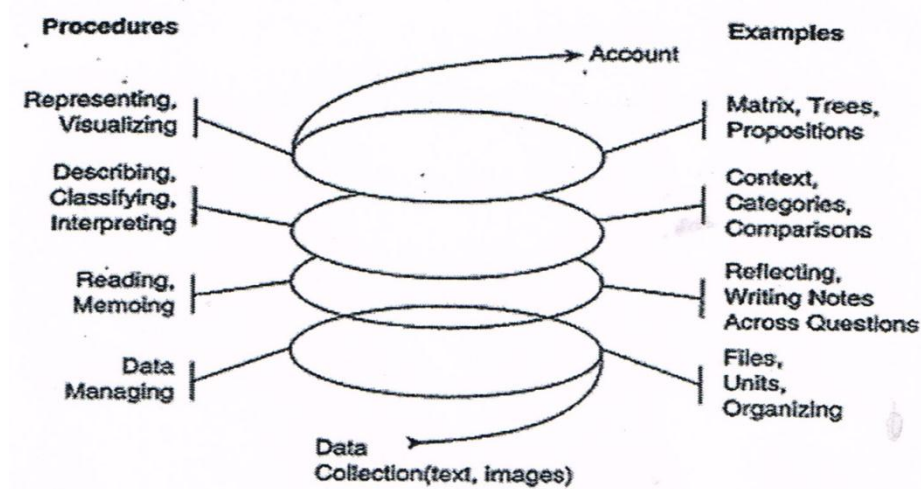
Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2009:4) mengemukakan bahwa instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

1. Peneliti sendiri, merupakan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah memasukkan peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses observasi, wawancara dan analisis data.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.

3. Catatan lapangan (*field notes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.
4. Pedoman observasi (*observasi schedule*), yaitu serangkaian arahan dan pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
5. Alat perekam (*tape recorder*), sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara dan kamera sebagai bahan alat bantu penulis mengamati kejadian di lapangan.
6. Alat tulis menulis, sebagai alat bantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Metode Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik analisis data dari John W Creswell, dikarenakan teknik analisis data ini menggambarkan spiralitas yang dapat memberikan eksplorasi data yang tepat dan relevan dengan data yang dikumpulkan. Teknik analisis data ini dirasa lebih detail dalam menyusun data sehingga dapat membentuk bahasan yang sangat komperhensif dan detail, dimana terdapat tahap visualisasi yang mempresentasikan data. Tidak hanya itu, dalam teknik analisis data ini adanya tahap deskripsi data, klasifikasi dan interpretatif data yang dapat menyusun pembahasan secara menyeluruh.



Gambar 7. Model Spiral Analisis Data Kualitatif Creswell

Sumber: John W Creswell (2007:151)

Berdasarkan pendekatan di atas dapat dijelaskan lebih mendalam dalam langkah-langkah analisis secara urut sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah pertama ini menggunakan transkrip wawancara, memilah dan memilih materi yang berhubungan dengan penelitian, mengelompokkan dan menyusun data hasil penelitian ke dalam jenis-jenis sumber informasi dan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan mempersiapkan data yang relevan mengenai sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Membaca dan memahami keseluruhan data. Langkah kedua dilakukan dengan memahami pengetahuan umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara menyeluruh. Gagasan atau ide umum apa

yang disampaikan dalam perkataan informan, bagaimana inti dari gagasan-gagasan tersebut, kesan apa yang ditimbulkan, dan bagaimana pemberian informasi dari informan. Penulis juga melakukan pencatatan dengan isi catatan-catatan khusus dan gagasan umum mengenai data yang diperoleh dan bersangkutan dengan sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3. Mendeskripsikan, mengklasifikasi dan menginterpretasi data. Langkah ketiga dengan melakukan pengambilan data atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data, mengklasifikasikan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf dan gambar-gambar yang mendukung ke dalam kategori-kategori dan memberikan label pada kategori tersebut. Dalam hal ini mengklasifikasikan ke dalam fokus/tema yaitu 1) sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan sub tema aktor yang terlibat, aktivitas antar stakeholder, bentuk sinergitas; dan 2) dampak sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, dengan sub tema dampak ekonomi, sosial dan ekologi. Setelah mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau tema selanjutnya mendeskripsikan data tersebut secara jelas dan rinci.

Selanjutnya interpretasi dari pribadi peneliti berdasarkan pada kenyataan bahwa peneliti membawa pengetahuan dan pengalaman pribadi

yang dialami ke dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memberikan interpretasi pribadi dan mengaitkannya serta menganalisis berdasarkan dengan literature/teori-teori terkait sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat.

4. Merepresentasikan dan memvisualisasikan data. Langkah keempat ini membuat presentasi dan visualisasi data hasil penelitian. Bisa dengan maksud membuat dan menunjukkan kesimpulan dalam tabel, gambar dan bentuk atau model hasil penelitian. Hal ini dapat dalam bentuk, matrix, model *existing* dari hubungan antar *stakeholder* dalam kawasan Kondang Merak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak antara 112°17'10,90" BT - 122°57'00,00" BT dan antara 7°44'55,11" LS - 8°26'35,45" LS. Berbatasan dengan tujuh kabupaten dan Samudera Indonesia, antara lain:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto dan Jombang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- Lingkar dalam : Kota Malang dan Kota Batu

Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya sekitar 3.238,26 km², terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, dan terbagi habis ke dalam 3.125 RW dan 14.352 RT.

Letak geografis Kabupaten Malang berada tepat di pusat Jawa Timur, menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter). Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya, terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpanjang di

Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang.

Di selatan Kabupaten Malang yang merupakan dataran rendah atau yang merupakan daerah lembah terdapat wilayah pesisir sepanjang 85,92 km. Wilayah pesisir dan kelautan di Kabupaten Malang terdiri dari 6 kecamatan yang tersebar di 15 desa pesisir, secara berurutan dari barat ke timur adalah: Desa Tulung Rejo Kec. Donomulyo (Pantai Kondang Iwak), Desa Banjar Rejo Kec. Donomulyo (Pantai Bantol), Desa Kedung Salam Kec. Donomulyo (Pantai Ngliyep dan Pantai Nglurung), Desa Mentaraman Kec. Donomulyo (Pantai Jonggring Saloka dan Pantai Menjangan), Desa Purwodadi Kec. Donomulyo (Pantai Mondangan), Desa Sri Gonco Kec. Bantur (Pantai Balekambang), Desa Sumberbening Kec. Bantur (Pantai Kondangmerak), Desa Gajah Rejo Kec. Gedangan (Pantai Bajul Mati), Desa Tumpak Rejo Kec. Gedangan (Pantai Wonogoro), Desa Sidoasri Kec. Sumbermanjing Wetan (Pantai Sidoasri), Desa Tambak Rejo Kec. Sumbermanjing Wetan (Pantai Tamban dan Pantai Sendang Biru), Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo (Pantai Lenggoksono dan Pantai Wediawu), Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo (Pantai Sipelot) dan Desa Lebakharjo Kec. Ampelgading (Pantai Licin). Ciri khas laut pantai Selatan merupakan lautan bebas, dengan keadaan gelombang dan arus yang sangat besar.

Kodisi geografis yang strategis, udara yang cukup sejuk dan didukung potensi pariwisata yang memadai menyebabkan Kabupaten Malang menjadi salah satu tujuan bagi para wisatawan baik nusantara maupun manca negara.

Potensi wisata yang memadai terdiri dari wisata pantai, pemandian, alam, hutan/wana, peninggalan sejarah dan lain-lain. Beberapa lokasi wisata yang sudah cukup terkenal adalah Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Sendangbiru, Arung Jeram (*rafting*) Bayem, Pemandian Wendit, Taman Rekreasi Sengkaling dan Wisata Pesarean Gunung Kawi, dan beberapa lokasi wisata lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Sektor andalan perekonomian Kabupaten Malang adalah sektor pertanian, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, yaitu sekitar 14,79 persen (47.403 hektar) merupakan lahan sawah, 34,07 persen (109.150 hektar) adalah tegal/ladang/kebun, 4,94 persen (15.838 hektar) adalah areal perkebunan, dan 2,41 persen (7.731 hektar) adalah hutan. Komoditi utama di Kabupaten Malang adalah padi, jagung dan ubikayu (sebagai komoditi turunannya) serta palawija (ubi jalar, kedelai dan kacang tanah). Komoditi lain yang tercakup dalam tanaman bahan makanan (tabama) yang cukup potensi adalah komoditi hortikultura. Melihat kondisi alam Kabupaten Malang yang sejuk, maka wajar bila komoditi hortikultura cukup potensi, tercatat 18 komoditi sayuran dan 21 komoditi buah-buahan yang potensi untuk dikembangkan.

Komoditi perkebunan rakyat Kabupaten Malang adalah cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kapuk, randu dan tembakau. Produk utama kayu rakyat adalah kayu jati, mahoni, mindi, sengon dan sono. Di sektor peternakan, ternak andalan Kabupaten Malang adalah ternak sapi, baik sapi perah maupun sapi potong.

Selain itu kuda, kerbau, kambing, babi, ayam petelor, ayam pedaging dan entok juga merupakan komoditi ternak yang dikembangkan di kabupaten ini.

Wilayah pesisir Kabupaten Malang juga memiliki potensi laut yang sangat besar. Laut selatan terkenal dengan potensi ikan pelagis berupa tuna, tongkol, cakalang, layang, dan lain-lain yang setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah hasil tangkapan. Potensi laut Kabupaten Malang bukan hanya berupa hasil laut, tetapi juga pantai beserta pemandangannya yang masih asri dan menjadi obyek wisata yang cukup digemari bukan hanya masyarakat Malang, tetapi juga luar daerah. Letak pesisir Kabupaten Malang juga sangat strategis dalam jalur transportasi laut. Saat ini telah mulai dilaksanakan pengembangan yang dipusatkan di kawasan Sendangbiru diantaranya pengembangan pelabuhan laut skala nasional di Pantai Tamban, pengembangan kawasan pelabuhan umum dan internasional, pengembangan pusat perikanan skala nasional dan arahan jalur pelayaran menghubungkan ke berbagai pusat perikanan nusantara yaitu Muncar Banyuwangi, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar pulau dan negara.

Kawasan pesisir Kabupaten Malang ditinjau dari kondisi fisik daratnya berada pada ketinggian 0-2000 meter diatas permukaan laut. Kondisi lahannya bervariasi yaitu dari yang terjal sampai pegunungan. Kondisi hidrologi di kawasan pesisir Kabupaten Malang meliputi kondisi air permukaan dan kondisi air tanah. Pantai-pantai yang memiliki sumber air permukaan atau aliran sungai dan bermuara sampai laut adalah Pantai Licin, Pantai Sipelot, Pantai Lenggoksono, Pantai Tamban, Pantai Wonogoro dan Pantai Kondangmerak.

Kondisi sungai pada musim kemarau pada umumnya tertutup pasir, sehingga aliran sungai terhenti di mulut muara dan baru terbuka pada musim penghujan. Sedangkan sumber air tanah diperoleh dengan cara melakukan pengeboran dengan kedalaman 40-60 meter. Disamping sumber air dalam tanah, sumber air utama penduduk adalah mata air yang lokasinya tersebar diseluruh wilayah pesisir Kabupaten Malang.

Perkembangan armada perikanan terutama armada laut yang terdapat di beberapa pantai selatan Kabupaten Malang sangat bervariasi yaitu perahu golek, pakisan, scoci, jakung dan kunting. Alat tangkap yang digunakan seperti *purse seine*, *gill net*, payang, pancing rawai (prawe), jaring, tonda dan kendet. Sedangkan untuk armada perairan umum berupa jukung, perahu kecil dan perahu sedang dengan alat tangkap yang digunakan umumnya jaring/jala.

2. Gambaran Umum Desa Sumber Bening

Desa Sumberbening merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Malang Selatan yang berada di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, terletak antara 112°30'00" BT - 112°34'00,00" BT dan antara 8°18'00" LS - 8°25'00" LS. Secara geografis Desa Sumberbening memiliki batasan fisik sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pringgondani
- Sebelah Timur : Desa Srigonco, Desa Bantur
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Desa Bandungrejo

Luas wilayah Desa Sumberbening adalah 20,2362 km² atau 2.023,62 ha. Pemanfaatan ruang yang ada di Desa Sumberbening yaitu untuk ladang, perkebunan, pemukiman, sawah tandah hujan, hutan, dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan ruang paling banyak adalah sebagai ladang. Sedangkan pemanfaatan ruang paling sedikit adalah pemanfaatan untuk pulau-pulau kecil. Luas penggunaan lahan ladang sebesar 950,31 ha (46,96%), luas penggunaan lahan perkebunan sebesar 834,24 ha (41,23%), luas penggunaan lahan hutan sebesar 135,26 ha (6,68%), luas penggunaan lahan sawah tadah hujan sebesar 70,11 ha (3,46%), luas penggunaan lahan pemukiman sebesar 29,48 ha (1,46%), luas penggunaan lahan *mangrove* sebesar 2,60 ha (0,13%) dan luas penggunaan lahan pulau-pulau kecil sebesar 1,62 ha (0,08%). Jadi dapat dikatakan bahwa tiga seperempat luas lahan wilayah Desa Sumber bening dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan ladang dan perkebunan.

Secara administratif, wilayah Desa Sumberbening terdiri dari 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun Sumberwates, Dusun Krajan dan Dusun Banjarjo. Masing-masing dusun memiliki potensi yang jika dikombinasikan akan menjadi satu potensi unggulan desa melalui pemberdayaan masyarakatnya dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Adapun potensi dari ketiga dusun tersebut adalah:

1. Dusun Sumberwates

- Berada di ujung utara desa dengan mata pencaharian paling banyak bertani dan beternak kambing lokal

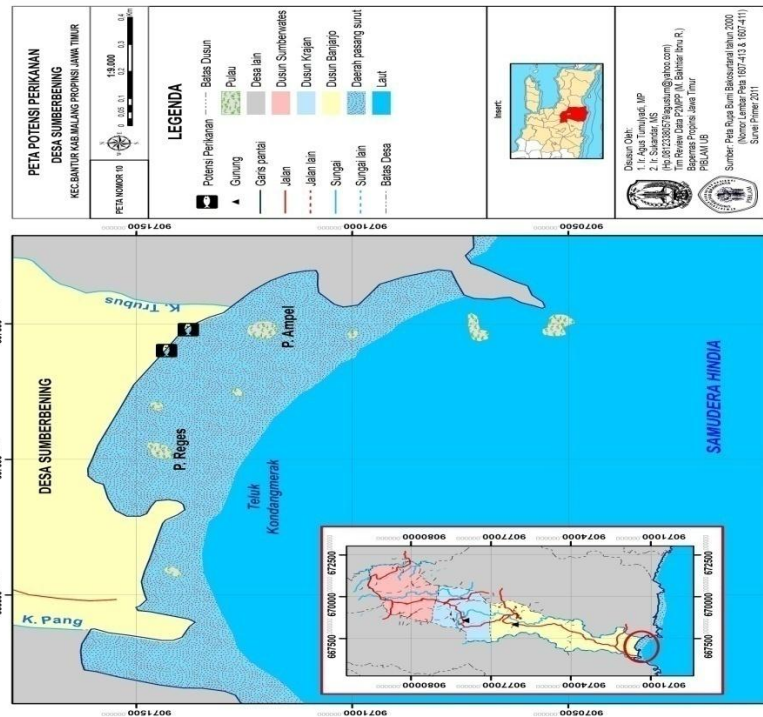
- Terdapat area perkebunan sehingga dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak selain sebagai produk pertanian
- Terdapat usaha skala rumah tangga dibidang kerajinan kayu berupa mebel.

2. Dusun Krajan

- Berada di tengah desa dan merupakan pusat pemerintahan Desa Sumberbening
- Merupakan dusun yang paling banyak dihuni penduduk sehingga banyak terdapat pertokoan, warung, bengkel dan lain sebagainya
- Berada pada lokasi yang strategis, yaitu jalur utama menuju kecamatan
- Terdapat usaha skala rumah tangga yaitu pengrajin tempe dan tahu.

3. Dusun Banjarjo

- Berada di ujung selatan Desa Sumberbening
- Masih banyak lahan pertanian sehingga dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak selain sebagai produk pertanian
- Dengan dibangunnya proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) yang melewati Desa Sumberbening khususnya Dusun Banjarjo, maka Dusun Banjarjo memiliki potensi pariwisata yaitu Pantai Kondangmerak dan sangat menunjang untuk pembuatan pelabuhan untuk tempat tambat kapal nelayan.



Gambar 8. Peta Wilayah Kondang Merak

Selain itu, wilayah Desa Sumberbening juga dibagi menjadi 35 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW). Jarak antara Desa Sumberbening dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 55 km dan dapat ditempuh selama kurang lebih 1,5-2 jam perjalanan dengan menggunakan jalur darat. Sedangkan jarak Desa Sumberbening dengan ibu kota kecamatan kurang lebih 15 km. Ada 2 (dua) rute yang bisa ditempuh untuk menuju Desa Sumberbening, pertama dari Kota Malang - Terminal Gadang - Bululawang - Gondanglegi - Bantur - Srigonco - Desa Sumberbening dan rute yang kedua dari Kota Malang - Pakisaji - Kepanjen - Pagak - Sumbermanjing Kulon - Bandungrejo - Desa Sumberbening. Tidak ada angkutan yang menuju Desa Sumberbening karena

mobil angkutan hanya sampai di Bantur dan bila ingin menuju Desa Sumberbening dapat menggunakan jasa tukang ojek.

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sumberbening

No.	Dusun	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1.	Sumberwates	01-12	01-02
2.	Krajan	13-26	03-04
3.	Banjarjo	27-35	05-06

Sumber: Profil Desa Sumber Bening Tahun 2011

Desa Sumberbening memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.834 jiwa yang terdiri dari 1.682 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah rumah tangga hampir miskin sebanyak 332 KK dan rumah tangga miskin sebanyak 148 KK. Penduduk desa sebagian besar mendiami pada daerah-daerah yang relatif datar dan sebagian berada di dataran tinggi yang ada di desa dan menyebar di jalan-jalan yang ada diseluruh wilayah desa. Persebaran penduduk pada setiap dusun hampir merata, dimana penduduk paling banyak berada di Dusun Krajan sebanyak 2.548 jiwa (42,17%). Hal ini dikarenakan Dusun Krajan berada di tengah desa dan merupakan pusat pemerintahan desa. Jumlah penduduk Desa Sumberbening ditunjukkan pada dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sumberbening

No .	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase
1.	Sumberwates	533	2016	32,89%
2.	Krajan	714	2318	42,17%
3.	Banjarjo	435	2016	24,94%
Jumlah		1705	5834	100,00%

Sumber: Profil Desa Sumber Bening Tahun 2011

Jumlah penduduk di Dusun Sumberwates sebanyak 1.987 jiwa (23,89%), jumlah penduduk di Dusun Krajan sebanyak 2.548 jiwa (42,17%) dan jumlah penduduk di Dusun Banjarjo sebanyak 1.507 jiwa (24,94%). Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Dusun Sumberbening sebanyak 559 KK, di Dusun Krajan sebanyak 710 KK dan di Dusun Banjarjo sebanyak 436 KK.

Penduduk Desa Sumberbening merupakan masyarakat suku Jawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Nasional (Bahasa Indonesia, digunakan pada waktu tertentu biasanya untuk acara-acara formal) dan Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sumberbening dalam bermasyarakat sangat baik, warga yang lebih muda memberikan penghormatan kepada warga yang lebih tua terutama kepada para sesepuh, tokoh adat dan pemimpin. Kehidupan budaya masyarakat Desa Sumberbening yang merupakan Suku Jawa, sangat menjunjung adat istiadat Jawa atau lokal, penggunaan bahasa tata krama sesuai dengan tingkat masing-masing sangat kental dan melekat pada masyarakatnya. Sebagian besar dari masyarakat terutama orang-orang tua masih teguh memegang tradisi. Tradisi yang masih dilaksanakan setiap tahun adalah Bersih Desa.

Bersih desa diadakan setiap tahun baru pada penanggalan Jawa yaitu pada Bulan Syuro atau Bulan Muharram pada penanggalan Islam. Menurut masyarakat, upacara Bersih Desa dilaksanakan untuk membersihkan desa dan membuang sial (keburukan) sehingga desa aman dari gangguan. Tetapi seiring

perkembangan zaman, sebagian masyarakat menganggap acara ini merupakan acara syukuran atas berlimpahnya hasil alam.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat Desa Sumberbening banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Adapun yang aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu pemuda muslimin (kaum laki-laki) dan muslimat (kaum perempuan). Organisasi-organisasi yang berkembang di Desa Sumberbening juga mempunyai peran yang sangat besar bagi perkembangan dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Hal itu tercermin dari adanya beberapa organisasi yang ada dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Adapun organisasi-organisasi tersebut antara lain:

1. Karang Taruna, kegiatan yang dilakukan meliputi olah raga, diskusi, kependudukan dan Panitia Hari Besar Nasional (PHBN).
2. Remaja Masjid, kegiatan yang dilakukan meliputi Panitia Hari Besar Islam (PHBI), majelis taklim dan diskusi keagamaan.
3. PKK, kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan warga khususnya bagi perempuan, pengajian rutin dan pelatihan
4. Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) ini bernama UPKu “Tanjung Indah” didirikan tanggal 20 Juni 2011 dan dikuatkan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa No. 6 tahun 2011. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Adapun kegiatan utama antara lain: usaha simpan pinjam, ternak kambing

boer dan pelatihan ternak kambing. Sedangkan kegiatan penunjang adalah penguatan kelembagaan. Selain kegiatan di atas UPKu “Tanjung Indah” juga mempunyai kegiatan lain yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat Desa Sumberbening.

5. Pengajian, kegiatan yang dilakukan meliputi tahlilan, yasinan, arisan dan musyawarah.
6. Musyawarah kelompok tani dalam mendapatkan informasi teknologi baru dalam bidang pertanian dan pemecahan masalah yang dihadapi kelompok tani.

Selain adanya organisasi-organisasi di Desa Sumberbening, faktor-faktor lainnya juga berperan penting dalam memajukan kehidupan masyarakat Desa Sumberbening. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Berkembangnya kegiatan industri skala rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat seperti pengolahan tempe, tahu, kerajinan mebel, gula kelapa dan lain sebagainya.
2. Tersedianya tenaga kerja yang banyak terdapat di Desa Sumberbening seperti tukang bangunan, tukang batu, tukang kayu dan lain-lain yang siap untuk membantu upaya pembangunan desa.
3. Tersedianya potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan mayoritas masyarakat Desa Sumberbening merupakan petani, sehingga upaya untuk memajukan pembangunan dibidang pertanian semakin terdukung.

4. Adanya potensi peternakan sapi, kambing, ayam yang terdapat di Desa Sumberbening. Potensi tersebut didukung oleh adanya lahan tanaman hijauan untuk makanan ternak yang banyak terdapat di Desa Sumberbening.
5. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dalam pembangunan desa.
6. Suasana kehidupan yang harmonis dan kondusif di masyarakat.
7. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang besar dan kuat bagi upaya pembangunan Desa Sumberbening nantinya. Selain itu dapat dijadikan suatu langkah alternatif bagi pemecahan masalah dan menggali potensi menuju pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga nantinya menjadi titik awal bagi kelanjutan pembangunan Desa Sumberbening.

Sebagai daerah yang masyarakatnya mengandalkan hasil pertanian, Desa Sumberbening menghasilkan produksi pertanian yang cukup banyak, seperti tanaman palawija (kedelai, kacang tanah, koro bengkok, kacang hijau, jagung dan ubi kayu), padi dan tanaman obat-obatan (laos, kunir dan jahe). Luas tanah pertanian yang ditanami tanaman palawija sebesar 25,5 ha dengan hasil produksi sebesar 6,5 ton/ha. Luas tanah yang ditanami padi sebesar 5 ha dengan hasil produksi sebesar 1,6 ton/ha. Sedangkan luas lahan yang ditanami tanaman obat-obatan sebesar 1,25 ha dengan hasil produksi sebesar 2,5 ton/tahun. Pemasaran hasil pertanian tersebut dijual ke pasar, dijual melalui tengkulak, serta dijual

melalui pengecer. Perkebunan yang ada di Desa Sumberbening adalah perkebunan rakyat dengan jenis tanaman yang ada di perkebunan adalah tebu, kopi, kelapa dan coklat. Luas lahan yang ditanami tebu sebesar 250 ha dengan jumlah produksi sekitar 1 ton/ha. Luas tanaman yang ditanami kopi sebesar 0,25 ha dengan jumlah produksi sebanyak 50 kg/ha. Luas lahan yang ditanami kelapa sebesar 10 ha dengan jumlah produksi 10 kwintal/ha. Sedangkan luas lahan yang ditanami coklat sebesar 1 ha dengan jumlah produksi sekitar 25 kg/ha

Potensi sumberdaya perikanan laut di Kabupaten Malang sangat besar dengan panjang garis pantai sepanjang 77 km menjadikan wilayah selatan Kabupaten Malang kaya akan sumberdaya baik ikan maupun non ikan dengan produksi lautnya mencapai 457.038,18 ton/tahun. Ikan yang menjadi tujuan penangkapan adalah ikan-ikan pelagis seperti ikan tongkol, layang, tuna, dan cakalang. Sebagai desa pesisir, Desa Sumberbening memiliki potensi perikanan yang dipusatkan di Pantai Kondangmerak. Pantai Kondangmerak berjarak 12 km ke arah selatan dari pusat pemerintahan Desa Sumberbening. Sebagai pusat perikanan di Desa Sumberbening, Pantai Kondangmerak tidak punya sarana dan prasarana yang memadai. Hasil penangkapan ikan dari laut langsung dijual pada masyarakat desa. Jenis ikan tangkapan antara lain ikan tongkol, dorang, dan udang. Kondisi perikanan yang ada di Desa Sumberbening saat ini masih dalam skala kecil (perikanan rakyat). Usaha perikanan tangkap skala kecil adalah usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan tanpa menggunakan perahu,

menggunakan perahu tanpa motor, perahu motor temple atau kapal motor temple dibawah 30 GT (*Gross Tonage*).

Penduduk desa yang bermukim di Pantai Kondangmerak sebanyak 23 KK. Sebagian besar penduduk tersebut merupakan pendatang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Armada penangkapan ikan yang digunakan adalah Perahu Jukung dengan jumlah armada kurang lebih 15 buah dengan mesin 4-13 PK. Alat tangkap yang digunakan berupa Prawe, *Gill Net* dan Ancet. Disamping itu ada beberapa nelayan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, yaitu dengan cara memasang jaring dasar pada kondisi pantai pada saat surut yang dikenal dengan “karang-karang”. Daerah penangkapan berada sekitar 6 mil dari pantai.

Kegiatan penangkapan dilakukan secara harian, yaitu berangkat pada jam 03.00 WIB dan mendarat sekitar jam 12.00 WIB. Selain kegiatan perikanan yang menggunakan perahu, ada juga masyarakat yang kegiatan penangkapan ikannya menggunakan media pancing. Ikan hasil tangkapan yang paling dominan adalah ikan tongkol yang mampu mencapai produksi sekitar 8 ton/tahun. Selain itu hasil tangkapan lain yaitu cumi-cumi sebesar 1 ton/tahun. Pemasaran hasil tangkapan ini dijual ke pasar, dijual melalui tengkulak, serta dijual melalui pengecer.

Desa Sumberbening juga memiliki potensi hutan yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan luas lahan hutan mencapai 1.213 ha dengan rincian hutan lindung sebesar 679 ha, hutan rakyat sebesar 482 ha dan hutan produksi sebesar 52 ha. Kawasan hutan ini sebagian besar terdapat di bagian selatan Desa

Sumberbening terutama pada jalan-jalan menuju ke arah pantai Kondangmerak. Selain itu di Pantai Kondangmerak juga terdapat populasi hutan *mangrove*. Namun sayang kondisi hutan *mangrove* yang ada di sekitar Pantai Kondangmerak ini kurang terawat sehingga banyak yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan segera.

Pantai Kondangmerak adalah pantai eksotis yang merupakan bagian dari jajaran pantai Laut Selatan Jawa. Pantai Kondangmerak terletak dibagian paling selatan Desa Sumberbening. Walaupun tidak seterkenal Pantai Balekambang atau Pantai Ngliyep, Pantai Kondangmerak tidak kalah indah pemandangannya dan masih sangat alami. Pantai yang luas dengan pasir putih bersih, ombak yang bersahabat, pesisir pantai yang rindang, serta batu karang yang besar dan kokoh akan ditemukan di Pantai Kondangmerak. Pantai Kondangmerak berjarak 12 km ke arah selatan dari pusat pemerintahan Desa Sumberbening dan 65 km dari Kota Malang. Dari kota Malang memerlukan waktu kurang lebih 3 jam untuk sampai di Pantai Kondangmerak. Seperti halnya pantai selatan yang lain, ombak di Pantai Kondangmerak cukup ganas dengan gelombang besar dan tiupan angin yang cukup kencang.

Tepian Pantai Kondangmerak banyak ditumbuhi berbagai macam jenis alga. Sedikit ke tengah, terdapat pulau-pulau kecil yang ditumbuhi semak belukar. Pantai Kondangmerak juga dapat digunakan untuk wisata perkemahan bagi para pencinta alam. Di sini kita bisa mendirikan tenda dan bermalam dengan menyalakan api unggun sambil memandang pantai yang masih alami. Dengan

potensi yang dimiliki, Pantai Kondangmerak berpotensi menjadi kawasan wisata skala nasional, karna pada saat ini Pantai Kondangmerak merupakan pantai wisata dengan skala lokal. Hal ini didukung dengan adanya proyek Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang sampai pada saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Di harapkan dengan rampungnya pengerjaan JLS ini, akses masyarakat atau wisatawan yang akan datang ke Pantai Kondangmerak jauh lebih mudah dijangkau mengingat akses ke Pantai Kondangmerak sekarang ini sangat sulit karena kondisi jalan yang rusak sampai rusak berat.

Selain itu, Desa Sumberbening juga memiliki potensi pariwisata buatan seperti Wisata Kampung Nelayan. Kondisi perkampungan di kondangmerak sudah sangat baik. Sebagian besar kontruksi bangunan merupakan bangunan dengan konstruksi semi permanen. Sarana dan prasaran di kampung ini antara lain terdapat sebuah mushola, wisma atau penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam, terdapat juga rumah singgah bagi nelayan, tempat MCK, dan warung-warung yang menjual berbagai makanan dan ikan segar. Selain itu di kampung nelayan juga tersedia pos informasi nelayan “Karya Mina”. Namun, ada beberapa masalah lain yang dijumpai di Wisata Kampung Nelayan adalah kekurangan sanitasi dan kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat memperoleh dari sumber yang di tampung dalam tandon. Jaringan listrik juga belum masuk di wilayah pantai Kondangmerak, masyarakat hanya menggunakan genset sebagai sumber energi listrik (Profil Desa Sumber Bening tahun 2011).

B. Penyajian Data

1. Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

a. Aktor yang Terlibat dalam Konservasi Lingkungan

1) Akademisi / Lembaga Swadaya Masyarakat

Pihak akademis atau universitas merupakan salah satu *stakeholder* yang beraktivitas di Kondang Merak. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sarbini Kepala KRPB Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, bahwa:

“....dulu itu UM, UB pernah melakukan penanaman mangrove di Kondang Merak. Setelah UM, dies nataliesnya Widayagama. Terus tempo hari itu dari marinir penanaman terumbu karang konservasi laut. Marinir pun juga punya kewajiban, pelatihannya juga disini” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Pertama, LSM yang terlibat adalah Sahabat Alam yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan. LSM Sahabat Alam merupakan tonggak adanya konservasi di pesisir Kondang Merak. Mas Heru bidang penelitian dan pengembangan LSM Sahabat Alam, menjelaskan bahwa:

“NGO yang pertama kita dulu, kita dulu belum NGO masih komunitas sahabat alam terus kegiatan lebih sering disitu kita butuh semacam apa ya kaya administrasi jadi kita resmikan jadi LKPM (Lembaga Konservasi Pemberdayaan Masyarakat). Kegiatannya fokus untuk upaya penyelamatan kawasan konservasi” (tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Selain LSM Sahabat Alam, terdapat pula lembaga yang beraktivitas di Hutan Lindung pesisir Kabupaten Malang yaitu *Aspinal Foundation*. *Aspinal*

Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang konservasi lingkungan khususnya di hutan lindung pesisir Kabupaten Malang. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur menjelaskan bahwa “Jadi kita *Aspinal Foundation*, kalo *Javan Langur Center* itu kan fasilitas tempatnya ini atau tempat rehabilitasi lutung jawa. Jadi *Aspinal Foundation* sendiri yang punya apa namanya program di Indonesia tentang konservasi satwa liar” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

2) Swasta

Swasta di Kondang Merak merupakan aktivitas perdagangan dan pengelolaan dari inisiatif masyarakat atau dengan kata lain usaha kecil dan menengah. Seperti warung makan/perdagangan, persewaan alat snorkeling/jasa, dan pembukaan tempat wisata. Semua ini dilakukan oleh LMDH Sumber bening dan masyarakat kampung nelayan Kondang Merak.

Selain masyarakat, Perum Perhutani dapat juga di klasifikasikan sebagai swasta karena prinsip dasar dari BUMN atau perusahaan umum adalah mendapatkan keuntungan untuk pemasukan kas negara. Hal ini tertera dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 36 dan PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara pasal 11 bahwa, Maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan

prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dari hal ini terdapat kata usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan hutan demi kepentingan negara.

3) Masyarakat

Masyarakat di kawasan Kondang Merak dibagi menjadi dua yaitu masyarakat desa dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan masyarakat pesisir kampung nelayan dengan kelompok nelayan karya mina. Menurut Pak Sarbini Kepala KRPH sumbermanjing kulon Perum Perhutani menjelaskan bahwa: “Selain itu bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), untuk desa Sumber bening batasnya jalan ke timur itu kita kerjasama dengan LMDH Sumber bening namanya LMDH Wonoraharjo” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

LMDH dikerjasamakan oleh Perum Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Fungsinya agar masyarakat sekitar hutan dapat memanfaatkan dan menikmati hasil hutan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Iwan Kepala Bagian PHBM Perum Perhutani bahwa:

“Dalam pelaksanaan itu (PHBM) Perhutani bekerjasama bersama masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam bentuk lembaga. Jadi istilahnya ada lembaga masyarakat desa hutan. Khusus di kabupaten namanya LKPDH (Lembaga Kelompok Pengelola Desa Hutan). Itu ada perjanjian kerjasamanya antara LKDPH dengan Perhutani. Secara global kerjasama pengelolaan kawasan hutan” (Tanggal 12 Februari 2016 pukul 10.00 WIB).

Selain masyarakat desa dengan LMDH Wonoraharjo, terdapat juga kampung nelayan Kondang Merak yang berbatasan langsung dengan hutan dan laut. Di kampung nelayan terdapat kelompok nelayan karya mina yang mengkoordinir nelayan Kondang Merak. Budi Rianto S.Pi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, menyatakan bahwa: “di setiap masyarakat kita ada POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), jadi secara legal kita terbitkan SK dari kepala dinas tapi inisiasinya dari masyarakat. Untuk di Kondang Merak kurang aktif, yang aktif itu kelompok nelayannya” (Tanggal 5 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

4) Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden No.72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Perum perhutani merupakan pengelola hutan lindung. Dalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dari hal tersebut menjelaskan bahwa Perum Perhutani merupakan pengelola hutan lindung dan produksi di kawasan Kondang Merak.

Lebih lanjut, Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Malang selatan dijelaskan oleh Pak Sulis Divisi Wisata KPH Malang Perum

Perhutani “pada prinsipnya pengamanan dan pengelolaan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi, semua dilimpahkan ke Perum Perhutani untuk wilayah jawa dan Madura” (Tanggal 27 September 2015 pukul 15.53 WIB). Selain itu, dijelaskan oleh pak Sarbini Kepala KRPB Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani “saya membawahi 6 anggota dengan luas wilayah kerjanya 4000 ha. Wilayah saya paling timur pantai wonogoro dan paling barat pantai bantol, banjarajo. Kalau Kondang Merak dari pembukaan awal memang Perum Perhutani yang mengelola” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB). Hal tersebut menjelaskan bahwa hutan produksi ataupun hutan lindung di pesisir Kabupaten Malang, merupakan tanggung jawab Perum Perhutani sebagai pihak yang mengelola dan berkepentingan disana, seperti pembuatan regulasi dan kebijakan.

Selain perum perhutani terdapat Dinas kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan pesisir malang selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Dari peraturan ini menjelaskan keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan kawasan Kondang Merak di wilayah laut.

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi lingkungan di Kondang Merak yaitu ada Perum Perhutani,

Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, Kelompok Nelayan Karya Mina, LMDH Sumber Bening dan masyarakat Desa Sumber Bening. Berikut tabel keterlibatan *stakeholder* dalam konservasi lingkungan di Kondang Merak yaitu:

Tabel 3. Aktor yang Terlibat dalam Konservasi Lingkungan

No	Aktor	Pelaksana
1.	Akademisi	LSM Sahabat Alam; <i>Aspinal Foundation</i> ; Peneliti dan Universitas
2.	Swasta	Masyarakat Kampung Nelayan dan LMDH Sumber Bening
3.	Masyarakat	Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber Bening, Kelompok Nelayan Karya Mina, Masyarakat Desa Sumber Bening
4	Pemerintah	Dinas Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

b. Aktivitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan

1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Alam

Sahabat alam (SALAM) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan konservasi yang dilakukan meliputi perlindungan, pengawetan dan peredaran. Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM SALAM menjelaskan bahwa,

“Sampai saat ini kita masih mengumpulkan database-database populasi-populasi untuk kebijakan isu-isu politis, kawasan, *soft campaign*. Konservasi itu 3 pilar; perlindungan, pengawetan sama peredaran. Kalo perlindungan jelas dijaga kawasannya ada *protection-*

lah dari pemerintah lokal, masyarakat sendiri; kalo pengawetan itu kaya *soft campaign* kita sosialisasi kita riset mengumpulkan database satwa, ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi maksudnya edukasi itu masuk pengawetan, pengumpulan database ada *event-event* itu pengawetan; pemanfaatan itu masuk peredaran jadi kaya ngambil-ngambil hewan ada kuotanyakan, ngambil hewan laut tetapi yang mengontrol seharusnya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Nah karna kita tidak bisa mengandalkan dari instansi tersebut kita berusaha untuk mengajak masyarakat untuk konservasi” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan LSM SALAM adalah perlindungan yaitu dengan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk menjaga dan mengawasi hutan, pengawetan yaitu dengan melakukan penelitian-penelitian/riset pengumpulan database potensi hutan yang dapat dikembangkan, peredaran yaitu mengambil satwa untuk diteliti ataupun di konsumsi oleh masyarakat dengan batasan keberlanjutan ekosistem. Hal-hal tersebut yang dilakukan oleh LSM Sahabat Alam untuk kelestarian alam.

Dalam kegiatan konservasi hutan dan laut di Kondang Merak, LSM Sahabat Alam melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Esensinya adalah nantinya masyarakat sendiri yang akan melakukan konservasi karena berdekatan dan berinteraksi langsung dengan alam selain itu masyarakat akan mendapat nilai ekonomisnya ketika hutan dan lautnya lestari serta memanfaatkan masyarakat untuk menjaga hutan dan laut. Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam menerangkan bahwa:

“Kalo mas andi *pioneer* konservasi di kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Karena konservasi tidak bisa berjalan tanpa

pemberdayaan masyarakat, kita *empowering people* pokoknya kita mengajak masyarakat lokal-lah untuk kegiatan konservasi. Kemudian kegiatan konservasi itu sangat efektif kalo melibatkan masyarakat lokal entah anak kecil, masyarakat lokal jangan berjalan sendiri. Kalo berjalan sendiri ya ilmu yang di dapat yang ikut kegiatan. Kenapa harus mengajak masyarakat lokal, pertama penasaran ada nilai ekonomisnya gak sih. Misal anak kecil bisa cerita ternyata kawasanku kaya gini bidang intelektualnya juga bisa, sama ekoturism aku punya *skill* masyarakat harus diajak untuk menjadi guide lokal membantu ekonomi mereka. Ketika kita doang masyarakat gak terlibat akan cemburu, taunya cuma cari duit masyarakat lokal gak dapet apa-apa”(Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

LSM Sahabat Alam mempunyai pandangan bahwa kegiatan konservasi tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat. Aktivitas awal yang dilakukan yaitu pendekatan langsung ke masyarakat baik itu ke masyarakat umum ataupun orang tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam, bahwa:

“Pendekatan ke masyarakat kita berbaur. Jadi etnografi itu fungsinya ada dua ada pendekatan langsung ke masyarakat dan *key informan*. Kita berusaha untuk pertama mencari apa yang mereka butuhkan. Konservasi elang itu gak efektif karna gak ada nilai ekonominya, jadi kita berusaha untuk membantu dengan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kita fokus membantu ekonomi mereka. Secara alternatif penghasilan mereka. Nah trus kebetulan itu mas Bagyo yang dia itu adalah pelaku perusak alam nomor satu se-malang selatan. Dia penggeraknya, pentolannya, *top leader*. Kita pendekatan kita berusaha menjadi bagian dari keluarga mereka pendek kata aku tau kebaikanmu aku tau keburukkanmu dan aku tahu utangmu kamu tau utangku seperti itu loh.” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Cara yang dilakukan LSM SALAM dalam konservasi dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan etnografi. Artinya membaur dengan masyarakat seperti apa yang dikerjakan, aktivitas sehari-hari diikuti

atau bahkan tinggal disana beberapa waktu dan berkala. Kegiatan yang dilakukan diawal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian atau matapencarian. Kerusakan alam khususnya di laut disebabkan oleh masyarakat sendiri, seperti mem-bom dan meracuni ikan yang telah menjadi matapencarian atau kebiasaan masyarakat. Saat akan mengganti kebiasaan mereka yang merusak alam, maka harus ada alternatif baru yang diberikan, tidak langsung melarang berburu atau mengebom ikan. Karena ketika dilarang tapi tidak memberikan solusi atau alternatif lain, maka orang yang datang melarang akan dianggap ikut campur masalah mereka.

Selain itu juga mencari orang yang paling berpengaruh untuk menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan perubahan dan kegiatan konservasi. Orang yang dijadikan kunci informasi atau *pioneer* itu merupakan perusak alam yang keseharian beraktivitas mencari ikan dengan mem-bom dan meracuni ikan di laut. Dengan merubah kebiasaan orang yang berpengaruh di masyarakat dapat membuat masyarakat lainnya segan dan mengikuti pola hidupnya.

Perubahan aktivitas dan pandangan masyarakat lokal tentang kehidupan sehari-hari dan konservasi tidak lepas dari peran LSM Sahabat Alam. Selain pendekatan dengan berbaur kepada masyarakat, LSM Sahabat Alam juga memberikan pengetahuan tentang klasifikasi hutan, satwa endemik dan satwa di lindungi, diversifikasi usaha, bahayanya pengambilan ikan yang merusak ekosistem, dan lain sebagainya. Hal tersebut dinyatakan

oleh Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam, bahwa:

“Kita kasih gambaran dulu, kan selama ini kita gak tau dulu masyarakatkan gak tau ini masuk kawasan apa toh hutan lindung, karna apa pendidikannya rendah rata-rata sd, smp tuh jarang sekali, namanya hutan lindung itu gak tau, hewan yang dilindungi gak tau pokoknya ada di hutan bisa diambil oke, untuk apa untuk hobi, atau untuk menambah penghasilan secara ekonomi untuk hiduplah” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Tujuan utama dari LSM Sahabat Alam adalah membuat alam lestari, caranya dengan konservasi. Konservasi hutan dan laut yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang menggunakan potensi hutan dan laut sebagai matapencarian dan hidup. Bisa dengan cara yang merusak alam ataupun tidak. Ketika cara yang digunakan untuk mengambil potensi tersebut dengan cara yang tidak konservatif, maka cara itu harus dirubah dengan yang lebih baik dan bijaksana. Merubah pandangan dan perilaku yang telah dijalankan sejak dulu sangat susah karena berbenturan dengan kebiasaan hidup mereka.



Gambar 9. Penanaman Terumbu Karang dan Mangrove

Alternatif pekerjaan yang diberikan adalah membuat rumpon atau tempat berpijak ikan sementara. Dengan adanya alternatif pekerjaan ini otomatis masyarakat mengurangi kerusakan alam karena alternatif pekerjaan ini telah menjadi mata pencarian utama mereka. Selain itu kerusakan alam khususnya laut berkurang, karena alternatif pekerjaan yang diberikan ramah lingkungan dan dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Tidak hanya itu, alternatif lain yang diberikan adalah membuat tempat wisata kuliner. Dahulu ikan yang ditangkap langsung dibawa ke pengepul ikan tapi sekarang sebagian ikan tersebut diolah untuk dijadikan hidangan. Pengolahan hasil laut tersebut menjadikan penghasilan tambahan bagi masyarakat disana. Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam menyatakan bahwa:

“Kemudian kita berusaha menghasilkan tempat wisata kuliner, kalo dulu awalnya langsung dijual ke pengepul ikannya, pengelolaannya tidak terlalu ramelah seperti sekarang, kalo sekarang sudah banyak dan terkenal, kita mempromosikan itu. membantu perekonomian mereka. 75% tamu itu kita yang mendatangkan dulu, tamu-tamu ekoturism, tamu-tamu yang tidak seperti biasanya, tamu yang ngamatin alam, satwa, terus nanam terumbu karang, nanam mangrove jadi tamu-tamu yang cinta lingkungan” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Setelah alternatif pekerjaan itu dilakukan, selanjutnya adalah mendatangkan tamu untuk berkunjung. Muara dari kegiatan yang dilakukan adalah ekoturism. Karena ekoturism mendatangkan tamu yang berpandangan tentang lingkungan alam sehingga kelestarian keanekaragaman hayati tetap

terjaga. Selain itu, ekoturism juga menambah penghasilan masyarakat disana. Jadi ekoturism merupakan alternatif pekerjaan pula yang diberikan.

Ekoturism dilakukan dengan mengenalkan kearifan lokal masyarakat pesisir wisata Kondang Merak, seperti menanam terumbu karang, menanam mangrove, mengamati satwa laut, *snorkeling*, *diving*, *jungle tracking* untuk melihat satwa hutan, mengamati dan ikut aktivitas masyarakat pesisir. Itu semua merupakan wisata yang ditawarkan nantinya. Pasti wisata tersebut tetap menjaga kelestarian alam dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam mengungkapkan bahwa:

“Kemudian kita mempromosikan *local wisdom* kearifan lokal. Di Kondang Merak sudah mulai ada kegiatan seperti itu contohnya meliputi rehabilitasi terumbu karang, melindungi hutan dari perburuan itu sebagai kearifan lokal karna sudah muncul kesadaran untuk menjaga dan melestarikan kawasannya. Kita pelan-pelan ngasih edukasi, ngajak kegiatan ekowisata itu alternatif. Inginnya jadi ekoturism. Jadi kita edukasi dulu dan konservasi. Jadi misalkan ekoturism itu kan wisata berbasis lingkungan jadi wisata yang tidak merusak lingkungan itu ekoturism” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Alternatif-alternatif pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan disana. Mulai dari perubahan cara mencari ikan dari mengebom menjadi membuat rumpon, membuat tempat makan agar sebagian hasil laut yang ditangkap bisa diolah kembali untuk menambah pendapatan serta mempromosikan ekoturism dengan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan kampung nelayan Kondang Merak. Sebagian

alternatif pekerjaan yang diberikan sekarang bukan lagi sebagai alternatif tapi telah menjadi mata pencarian utama masyarakat lokal.

Matapencarian merupakan kebutuhan utama untuk hidup karena menyangkut perekonomian masyarakat. Ketika alternatif pekerjaan yang diberikan telah menjadi matapencarian atau pekerjaan utama, maka hal tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka. Otomatis masyarakat telah menjalankan kaidah-kaidah konservasi di kehidupan mereka. Kalau ada yang mengganggu ataupun merusak alam otomatis langsung dilarang oleh masyarakat karena itu menyangkut pekerjaan utama mereka. Secara langsung dan tidak langsung masyarakat telah berperan untuk menjaga dan melestarikan alam.

Hal tersebut yang ingin dilakukan LSM Sahabat Alam dalam pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir. Dengan memulai dari hal yang berhubungan dengan perekonomian hingga menjaga kelestarian alam. Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam mengungkapkan bahwa, “Ketika alternatif yang diberikan ini sudah menjadi bagian dari mata pencaharian mereka, akhirnya secara tidak langsung sudah timbul rasa untuk menjaga kawasan” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Untuk menjadikan kawasan konservasi dan kelestarian hutan dan laut serta keanekaragaman hayati didalamnya, LSM Sahabat Alam melakukan penelitian di berbagai bidang baik di laut maupun hutan lindung. Berbagai

macam penelitian telah dilakukan mulai berbagai jenis burung, jejak macan, ikan laut dan satwa lainnya. Kebanyakan satwa-satwa yang diteliti adalah satwa endemik.

Selain meneliti sendiri, LSM Sahabat Alam melalui Mas Heru juga mengajak peneliti-peneliti lain untuk turut serta dalam meneliti kawasan tersebut. Setiap ada potensi baru baik berupa satwa, tanaman dan bentukan alam baru, peneliti-peneliti diajak untuk meneliti. Serupa seperti yang dijelaskan Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam bahwa “Aku uda promosi kepada peneliti macem-macem, peneliti macan, peneliti kukang, peneliti ini ini ini, harapan mereka mendukung juga kegiatanku, karna visi kita sama cuma bedanya beda objek ada yang di elang, macan dan lain-lain.” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Selain penelitian, LSM Sahabat Alam juga melakukan *soft campaign* mengenai kawasan Kondang Merak. Maksudnya *soft campaign* adalah mempublikasi wilayah hutan lindung dan laut Kondang Merak akan potensi dan keanekaragaman hayatinya. Hal ini bertujuan untuk membangun isu ataupun pandangan mengenai wilayah tersebut agar dapat dijaga dan dilestarikan serta dijadikan kawasan konservasi.

Soft campaign dilakukan di radio maupun televisi lokal dan nasional. Media publikasi tersebut banyak meliput tentang keanekaragaman hayati dan potensi alam. Agar isu dan permasalahan konservasi ini tidak hanya menjadi

permasalahan atau isu lokal tapi juga nasional. Dengan hasil-hasil penelitian ilmiah untuk mengembangkan isu sesuai fakta dan data, maka pemerintah yang bertanggungjawab akan memberikan kebijakan konservasi mengenai kawasan tersebut. Seperti dilansir oleh Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam bahwa:

“Soft campaign untuk mendukung isu kawasan konservasi, ketika kita ngomong di lokal yang denger itu-itu aja yang dukung sedikit, ketika soft campaign televisi atau koran, banyak orang yang bener-bener bicara tentang Kondang Merak. Pro kontranya yaa tahu misalnya kaya musuh dari kita sisi lainnyalah ooh orang itu, tapi kita banyak yang dukung. Ada TVRI nasional, Jtv, Metro tv, R tv, aku nolak tiga kali Trans 7 gak cocok” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Hasil yang telah dilakukan oleh LSM Sahabat Alam terkait konservasi lingkungan sudah mulai terlihat dari 2010 hingga 2015. Masyarakat sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya menjaga hutan dan lautnya. Peran yang dilakukan LSM Sahabat Alam adalah merubah pandangan, aktivitas/kegiatan, kebiasaan, pola hidup masyarakat pesisir Kondang Merak yang tadinya perusak alam sekarang telah menjadi pelindung dan penjaga alam dan lingkungan.



Gambar 11. Aktivitas Peneliti: Pengamatan dan Wawancara dengan Media

b. Aspinal Foundation

Aspinal Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan satwa liar, salah satunya adalah konservasi satwa-satwa. *Aspinal Foundation* mempunyai kebun binatang yang bertempat di Inggris. Salah satu satwanya yaitu lutung jawa. Karena lutung jawa termasuk satwa yang dilindungi dan *Aspinal Foundation* sendiri kelebihan populasi satwa ini, maka ada pengembalian satwa ke habitat aslinya. Hal ini dilakukan dengan program *java primate project* dari *aspinal foundation*. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur menjelaskan, bahwa:

“Kalo *Aspinal Foundation* sendiri dari Inggris nih, basis lembaganya ada disana. Jadi kaya mereka punya kebun binatang, mereka juga punya koleksi satwa-satwa liar yang terancam punah terutama yang aslinya dari Indonesia. Berkembang biak, mereka berhasil mengembangbiakkan dan jumlahnya sudah *over*, akhirnya mereka berpikir kalo satwa itu harus kembali ke habitat aslinya. Karena beberapa satwa ini habitatnya di Indonesia makanya dikembalikan ke Indonesia. Melalui program repatriasi pengembalian satwa kedaerah asalnya. Itu istilah di konservasi. Nah *java primate project* ini

dipimpin oleh seorang direktur” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Karena *Aspinal Foundation* memiliki satwa endemik Indonesia khususnya Jawa Timur, maka kegiatannya di wilayah Jawa. Selain itu juga izin dan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia yaitu Kementrian Kehutanan dan Perum Perhutani sebagai pengelola hutan lindung di Jawa agar dapat menempatkan satwa ke habitat aslinya.

Inti kegiatan dari *Aspinal Foundation* di Indonesia adalah pengembalian satwa ke habitat aslinya. Dari hal tersebut maka *Aspinal Foundation* bekerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia agar mendapatkan izin dan tempat untuk pelepasliaran satwa tersebut. *Aspinal Foundation* sendiri membangun tempat atau basecamp di Jawa Timur tepatnya di Coban Talun, Kota Batu. Coban Talun menjadi tempat pelepasliaran pertama di Jawa Timur. Setelah Coban Talun tempat kedua adalah hutan lindung Kondang Merak. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur mengungkapkan, bahwa:

“Kalo di Jawa Timur juga merehabilitasi monyet pemakan daun lutung jawa. Jadi bentuk kerjasama kita Perum Perhutani selain memfasilitasi tempat untuk rehabilitasinya ini sekolahnya ini *javan langur center* ini, juga memfasilitasi tempat-tempat untuk dijadikan tempat pelepasliaran, mengembalikan populasi di alam” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Di Kondang Merak, *Aspinal Foundation* masuk pada tahun 2014. Aktivitas yang dilakukan baru 2 tahun. Tahun pertama dan tahun kedua kegiatan yang dilakukan baru sebatas pelepasliaran dan monitoring satwa di

hutan. Tujuannya adalah untuk pemulihan populasi yang secara tidak langsung juga menjaga hutan. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur menjelaskan, bahwa:

“Di Kondang Merak kita fokusnya ke pelepasliaran, pemulihan populasi, tujuannya memang selain pemulihan populasi itu kan memang kita juga apa namanya secara gak langsung menjaga habitatnya juga nah bagaimana kita bisa menjaga lutung jawa kalo membiarkan kawasan hutannya di rusak kan gitu” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Untuk menjaga dan melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, *Aspinal Foundation* melakukan koordinasi terhadap Perum Perhutani selaku pengelola hutan. Koordinasi sesuai tertera di MOU atau perjanjian antara Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation*. Ketika ada hal-hal yang mengganggu dan merusak hutan akan meminta pertanggungjawaban kepada Perum Perhutani. Bukan berarti *Aspinal Foundation* hanya peduli dengan lutung dengan melepas ke habitat aslinya, tapi juga peduli terhadap keseimbangan ekosistem hutan dan sekitarnya pula. Karena disana ada satwa lain yang bergantung atau membutuhkan satu sama lain dengan kata lain rantai makanan.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga hutan dilakukan oleh *Aspinal Foundation*. Cara yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan warga lokal dalam memonitoring lutung dan hutan di Kondang Merak. Pelibatan masyarakat ini bersifat relawan dan ada biaya untuk pengerjaannya. Pak Iwan meyakini masyarakat sekitar hutan tidak bisa dipisahkan dalam

pengelolaan hutan. Selain mereka dekat dan tinggal bersebelahan dengan hutan tapi masyarakat yang memanfaatkan potensi hutan atau bergantung pada hutan mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur menjelaskan, bahwa:

“Karena bagaimanapun antara masyarakat sama hutan kan gak bisa dipisahkan, apalagi masyarakat yang berada dan hidup dan menggantungkan hidupnya disekitar hutan. Otomatis punya potensi untuk merusak hutan dan sumber daya lainnya yang ada didalam hutan. Nah kalo itu gak kita edukasi, otomatis hutannya akan rusak nanti. Buat apa kita melepas kalo seperti itu. Nah makanya, kita libatkan mereka memang perubahan *mindset* tidak bisa secara frontal seperti kita membangun posko monitoring disana itu, selain kita bisa intensif dan dekat dengan masyarakat disana kita juga bisa inilah merekrut relawan-relawan yang kita maksimalkan dari orang-orang sana orang asli sana, dari sekian banyak adalah yang kecantol mesti dikit namanya idealisme. Nah itu yang kita rangkul kita memanfaatkan untuk sama-sama punya rasa memiliki, kalo bukan mereka siapa lagi yang menjaga kawasan hutan mereka kan gitu. Itu hutannya negara bukan hutannya masyarakat sana cuman, bagaimanapun masyarakat sangat tergantung dengan hutan itu” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Selain itu, *Aspinal Foundation* juga melakukan sosialisasi dengan pengelola setempat seperti Perum Perhutani di bagian teknisnya dilapangan, LMDH selaku perpanjangan tangan dari Perum Perhutani agar menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Tidak hanya itu, *Aspinal Foundation* juga melakukan pemasangan papan-papan nama dengan konten larangan-larangan atau himbauan kepada pengunjung wisata maupun masyarakat. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur menjelaskan, bahwa:

“Proses sosialisasi juga akan berlangsung cuman memang kita gak bisa intensif karna memang personilnya terbatas. Orang yang cuman sedikit dibagi-bagilah coban talun dan Kondang Merak kadang di *rolling*. Sosialisasi secara tidak langsung dengan pemasangan papan-papan himbauan, larangan, itu sudah kita upayakan cuman memang dibandingkan luasan wilayahnya masih kurang” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).



Gambar 12. Monitoring Satwadi Hutan Lindung

2) Swasta

Di Kondang Merak, swasta yang bergerak dari masyarakat sendiri seperti warung makan/perdagangan, persewaan alat snorkeling/jasa, dan pembukaan tempat wisata. Semuanya ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri yang ingin mengembangkan kewirausahaannya. Oleh karena itu usaha yang dilakukan masyarakat adalah usaha kecil dan menengah.

Seperti yang diungkapkan oleh Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan karya mina menyampaikan bahwa:

“Kuliner pertamanya karena Pak Edi. Daya tarik sini salah satunya kuliner disini. Trus kalo dapet banyak gitu kita bikin kerupuk ikan dan nugget dari ikan. Cuma masalahnya kita udah bikin pasarnya yang susah. Itu pernah kita *share* ke Dinas Perikanan tapi cuma iya iya aja sampe sekarang gak ada. *Expired*-nya yang gatau kapannya. Trus ikan asin kering jambal roti buat oleh-oleh. Tapi musiman ikannya jadi susah” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Hal ini memperjelas bahwa inisiatif masyarakat sendiri yang ingin berwirausaha dengan memanfaatkan potensi lingkungan alam. Warung makan kuliner hasil laut merupakan inisiatif masyarakat yang didampingi oleh Pak Edi selaku tokoh masyarakat kampung nelayan. Selain diolah menjadi kuliner warung makan, hasil laut juga pernah diolah menjadi makanan ringan untuk oleh-oleh seperti kerupuk ikan, nugget ikan dan ikan asin kering jambal roti. Tetapi produksinya tidak bertahan lama karena faktor minimnya konsumen dan produk yang belum mendapatkan legalitas hukum.

Usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan adalah wisata laut. Wisata laut yang menjadi potensi dan daya tarik adalah terumbu karang, lumba-lumba, dan satwa laut. Wisata laut ini bisa dicapai dengan *snorkeling*, *diving* dan sewa perahu di kampung nelayan Kondang Merak. Masyarakat telah mempersiapkan paket wisata yang akan ditawarkan kepada

wisatawan. Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan karya mina menyampaikan bahwa:

“Sekarang terumbu karangnya udah bagus kita muter otak aja apa yang bisa dijual kaya kita kepikiran nyewakan *snorkel*. Cuma wisatawan aja belum tertata. Sebenarnya paket-paket wisata kita uda jelas sih tapi tamunya aja yang gaka ada. Liat lumba-lumba 260/orang satu kapal minimal 4 dapat makan guide dokumentasi. Kalo diving 850/orang” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Selain masyarakat kampung nelayan, masyarakat desa yang dikelompokkan melalui LMDH menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani untuk mengelola wisata pantai. Menurut Mas Sutrisno Ketua LMDH Desa Sumber Bening, bahwa: “LMDH kerjasama terkait wisata. Kerjasama dengan Perhutani lembaga dapet 30%, Perhutani 60%, ke muspika (koramil, polsek, desa) 10%” (Tanggal 2 Januari 2016 pukul 16.30 WIB). Kerjasama yang dilakukan terkait wisata yaitu Pasir Panjang. Nantinya Kondang Merak juga akan dikerjasamakan dengan LMDH menunggu kesiapan dari keorganisasi LMDH. Untuk saat ini pantai Kondang Merak, masih dilakukan murni oleh Perum Perhutani.

Perum Perhutani selain menerapkan peran sebagai pemerintah, juga menerapkan peran sebagai swasta. Perhutani juga mendapatkan keuntungan dari pembukaan tempat wisata Kondang Merak. Hal ini dikarenakan ideologi Perum Perhutani yang menonjolkan fungsi sebagai pengatur pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat diambil keuntungannya. Dari hutan produksi Perum Perhutani mengelola penebangan kayu jati, sedangkan

di hutan lindung tidak boleh dikelola. Oleh karena itu, Perum Perhutani mengelola wisata pantai berbasis wisata alam yang mendapatkan keuntungan untuk negara.

Ini menandakan semua usaha atau industri yang dilakukan di Kondang Merak merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Campur tangan swasta luar belum ada dalam pengembangan kawasan Kondang Merak. Semua berbasis pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri. Selain itu, Perum Perhutani sebagai perusahaan milik negara juga mengelola wisata pantai Kondang Merak yang bekerjasama dengan masyarakat untuk pemasukan kas negara. Hal ini sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, bahwa ada usaha dalam pengelolaan hutan yang menghasilkan keuntungan untuk negara.



Gambar 13. Kondisi Kampung Nelayan Kondang Merak

3) Masyarakat

Masyarakat di wilayah penelitian dibagi menjadi dua; pertama, masyarakat kampung nelayan Kondang Merak berada di pesisir Kabupaten Malang dengan berbatasan langsung dengan hutan lindung dan laut; kedua, masyarakat Desa Sumber Bening berbatasan dengan hutan lindung.

a) Kelompok Nelayan Karya Mina

Masyarakat kampung nelayan memiliki kelompok nelayan sendiri yang fungsinya untuk mengkoordinir nelayan-nelayan di Kondang Merak. Hal yang rutin dilakukan setiap tahun adalah membuat proposal mengenai kebutuhan masyarakat kampung nelayan yang nantinya diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang guna mendapatkan bantuan. Seperti yang dikatakan Mas Sriyadi Ketua Kelompok Nelayan, bahwa: “Kelompok Nelayan Karya Mina sudah ada sejak dulu cuma meneruskan aja. Kita bikin proposal untuk menulis kebutuhan disini dan memberikan ke dinas” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Selain itu aktivitas kelompok nelayan membuat media terumbu karang di laut, membuat rambu-rambu papan larangan, dan juga berlatih menerima tamu sebagai bagian dari kegiatan ekowisata. Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan menyampaikan bahwa: “....bantu-bantu medianya terumbu karang ini, buat tempat sampah, rambu-rambu. Sebenarnya secara gak langsung mereka sudah berlatih, misalnya ikut pelatihan *guide* gitu nelayannya malu. Jadi ya

sehari-hari gini dari ngobrol sama tamu diajak, secara gak langsung dia juga belajar” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Masyarakat yang perempuan juga melakukan aktivitas yaitu membuat olahan hasil laut seperti warung makan ataupun makanan-makanan ringan kemasan. Seperti yang dikatakan Mas Bagyo sebagai masyarakat Kondang Merak dan pendamping kelompok nelayan menyampaikan bahwa, “aktivitas Kelompok nelayan selain nelayan, yang perempuan bikin warung ngerjain bikin semacam olahanlah” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).



Gambar 14. Pelibatan Media Televisi di Kondang Merak

b) Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber Bening

Untuk masyarakat Desa Sumber Bening, masyarakat membentuk suatu lembaga yang dampingi oleh Perum Perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH bekerjasama dengan Perum Perhutani karena masyarakat Desa merupakan masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan yang di kelola oleh Perum Perhutani. Bentuk kerjasama di berbagai

bidang untuk pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan seperti yang tertera di perjanjian/MOU antara LMDH dengan Perum Perhutani.

Khusus LMDH Desa Sumber Bening, aktivitas yang dilakukan hanya pengelolaan wisata dan perlindungan hutan lindung. Seperti yang disampaikan oleh Mas Sutrisno Ketua LMDH Desa Sumber Bening, bahwa:

“Aktivitas kita swadaya buat jalan mas. Setiap minggu numpuk batu buat jalan. Penanaman belum ada. LMDH kerjasama terkait wisata. Perjanjian dengan Perum Perhutani mengenai perlindungan hutan kalo mau menebang sedikit dan sekecil apapun harus ijin dengan Perum Perhutani terus juga hewan-hewan disini kan dilindungi nanti kalo ada orang yang pake senapan harus dilaporkan. Jadi hutan yang ada disini juga tanggung jawab lembaga semuanya, sekitarnyalah pasir laut, mengawasi semuanya” (Tanggal 2 Januari 2016 pukul 16.30 WIB).

Dari penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa, pengelolaan wisata dilakukan LMDH bekerjasama dengan Perum Perhutani. Mengenai konservasi aktivitas yang dilakukan adalah melakukan perlindungan dan penjagaan hutan lindung terkait penebangan kayu hutan dan perburuan oleh masyarakat.



Gambar 15. Pemasangan Rumpon di Laut dan Baliho Himbauan

4) Pemerintah

a. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mempunyai tugas pengelolaan sumber daya laut dan masyarakat pesisir. Dalam melakukan pengelolaan tersebut, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan diatur oleh Peraturan Bupati Malang No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Khusus di kampung nelayan Kondang Merak, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai kegiatan/aktivitas. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan dan pendampingan terhadap para nelayan dan kelompok nelayannya. Seperti yang diungkapkan oleh Budi Rianto S.Pi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, bahwa:

“Kegiatan kita rutin ya pembinaan masyarakat nelayan termasuk juga POKMASWASnya. Sebenarnya anggotanya nelayan juga. Kalo nelayankan selama ini bimbingan teknis kita ikuti kegiatan-kegiatan itu. Fasilitas edaran tangkapan, sarana komunikasi. Dulu pernah kita ikutkan kegiatan dari BPSPEL penangkapan ikan-ikan dilarang” (Tanggal 5 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pemerintah melakukan pembinaan masyarakat pesisir yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Pembinaan dilakukan dengan membuat dan mengikutsertakan beberapa nelayan untuk turut serta dalam pelatihan dan sosialisasi formal yang diberikan oleh pemerintah lokal maupun pemerintah pusat. Pelatihan

dilakukan minimal dilakukan setahun sekali, baik itu dari dinas kabupaten, provinsi maupun kementrian.

Selain pembinaan berupa pelatihan, pendampingan terhadap kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) juga dilakukan. Tugas utama dari POKMASWAS adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. POKMASWAS dilegalkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/362/KEP/421.013/2012 tentang Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Tata Cara/Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Malang. POKMASWAS merupakan bentukan dari masyarakat sendiri yang disahkan oleh pemerintah. Berhubung POKMASWAS di Kondang Merak tidak berjalan maka pembinaan dilakukan kepada kelompok nelayan. Budi Rianto S.Pi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, menegaskan bahwa:

“POKMASWAS inisiatif masyarakat sendiri dan kita sahkan. Jadi secara legal kita terbitkan SK dari kepala dinas tapi inisiasinya dari masyarakat. Dari dinas pembinaanya. Tugas fungsinya yang paling utama kegiatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya alam sumber daya kelautan perikanan termasuk kalau ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran mereka melaporkan ke yang berwenang” (Tanggal 5 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

Selain pelatihan dan pembinaan, pemerintah juga memberikan bantuan berupa sarana prasarana penangkapan ikan bagi nelayan. Tiap tahun masyarakat mendapatkan bantuan alat tangkap di seluruh masyarakat pesisir

Kabupaten Malang. Bantuan dilakukan dengan mengirimkan proposal kepada pemerintah mengenai kebutuhan yang diperlukan dari masyarakat. Khususnya di Kondang Merak, bantuan selain alat tangkap berupa panel surya atau solar sel. Pemberian panel surya atau solar sel berdasarkan kebutuhan masyarakat dimana kampung nelayan Kondang Merak berbatasan oleh hutan dan laut sehingga belum terjangkau oleh listrik. Hal ini juga dijelaskan oleh Budi Rianto S.Pi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, bahwa:

“Ada juga bantuan sarana prasarana penangkapan ikan ya. Termasuk kelompok nelayan yang ada disana kampung nelayan penerangan tenaga surya yaa kemudian ada juga solar selnya. Bantuan berupa alat tangkap; jaring, pancing yang termasuk alat tangkap. Beberapa kali kita alokasikan untuk kesana” (Tanggal 5 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

Dinas juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan kerjasama untuk menanam terumbu karang maupun menangkap pemburu terumbu karang illegal. Budi Rianto S.Pi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, menjelaskan bahwa: “Kegiatan yang dilakukan terkait konservasi kita melakukan penanaman terumbu karang. Selama ini kita selalu koordinasi dengan mas Andi. Pernah kegiatan bareng nangkap terumbu karang illegal” (Tanggal 5 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

Terkait dengan aktivitas pembinaan, pendampingan, sosialisasi, pemberian bantuan serta penanaman terumbu karang dan mangrove

merupakan aktivitas mengenai pemberdayaan masyarakat dan konservasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Budi Rianto S.Pi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, menjelaskan bahwa: “Caranya kita persuasif, kita bantu dengan fasilitas yang ada otomatis kan matapencarian mereka kita suruh berenti dan kita gabisa ngasih alternatif, makanya kita bantu alat tangkap kompensasi karena mereka tidak menggunakan komproser” (Tanggal 5 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

b. Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) sebagai pengelola hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten Malang mempunyai perencanaan untuk pantai Kondang Merak sebagai tempat wisata alam. Selain tempat wisata tidak ada pengelolaan lebih lanjut untuk kawasan hutan lindung. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Sarbini Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, bahwa: ”kalo di pantai Kondang Merak itu programnya yaa pengembangan penataan tata ruang lokasi wisata. Jadi perencanaannya wisatanya aja (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Pengelolaan dengan pembiaran tata kelola hutan lindung bertolak belakang dengan konsep pantai Kondang Merak yang ingin dijadikan wisata alam. Di satu sisi Kondang Merak ingin dijadikan wisata alam yang otomatis terdapat pengelolaan hutan lindung dan lautnya untuk menunjang tempat wisata alam. Di sisi lain, pihak Perum Perhutani tidak ada perencanaan dan

aktivitas nyata mengenai pengelolaan hutan lindung dan lautnya. Perlu adanya kegiatan yang mengarah kepada tujuan tersebut.

Dalam rangka perlindungan hutan lindung yang terdapat keanekaragaman hayati flora dan faunanya, Perum Perhutani melakukan aktivitas yang melibatkan peran serta masyarakat dan konservasi lingkungan. Ada dua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani selaku pihak pengelola, yaitu pengamanan hutan dan sosialisai kepada masyarakat sekitar hutan.

Pengamanan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung dilakukan melalui patroli. Patroli dilakukan oleh Perum Perhutani tidak terjadwal waktunya tergantung kondisi lapangan. Pak sarbini Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, menjelaskan bahwa:

“Patroli dilakukan di hutan lindung dan produksi. Kalo hutan lindung gak setiap hari liat kondisinya aja. Misalnya lama udah gak diliat oh kita kesana. Masyarakatnya juga semakin sadar kok pak nanti kita ketemu warga ngasih tau disana ada ini itu nanti kita kesana. Tapi kalo lama kita gak patroli gak terpantau pak tau kalo kita patroli minimal orang tau ooh ada petugasnya ada niat tapi gak ada kesempatan gak jadi nyuri” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Dari hal tersebut di atas, menjelaskan bahwa patroli dilakukan sewaktu-waktu tidak tentu jadwal sesuai kondisi lapangan. Selain itu, patroli juga sebagai pengingat dan penegur masyarakat yang berburu kalau pihak Perum Perhutani mengawasi hutannya. Tidak hanya pihak Perum Perhutani saja yang melakukan pengamanan hutan, masyarakat desa dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) juga mempunyai kewajiban untuk

melakukan pengaman hutan baik hutan lindung atau hutan produksi. Sesuai dengan MOU yang dibuat antara Perum Perhutani dan LMDH ada kewajiban untuk menjaga dan mengamankan hutan. Ini berarti ada bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan.

Tujuan pengamanan hutan adalah untuk perlindungan hutan dari perburuan liar yang sering terjadi di hutan lindung. Perburuan dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan mulai dari satwa hutan maupun laut, kayu, dan terumbu karang. Untuk itu target sasaran pengamanan seperti yang dijelaskan oleh Pak Sulis Divisi Wisata KPH Malang Perum Perhutani, bahwa “Pengamanan hutan lebih cenderung kepada manusia sekitar hutan untuk pengamanan pohon dan satwa. Jika sdm kurang begitu bagus tidak tahu resiko berburu, menebang pohon. (Tanggal 27 September 2015 pukul 15.53 WIB).

Selain pengamanan hutan berupa patroli, kegiatan lain yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan maksud menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi hutan dan keanekaragaman hayati untuk keseimbangan hidup dan mengurangi perburuan. Pak Sulis Divisi Wisata KPH Malang Perum Perhutani, menjelaskan bahwa:

“Kebetulan masyarakat sekitar hutan petak 101A ini kita sudah beberapa sosialisasi. Jadi dengan lembaga di petak 101 A sebelah barat itu kita sosialisasi mengenai lutungnya dengan bersinergi dengan pihak-pihak lain. Sosialisasi cenderung dengan topik pengamanan satwa. Kita undang yang jelas tokoh dan para pemburu-pemburu ini,

kalo terkait *illegal logging* yang kita undang tokoh dan pelaku-pelaku *illegal logging*. Sosialisasi dilakukan Perum Perhutani dengan masyarakat dan pemerintah desa. (Tanggal 27 September 2015 pukul 15.53 WIB).

Lebih lanjut Pak Sarbini Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, menjelaskan bahwa: "Sosialisasi di lima desa biasanya dibalai desa. Kalo sosialisasi tidak hanya sebatas hutan lindung pak, tapi menyeluruh apalagi menyangkut keamanan hutan semua disampaikan" (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Perum Perhutani dalam hal sosialisasi pengamanan hutan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan bentuk formal atau non formal. Bentuk formal melalui pertemuan forum antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat atau komunikasi langsung ke masyarakat sekitar hutan yang dijumpai dan bentuk non formal melalui slogan dan papan peringatan.

Dari hasil penjelasan wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan mengenai aktivitas masing-masing *stakeholder* dalam konservasi lingkungan di Kondang Merak sebagai berikut:

Tabel 4. Aktivitas Aktor dalam Konservasi Lingkungan

No	Aktor	Institusi/Stakeholder	Aktivitas
1	2	3	4
1	Akademisi	LSM Sahabat Alam	1. Membantu masyarakat dalam mengembangkan alternatif pekerjaan yang ramah lingkungan 2. Pendampingan kepada masyarakat mengenai pengetahuan konservasi dalam kehidupan sehari-hari 3. Penelitian flora dan fauna di hutan lindung dan laut 4. <i>Soft Campaign</i> ke media massa televisi regional maupun nasional untuk membangun isu publik menjadikan kawasan konservasi
		<i>Aspinal Foundation</i>	1. Pelepasliaran dan monitoring lutung jawa ke habitat aslinya di hutan lindung 2. Monitoring lutung jawa dan satwa lain di hutan lindung 3. Sosialisasi kepada LMDH, petugas Perum Perhutani dan masyarakat terkait pelepasliaran satwa
2.	Swasta	Masyarakat Kampung Nelayan	1. Perdagangan warung makan 2. Jasa persewaan alat snorkeling dan paket wisata
		LMDH Sumber Bening	1. Pembukaan tempat wisata pantai bekerjasama dengan Perum Perhutani
3.	Masyarakat	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	1. Pengamanan hutan di wilayah hutan lindung 2. Pengelolaan dan pengembangan wisata pantai
		Kelompok Nelayan Karya Mina	1. Diversifikasi produk hasil olahan ikan 2. Menghimpun informasi

			kebutuhan nelayan 3. Penanaman terumbu karang dan mangrove
4.	Pemerintah	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Pembentukan dan pendampingan kelembagaan POKMASWAS/Kelompok nelayan 2. Pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan 3. Sosialisasi kebijakan dan peraturan 4. Pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan ikan
		Perum Perhutani	1. Pengamanan hutan lindung dan produksi dengan cara patroli 2. Sosialisasi mengenai keutuhan hutan lindung kepada masyarakat 3. Pembentukan dan pendampingan kelembagaan LMDH 4. Bekerjasama dengan LMDH dalam pengelolaan wisata pantai dan konservasi lingkungan

c. Bentuk Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan Kawasan

Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan konservasi lingkungan tidak lepas dari berjalannya peran masing-masing *stakeholder* yang ada. Peran-peran ini yang seharusnya mengisi salah satu bagian dari tugas dan fungsinya. Perum Perhutani, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, kelompok nelayan karya mina, LMDH

Sumber Bening dan masyarakat merupakan elemen-elemen yang harus bersinergi dalam konservasi alam di Kondang Merak.

Pemberdayaan masyarakat terjadi dapat karena masyarakat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan atau berdaya sendiri, atau dapat pula diberdayakan oleh pihak lain. Intinya adalah masyarakat sendiri yang melakukan dan mengembangkan suatu kegiatan dalam hal ini adalah konservasi alam. Masyarakat dituntut berperan aktif dalam segala tindakan yang berkaitan dengan kelestarian alam di hutan maupun laut. Karena masyarakat setempat merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya laut dan hutan. Jika salah pengelolaan akan habis dan rusak potensi alamnya.

Di Kondang Merak telah adanya suatu sinergi yang dilakukan antara LSM Sahabat Alam dan *Aspinal Foundation*. Sinergi untuk konservasi lingkungan dibagi sesuai kebutuhan di lapangan. LSM Sahabat Alam lebih banyak berperan sebagai pendamping masyarakat dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, berbagai penelitian pun dilakukan baik oleh LSM Sahabat Alam maupun peneliti-peneliti di laut dan hutan serta interaksi masyarakatnya. Baik penelitian hewan laut, terumbu karang, flora dan fauna hutan, serta hubungan masyarakat dengan alam sekitarnya. Sedangkan *Aspinal Foundation* lebih mengarah kepada pelestarian hutan dengan pelepasliaran dan monitoring lutung jawa dan satwa hutan. Dengan pelepasan dan monitoring lutung jawa di habitat

aslinya, *Aspinal Foundation* juga membantu kelestarian hutan dengan menjaga rantai makanan yang terjadi di habitat hutan lindung.

Penjalanan menurut bagian-bagiannya atau porsi masing-masing disampaikan pula oleh Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur, bahwa:

“Harapannya ada yang seperti itu Andi itu *basic*-nya merekakan pemberdayaan masyarakat mereka berperan menutupi satu celah disitu, ada yang fokus memperbaiki hutannya, menambahkan, mengembalikan lagi spesies disana, disisi lain sebenarnya ada juga secara sinergi memperbaiki masyarakat pola dan pendidikan masyarakat terhadap apa. Kalo seperti itu enak. Kalo namanya sinergitaskan harusnya seperti itu. Kalo kita melakukan semuanya yo susah. Disamping personilnya juga terbatas apalagi di MOU kita belum fokus kesitu. Harapan saya kalo ada sinergitas disana itu ada pihak lain yang mengarah kesitu edukasi, ke *community development*-nya.” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Perum Perhutani sebagai pengelola hutan dan pantai Kondang Merak pun melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Seperti yang dilansir oleh pak Sarbini Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, bahwa:

“saat sosialisasi di pinggir pantai mengajak semua pihak artinya dari desa, warga, organisasi kepedulian lingkungan diajak ngumpul kan bisa sama-sama ngerti, Sosialisai kerjasama dengan aparat kepolisian, lsm, desa (kepala desa iya lembaga juga iyaa) kalo lembagakan sebagai mitranya Perum Perhutani otomatis. Desa kan mempunyai wilayah juga termasuk” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Dalam hal sosialisasi, pihak Perum Perhutani berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam konservasi lingkungan di Kondang Merak. Kepolisian, LMDH, LSM, Desa dan masyarakat diikutsertakan dalam sosialisasi mengenai kelestarian lingkungan. Selain itu, dalam hal

pengamanan hutan Perum Perhutani juga bekerjasama dengan LMDH untuk menjaga hutan. Ini tertuang dalam MOU antara pihak Perum Perhutani dengan pihak LMDH. Secara tertulis dan tersirat mengungkapkan bahwa LMDH juga mempunyai kewajiban menjaga, melindungi dan melestarikan hutan dan laut.

Selain itu Perum Perhutani juga bekerjasama dengan berbagai pihak seperti yang dijelaskan oleh Pak Sulis Divisi Wisata Perum Perhutani KPH Malang, bahwa:

“Untuk penanaman terumbu karang kita Perum Perhutani juga bekerjasama dengan marinir. Selain itu bekerjasama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Memang kita bersinergi dengan kepala desa Sumber Bening” (Tanggal 27 September 2015 pukul 15.53 WIB Merak).

Di analisa dari perjalanan peran masing-masing aktor bahwa adanya sinergi ataupun kerjasama tetapi belum optimal. Ditandai masih adanya dampak negatif dan faktor-faktor penghambat dalam proses sinergitas antar *stakeholder*. Dari masing-masing aktor seyogyanya saling mengisi dan melakukan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dan lingkungan.

d. Faktor yang Berpengaruh pada Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari sinergi *stakeholders* dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir adalah faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak positif. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengungkapkan ada beberapa faktor pendukung konservasi lingkungan di hutan lindung, pantai dan laut Kondang Merak, antara lain:

a) Adanya perjanjian atau *momerendum of understanding* (MOU) antar instansi/lembaga

Pembagian tugas dan wewenangnya masing-masing aktor tertera dalam MOU baik antara LSM dengan Perum Perhutani maupun Perum Perhutani dengan LMDH. Selain itu, aktor lain berjalan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur, menyampaikan bahwa:

“Program tertulis ada di MOU. Kalo rencana karya tahunan (RKT) sebenarnya kalo kitakan di amanahkan harus buat yang tahun ini. Cuma kita nunggu Perum Perhutani dulu nih kalo emang belum tanda tangan nanti kita buat dulu dengan BKSDA iya kalo sinkron dengan Perum Perhutani kalo ngga?” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Selain dengan *Aspinal Foundation*, Perum Perhutani juga bekerjasama dengan LMDH Sumber Bening. Kerjasama dengan LMDH juga telah ada MOU yang mengikat diantara keduanya. Kerjasama ditujukan untuk

pengelolaan hutan secara keseluruhan baik hutan lindung maupun hutan produksi. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Iwan Kepala Bagian PHBM Perum Perhutani bahwa:

“Dalam pelaksanaan itu (PHBM) Perhutani berkerjasama bersama masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam bentuk lembaga. Jadi istilahnya ada lembaga masyarakat desa hutan. Khusus di kabupaten namanya LKPDH (Lembaga Kelompok Pengelola Desa Hutan). Itu ada perjanjian kerjasamanya antara LKDPH dengan Perhutani. Secara global kerjasama pengelolaan kawasan hutan” (Tanggal 12 Februari 2016 pukul 10.00 WIB).

Dengan adanya MOU, antar aktor yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tugas dan tata laksana yang dikerjakan. Harapannya tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi serta kegiatan. Selain tumpang tindih, kekhawatiran mengenai ego sektoral pun tidak terjadi. Masing-masing saling mengisi dalam setiap kegiatan untuk kelestarian alam.

Perjanjian atau MOU bersifat terikat dan memaksa karena hal ini merupakan legal secara hukum. Untuk itu setiap aktivitas selalu berkaitan dengan perjanjian tersebut. Idealnya perjanjian dilakukan dari lembaga/instansi yang mengelola dengan pendatang. Tujuannya agar segala aktivitas terpantau dan saling menguntungkan. Dalam hal ini perjanjian dilakukan oleh Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation* dan antara Perum Perhutani dengan LMDH Sumber Bening.

Perjanjian ini sangat membantu kerjasama antar lembaga. Karena dari perjanjian ini terlihat tugas yang harus dilakukan dan dapat

dilakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan masing-masing instansi. Kerjasama dapat menguntungkan kedua belah pihak dan *stakeholder* secara keseluruhan apabila di koordinasikan dengan baik. Timbal baliknya adalah suatu sistem pengelolaan yang baik pun akan terwujud dan tercapainya pembangunan berkelanjutan.

b) Dukungan dari Pemerintah dan LSM

Adanya divisi lingkungan di Perum Perhutani menunjukkan adanya itikad baik Perum Perhutani dalam mengelola hutan di Jawa. Otomatis kebijakan pengelolaan hutan tetap melakukan pembahasan atau mementingkan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, penjualan kayu dan produk Perum Perhutani lainnya harus memenuhi standar ISO mengenai lingkungan. Di tegaskan oleh Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur, menyampaikan bahwa:

“Mau gak mau sekarang produknya Perum Perhutani baik hasil hutan, hutan kayu harus ada sertifikasinya ISO yang dinyatakan bahwa tidak merusak lingkungan. Kalo salah satu penilaian dari ISO itu sendiri kan ada namanya di Perum Perhutani itu apa ya hutan yang mempunyai nilai penting yang ada keanekaragaman hayati didalamnya. Kalo nilai itu jelek, sudah bisa jadi gak laku produk yang dikeluarkan dia. Mulai dari yang kayu ataupun yang non kayunya. Sekarang kan dipasaran perlu sertifikasi. Nah salah satu sertifikasi itu ramah lingkungan, semua prosesnya mulai dari awal hingga pengerjaannya hingga pemasarannya sama sekali tidak merusak lingkungan. Otomatis harus dipahami tentang konservasi kalo kaya gitu. Nah ini sesuatu hal yang baru” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Hal tersebut merupakan nilai lebih yang ada untuk kelestarian lingkungan. Setiap produk yang dihasilkan harus mengandung unsur

ramah lingkungan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat agar laku dipasaran.

Dinas Kelautan dan Perikanan serta Perum Perhutani sebagai pemerintah telah memberikan kebijakan dan aturan mengenai pengelolaan kawasan. Dinas Kelautan dan Perikanan yang berfokus pada kelautan dan kelompok nelayan telah melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, memberikan pelatihan-pelatihan mengenai penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pemberian bantuan alat tangkap. Perum Perhutani yang berfokus pada pengelolaan hutan lindung, pantai dan LMDH telah mengadakan sosialisasi, pendampingan kelembagaan dan patroli hutan.

LSM yang ada di Kondang Merak yaitu LSM Sahabat Alam dan *Aspinal Foundation* telah melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan kepada masyarakat, pengamanan hutan dan laut, dan penelitian flora dan fauna di hutan dan laut Kondang Merak.

c) Kesadaran masyarakat mengenai konservasi dan kelestarian lingkungan

Kesadaran masyarakat merupakan aspek penting dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Mas Bagyo masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan mengungkapkan bahwa: “....masyarakat disini kan ketinggalan

informasi ketinggalan banget lah disini, sudah sadar bahwa alam ini perlu kita jaga masyarakat sudah mengerti arahnya kemana masyarakat udah tau sekarang” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Lebih lanjut mas Sriyadi Ketua Kelompok Nelayan, mengungkapkan bahwa: “Dulu ngebom, potas, nyelam pake kompresor nyari ikannya. Kalo sekarang uda nggak. Semenjak tiga tahunan ini udah berenti. Tau kalo itu bahaya tapi cepet. Kalo potas karang bisa mati” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Masyarakat kampung nelayan Kondang Merak telah mengerti bagaimana memperlakukan alam demi keberlanjutan. Kesadaran ini diterapkan dalam kegiatan sehari-hari mereka, terlebih dalam profesi mereka sebagai nelayan. Otomatis konservasi lingkungan telah menjadi dasar masyarakat dalam beraktivitas dan tau harus melakukan apa agar terciptanya kelestarian alam.

Kesadaran masyarakat terekam dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Dulu penangkapan ikan dilakukan dengan mengebom, menggunakan racun, dan menggunakan kompresor untuk menyelam, tapi sekarang penangkapan ikan dilakukan dengan jaring dan kail. Selain itu masyarakat ikut serta dalam penanaman terumbu karang, mangrove, dan ikut menjaga kelestarian hutan lindung. Kebiasaan ramah lingkungan yang dilakukan masyarakat telah menjadi bagian dari matapencarian mereka. Ketika kebiasaan telah menjadi matapencarian

mereka, otomatis kebiasaan ramah lingkungan dan kegiatan konservasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung nelayan Kondang Merak.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang mengganggu kegiatan dan berdampak ke arah yang negatif. Faktor ini dapat menghambat tercipta sinergi antar *stakeholder* dalam konservasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

a) Pemahaman aktor dalam perjanjian kerjasama terbatas serta minim pengetahuan konservasi lingkungan

Hal yang menyebabkan kurangnya sinergi berbagai aktor adalah ketidakpahaman personil instansi mengenai konservasi lingkungan serta tugas dan pokok sesuai MOU. Pak Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur, menyampaikan bahwa:

“....sekarang MOU ini atau perjanjian kerjasama ini, yang ngertikan petinggi-petinggi Perum Perhutani aja di level mandor, mantri opo ae di bawah-bawahnya kan juga gak tahu di ajak ngomong terlalu tinggi dari bahasanya. Makanya pelan-pelan. Itu kendalanya kita disitu. Pemahaman petugas lokal banyak yang yang kurang dari misi kerjasama ini. Sama-sama saling mengertinyalah itu tadi karna dari level bawah tidak paham dengan program ini itu berarti memang selain PR bagi para Perum Perhutani bagi kepala-kepalanya untuk memberi pemahaman kepada level tingkat bawah, dari kita sendiri secara paralel juga itulah pelan-pelan dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Yaa kurang pemahaman tentang konservasi. Selama inikan Perum Perhutani orientasinya gak kesitu, ke kayu ke hasil

hutan yang menghasilkan namanya juga perusahaan wajarlah ya” (Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Dari deskripsi di atas menjelaskan bahwa pemahaman petugas lapang Perum Perhutani mengenai konservasi dan MOU dengan LSM masih minim. Pemahaman dan pengetahuan yang minim tentang konservasi menjadikan salah komunikasi dan tindakan. Dampaknya adalah ketidaksesuaian prosedur di lapangan dengan apa yang dikonsepskan. Hal tersebut menjadi terlihat bahwa koordinasi yang buruk antara atasan dan bawahan di salah satu instansi, yang berakibat salahnya tindakan yang dilakukan saat dilapangan.

Selain itu, ada pula antara Perum Perhutani dengan LMDH yang kurang memahami akan tugas dan fungsinya dalam MOU. Hal ini di utarakan oleh Pak Sarbini Kepala KRPB Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, bahwa:

“LMDH program pemerintah yang kebetulan saja yang mengerjakan adalah kita. LMDH maunya instan gitu loh, karna apa cerminan dia LMDH lain yang sudah sukses gitu loh bentuk moro moro oleh bagi hasil sekian juta. Di perjanjian kan harus ini ini tapi mungkin kadang gak terbaca kewajibannya, udah tau hak dan kewajibannya tapi tetep gak dilaksanakan. Udah jelas kewajibannya ikut mengamankan kawasan hutan, hutan produksi dapet hasil dari hasil panennya kalo hutan lindung dapet hasil dari dimana mengelola kawasan wana wisata kan gitu. (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Ketidakpahaman tugas dan fungsinya juga dialami oleh LMDH yang tidak sesuai MOU. Karena keterbatasan itu pengelolaan dan pengamanan hutan lindung dan produksi kurang optimal. Akibatnya

kurang terpantaunya kondisi hutan oleh LMDH yang hanya ingin mendapatkan hasil.

Minimnya pengetahuan tentang konservasi juga terdapat pada hubungan antara Dinas Kelautan dan Perikanan serta masyarakat kampung nelayan Kondang Merak. Ketidakpahaman mengenai satwa laut yang dilindungi dan perlu dijaga oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat yang telah mengerti kelestarian laut. Seperti yang dikatakan oleh Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan Kondang Merak dan anggota kelompok nelayan, bahwa:

“....tranplantasi pertama tahun 2012. Dinas malah nanya terumbu karang itu apa sih. Trus jenis-jenisnya. Trus kita aja nelayan yang nyari hiu udah gaboleh. Satu tahun ini gak ada yang nyari karna dilarang. Justru mereka itu dulu kan disini itu sempet bikin sate hiu 2 tahunan, nah orang dinas itu pernah ngerasain disini. Mereka mau nganterin bantuan ‘kita makan-makan disana’ katanya gitu mesen sate hiu yaa belum lama-lama ini. Dinas gendeng a. Harusnya mereka tau trus sosialisasi ke masyarakat” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Ketidakpahaman tugas dalam perjanjian antara LMDH dengan Perum Perhutani berkaitan dengan tidak dijalankannya tugas untuk menjaga hutan dan keinginan LMDH untuk langsung melakukan bagi hasil usaha. Sedangkan Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation* berkaitan dengan kurangnya pemahaman petugas lapang Perum Perhutani mengenai konservasi. Petugas Perum Perhutani setiap 5 tahun

sekali di gilir atau diganti dengan yang baru. Hal ini menjadi diulangnya komunikasi dan koordinasi mengenai pemahaman pengamanan dan konservasi hutan lindung.

Begitu pun dengan petugas lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak mengerti apa itu terumbu karang dan larangan memburu dan mengkonsumsi hiu. Hal ini karena terbatasnya pemahaman petugas lapang mengenai fungsi-fungsi dan aturan pengelolaan ekosistem laut.

b) Minimnya kepercayaan dan komunikasi yang baik antar aktor

Kurangnya kepercayaan dan komunikasi antar instansi juga menjadi faktor penghambat dalam proses sinergi. Pak Sarbini Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, menerangkan bahwa:

“....jangan saling mendeskriminasikan salah satu pihak, soalnya kami benar-benar sudah terbuka gak macem macem ngomongnya b adanya seperti itu. Permasalahannya kalo mau eksplor tau mana yang harus di konsumsi oleh publik mana yang harus dikonsumsi antar instansi. Pak mantri kadang jam 2 malam telpon bunyi, berita di sms ternyata teman-teman ngomentari yang aneh-aneh. Masalah stalagtit yang dicuri” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Hal tersebut terkait dengan pencurian stalagtit gua yang dicuri oleh warga. Berita tersebut di publis oleh LSM Sahabat Alam pada media *online*. Ketika ada berita tidak baik mengenai hutan lindung di Pulau Jawa, maka citra Perum Perhutani selaku pengelola kawasan pun tidak baik, kepercayaan masyarakat menurun. Oleh karena itu menurut

staff lapangan dari Perum Perhutani ketika berita yang di publis baik atau buruk tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka selaku pengelola kawasan. Dan setelah ditelusuri menurut Perum Perhutani bukan kawasan mereka yang terdapat pencurian stalagtit gua melainkan kawasan lain. Berbeda dengan LSM Sahabat Alam, yang mengungkapkan adanya pencurian stalagtit gua tetapi tidak ada respon dari Perum Perhutani, maka berita tersebut di publis.

Selain itu terdapat pula komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation*. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pak Iwan Kepala *Aspinal Foundation* Jawa Timur, menyampaikan bahwa:

“Misalkan, dari kelola wisata Kondang Merak namanya pengelolaan wisataan punya *side plan* punya program sederhanaanya merekakan punya rencana program pengembangan wisata Kondang Merak seperti apa sih kedepan. Nah disitukan minimal jika disitu sudah jadi areal pelepasliaran, otomatis kan kita diajak komunikasi, mana areal spotnya untuk jalur satwa, mana yang kalo buat jalan yo taulah mereka yang punya kawasan tapi minimal kita di ajak komunikasi dulu lah biar *track-track* yang dijadikan wisata itu gak sampe mengganggu secara umum populasi satwanya. Kemarinkan masalahnya disitu”(Tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.09 WIB).

Pak Iwan menjelaskan bahwa pembukaan jalur *tracking* wisata tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan mengganggu habitat lutung jawa dan satwa liar. Oleh karenanya pembukaan jalur tersebut harus

berkoordinasi terlebih dahulu agar habitat dan ekosistem keanekaragaman hayati hutan tidak terganggu dan tetap terjaga.

Faktor penghambat ini menjadi faktor dalam terciptanya sinergi antar instansi. Perum Perhutani dengan LSM Sahabat Alam, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Nelayan Karya Mina merupakan hubungan dengan minimnya kepercayaan dan komunikasi dalam setiap kegiatan dan aktivitas. Sehingga terjadi konflik dan ketidakpercayaan satu sama lain. Hal ini berkaitan juga mengenai tugas dan tanggung jawab serta penyatuan tujuan mengenai kelestarian hutan dan laut.

c) Tidak adanya *blueprint* pengelolaan kawasan Kondang Merak

Hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya *blueprint* pengelolaan kawasan Kondang Merak. Hal ini terkait pengelolaan hutan lindung, pantai dan laut yang tidak jelas. *Blueprint* merupakan *output* dari perumusan perencanaan. Ketika tidak adanya *blueprint*, maka konsep perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi juga tidak ada. Ini yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan kawasan Kondang Merak. Pak Sulis Divisi Wisata KPH Malang Perum Perhutani, menjelaskan bahwa

“Perencanaan hutan lindungnya gak ada, artinya hutan lindungnya sebagai konservasi saja itu gak diapa-apakan bisa istilahnya dikelola seperti wisata, wisatanya juga wisata alam. Kalo di pantai Kondang Merak itu programnya yaa pengembangan penataan tata ruang lokasi wisata. Jadi perencanaannya wisatanya aja, kalo

terkait hutan lindungnya gak ada, hutan lindung gak boleh diapa-apakan dilestarikan dan dijaga gitu tok” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Pengelolaan dengan pembiaran tata kelola hutan lindung bertolak belakang dengan konsep pantai Kondang Merak yang ingin dijadikan wisata alam. Di satu sisi Kondang Merak ingin dijadikan wisata alam yang otomatis terdapat pengelolaan hutan lindung dan lautnya untuk menunjang tempat wisata alam. Di sisi lain, pihak Perum Perhutani tidak ada perencanaan dan aktivitas nyata mengenai pengelolaan hutan lindung dan lautnya.

Ada juga permasalahan internal di masing-masing *stakeholder* mengenai jumlah personil yang minim dilapangan sehingga menghambat kerja di lapangan. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Pak Sarbini Kepala KRPH Sumbermanjing Kulon Perum Perhutani, menerangkan bahwa:

“...kalo kita disalahkan memang tenaga kita terbatas berapa ribu hektar satu hari satu malam bisa gak tidur gak pulang ke rumah. Disini 7 orang dilapangan dibagi per wilayah. Penanaman pemeliharaan kita cuma orang 2, patroli sendiri padahal SOP-nya gak boleh sendiri tapi kalo gitu kita gak patroli” (Tanggal 17 Oktober 2015 pukul 15.53 WIB).

Tidak adanya blueprint yang jelas juga berdampak kepada pembagian beban kerja yang tidak seimbang antara Perum Perhutani dan LMDH Sumber Bening. Disatu pihak Perum Perhutani hanya memberikan tempat/lahan kerja. Di pihak yang lain, LMDH harus

merumuskan konsep dan melaksanakan aktivitas pengelolaannya. Selain itu bagi hasilnya pun tidak adil, artinya beban kerja dengan hasil yang di capai sangat timpang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mas Sutrisno Ketua LMDH Desa Sumber Bening, bahwa:

“....kerjasama dengan Perum Perhutani lembaga dapet 30 %, Perum Perhutani 60 %, ke muspika (koramil, polsek, desa) 10 %. Perum Perhutani gamau tau wisatanya kaya apa dapat uang dari mana, Perum Perhutani gamau tau dapet duit buat batu dari mana. Kendala kalo tenaga masih kami, kalo biaya nah. Kalo hasilkan sama-sama banyak. Sedikit banyak bantulah, Perum Perhutani gamau tau. Seumpama ada masalah orang sakit atau apa tetep kami, Perum Perhutani 60% gamau diutik-utik” (Tanggal 2 Januari 2016 pukul 16.30 WIB).

Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat kampung nelayan juga minim komunikasi dan koordinasi. Khususnya mengenai apa yang masyarakat perlu dan butuhkan. Pemberian bantuan yang tidak sesuai kebutuhan sering terjadi tiap tahun. Selain itu masyarakat butuh pendampingan mengenai kelembagaan masyarakat, kebutuhan dan persoalan di masyarakat, serta sosialisasi mengenai apa yang boleh dan tidak dilakukan mengenai pemanfaatan sumber daya laut perikanan. Hal ini di tegaskan oleh Mas Sriyadi Ketua Kelompok Nelayan Karya Mina, bahwa:

“Kendala sama dinas, Kalo barang-barang yang gak dipake jangan dikasih kesini lah. Dinas gak ada pendampingan. Gak ada yang tau nelayan kebutuhannya apa. Pegawainya mungkin kurang. Sebenarnya butuh pendamping, supaya tau lapor ke kantor, nelayan itu apa yang dibutuhkan. Adanya cuma teori aja

prakteknya itu yang gatau” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan juga menambahkan, bahwa:

“Setiap bantuan gak sesuai. Masyarakat minta itu jaring sama pancing. Misalnya uda belanja minta merk apa, kitakan pake merk yang biasa kita pake standart nasional lah sudah jelas. Begitu sampe ukurannya gak jelas merknya gajelas akhirnya gak digunain sama sekali. Pancing itu per orang dapet per kardus. Tapi cepet patah kailnya. Setiap dateng kita komplain waktu itu. dinasnya ada kita turunin dari mobil ngomong barangnya gajelas gini dibanting. Terus kerjaan dinas itu apa. Kalo dateng bisanya cuma ngelarang lek ngalih yo tak entek no laut e tak bom juga gatau.” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Dari Dinas Kelautan dan Perikanan pemberian yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya barang yang diberikan tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga kurang pendampingan dan kurang komunikasi kepada masyarakat kampung nelayan, terkait dengan kelembagaan, kebutuhan, dan informasi lainnya.

Blueprint perumusan rencana dan aturan yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan kawasan hutan dan laut yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan dengan peran Perum Perhutani sebagai penanggungjawab pengelola hutan lindung dan pantai Kondang Merak. Pantai Kondang Merak hanya dijadikan wisata tanpa adanya konsep

berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal. Sehingga pantai Kondang Merak terlihat tidak tertata dan kurang pengelolaan dengan serius.

Dampak tidak adanya *blueprint* perumusan rencana yaitu lemahnya implementasi serta monitoring dan evaluasi yang menjadi faktor penghambat. Ini berkaitan dengan Perum Perhutani yang mendampingi LMDH serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang mendampingi Kelompok Nelayan Karya Mina. Keluhan LMDH kepada Perum Perhutani mengenai bagi hasil dan aktivitas yang dilakukan tidak adil. LMDH yang tidak mempunyai modal dan kapasitas yang memadai untuk pengelolaan wisata, harus berjalan dengan usaha sendiri sedangkan bagi hasil yang dilakukan 60% Perum Perhutani, 30% LMDH dan 10% desa dan lembaga penegak hukum. Hal tersebut jelas memberatkan masyarakat selaku pelaksana kegiatan.

Sedangkan keluhan masyarakat pesisir kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta butuhnya pendampingan yang optimal dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Konservasi Lingkungan

No	Faktor-Faktor	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Faktor Pendukung	
	a. Perjanjian/MOU antar instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Antara Perum Perhutani dengan LMDH • Antara Perum Perhutani dengan <i>Aspinal Foundation</i> • Antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kelompok nelayan
	b. Dukungan dari Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat	Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • penetapan aturan dan kebijakan • Pembentukan kelembagaan • Pelatihan penangkapan ikan • Pemberian bantuan alat tangkap Lembaga Swadaya Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat • Penelitian potensi dan keanekaragaman hayati hutan dan laut
	c. Kesadaran masyarakat mengenai konservasi dan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesadaran dari masyarakat kampung nelayan untuk menjaga kelestarian alam
2.	Faktor Penghambat	
	a. Pemahaman aktor dalam perjanjian kerjasama terbatas dan minimnya pemahaman tentang konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas lapangan Perum Perhutani yang kurang memahami perjanjian antara <i>Aspinal Foundation</i> dengan Perum Perhutani • Pihak LMDH yang kurang memahami perjanjian antara LMDH dengan Perum Perhutani • Minimnya pemahaman tentang konservasi dari petugas lapangan Perum Perhutani dan Dinas Kelautan dan Perikanan • Pergantian pegawai Perum Perhutani di lapangan selama 5 tahun sekali menyebabkan pemahaman konservasi dan lokasi kurang optimal

	b. Minimnya kepercayaan dan komunikasi antar aktor	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antara Perum Perhutani dengan LSM Sahabat Alam • Hubungan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat Kelompok Nelayan Karya Mina • Kurangnya koordinasi mengenai persamaan tujuan pengelolaan
	c. Tidak adanya <i>blueprint</i> pengelolaan kawasan Kondang Merak	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan Perum Perhutani yang belum ada dokumen perencanaan pengelolaan kawasan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan • Terkait dengan keluhan LMDH mengenai bagi hasil keuntungan wisata dan beban kerja yang tidak seimbang • Pemberian bantuan alat tangkap yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat • Minimnya aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan

2. Dampak Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

d. Dampak dari Segi Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan berkelanjutan. Di Kondang Merak, dampak ekonomi yang terjadi dari hubungan antar *stakeholder* adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan penghasilan perekonomian

Adanya alternatif cara tangkap ikan laut dari mengebom menjadi pembuatan rumpon, menambah jumlah hasil tangkapan ikan laut. Perbaikan dengan menanam kembali terumbu karang tempat habitat ikan laut juga menunjang meningkatnya hasil tangkapan ikan laut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oeh Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam, menjelaskan bahwa:

“Kita buat rumpon atau tempat berpijak ikan sementara yang dipasang di samudera hindia penghasilan yang belum ada rumpon awalnya 3 sampai 60 setelah ada rumpon meningkat 150 sampai 600 kg itu sekali melaut. Jadikan naikkan ekonominya. Memang tidak 100% tapi kita mengurangilah” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Kenaikan jumlah hasil tangkapan akan berbanding lurus dengan pendapat yang dihasilkan dari pembuatan rumpon di tengah laut. Selain itu, hal tersebut juga menjelaskan bahwa adanya alternatif pekerjaan yang dilakukan masyarakat dalam penangkapan ikan laut yang lebih ramah

lingkungan. Hal ini juga di sampaikan oleh Mas Bagyo sebagai masyarakat

Kondang Merak dan pendamping kelompok nelayan, bahwa:

“Penghasilannya walaupun kita gak ngerusak hasilnya sama saja, dari dulu pengrusak hasilnya sekian dan sekarang pun hasilnya sekian bahkan bisa lebih. Dulu waktu potas sama bom hasilnya banyak, tapi ikannya rusak cepet busuknya ikannya malah dibuang. Dulu itu terlalu banyak potas jadi ikan-ikan terumbu karang itu susah kalo sekarang udah ngga. Kalo sekarang dapetnya standar tapi bisa terjual semua” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 21.50 WIB).

Sejalan dengan pendapat Mas Bagyo, Pak Sriyadi Ketua Kelompok

Nelayan menambahkan, bahwa:

“Dulu sekali ngebom satu engkel itu gak muat satu truk ikan, tapi ikannya gak laku kan ikannya busuk. Ikan kalo ngga sekali jual busuk. Kan kena bom perutnya cepet busuk. Dibandingkan sekarang sama aja selisihnya gak banyak, banyakan pake bom sedikit. Tapi kan cepet habis ikannya trus busuk kalo sekarangkan sedikit sedikit ngambil terus ada” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai penangkapan ikan yang ramah lingkungan, hasil tangkapan lebih berkelanjutan atau terus menerus walaupun hasil perharinya tidak jauh berbeda.

2) Adanya alternatif pekerjaan bagi masyarakat

Adanya alternatif pekerjaan lain yang dilakukan oleh masyarakat seperti wisata kuliner atau persewaan alat *snorkeling* dan paket wisata. Masyarakat diarahkan sebagai *guide* untuk tamu-tamu ekoturisme baik ke laut maupun ke hutan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk menjual berbagai kerajinan tangan untuk wisatawan yang datang. Mas Heru Divisi

Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam menjelaskan bahwa:

“...kita berusaha menghasilkan tempat wisata kuliner, kalo dulu awalnya langsung dijual ke pengepul ikannya, pengelolaannya tidak terlalu ramelah seperti sekarang, kalo sekarang sudah banyak dan terkenal, kita mempromosikan itu. Membantu perekonomian mereka. 75% tamu itu kita yang mendatangkan dulu, tamu-tamu ekoturism, tamu-tamu yang tidak seperti biasanya, tamu yang ngamatin alam, satwa, terus nanam terumbu karang, nanam mangrove” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Sejalan dengan hal tersebut, Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan, menyampaikan bahwa:

“Nanti nambah pekerjaan seperti *guide* sambil jalan aja. Sebenarnya paket-paket wisata kita uda jelas sih tapi tamunya aja yang gaka ada. Liat lumba-lumba 260rb/orang satu kapal minimal 4 dapat makan *guide* dokumentasi. Kalo *diving* 850rb/orang. Dan sekarang terumbu karangnya uda bagus kita muter otak aja apa yang bisa dijual kaya kita kepikiran nyewakan *snorkel*. Cuma wisatawan aja belum tertata. Kalo dapet banyak gitu kita bikin kerupuk ikan nugget dari ikan. Cuma masalahnya kita udah bikin pasarnya yang susah. Itu pernah kita *share* ke dinas perikanan tapi cuma iya iya aja sampe sekarang gak ada. *Expired*-nya yang gatau kapannya. Trus ikan asin kering jambal roti buat oleh-oleh. Tapi musiman ikannya jadi susah” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Adanya paket-paket wisata untuk melihat lumba-lumba ataupun *diving* serta *snorkeling* mulai dijalankan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan telah baiknya kondisi laut untuk bisa dimanfaatkan keindahan dalam lautnya. Hasil tangkapan yang banyak juga menjadi bentuk pengelolaan sendiri seperti nugget dan kerupuk ikan. Diversifikasi produk dijalankan ketika hasil tangkapan ikan tertentu banyak dan pasarnya pun ada.

Hubungan LMDH dengan Perum Perhutani pun menimbulkan dampak penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Sumber Bening. Seperti yang dikatakan oleh Mas Sutrisno Ketua LMDH Desa Sumber Bening, bahwa “Enaknya kita dapat pekerjaan, disini khusus Desa Sumber Bening” (Tanggal 2 Januari 2016 pukul 16.30 WIB). Hal tersebut mengungkapkan bahwa kerjasama di bidang pariwisata menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Berbanding lurus dengan alternatif dan penambahan pekerjaan, penghasilan masyarakat pun meningkat. Hasil tangkap tidak langsung dijual seluruhnya, melainkan diolah kembali sebagian untuk dijadikan hidangan untuk wisatawan yang datang untuk menambah penghasilan.

Tabel 6. Alternatif Pekerjaan Masyarakat

No	Kegiatan	Tahun		
		2012	2013	2014
1.	Warung makan	V	V	V
2.	Penjualan paket wisata laut	-	-	V
3.	Sewa alat <i>snorkeling</i>	-	-	V
4.	Pengelolaan wisata pantai	V	V	V

e. Dampak dari Segi Sosial

Dampak dari segi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sosial berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia dan daya dukung kehidupannya. Dampak dari segi sosial hubungan antar *stakeholder* antara lain sebagai berikut:

1) Kesadaran masyarakat mengenai konservasi lingkungan

Dari adanya aktivitas LSM SALAM dan *Aspinal Foundation* yang berkoordinasi dengan Perum Perhutani dan masyarakat di kawasan hutan lindung, perburuan satwa dan *illegal logging* semakin berkurang atau bahkan tidak ada di waktu-waktu tertentu. Hal ini karena adanya bentuk sosialisasi dan pendampingan secara terus menerus kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan secara formal maupun non formal.

Perubahan aktivitas masyarakat juga berdampak secara nyata. Seperti yang dikatakan oleh Mas Sutrisno Ketua LMDH Desa Sumber Bening, bahwa:

“....kemarinkan sering terjadi pembalakan liar pemotongan kayu, kebanyakan yang memotong kayukan orang kita sendiri. Dan sekarang ada lembaga milik sumberbening, otomatis orang tadi akan sungkan masa ganggu konco dewe. Pemburu-pemburu juga sering sekarang udah gak ada” (Tanggal 2 Januari 2016 pukul 16.30 WIB).

Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Walaupun berawal dari rasa malu terhadap teman sendiri yang menjaga hutan karena telah memburu dan menebang pohon di hutan.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan dan laut telah muncul. Seperti yang disampaikan oleh Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan, menyampaikan bahwa:

“....merubah kebiasaan orang itu kan gak mudah. Yang penting sekarang itu mereka gak merusak. Sebelah sini ketengahan dikit kan uda wilayah konservasi. Rencananya sama Perum Perhutani yang sadar lingkungan kita mau bikin pembatas semacam kita kasih pager dan himbauan oou disini ada ini” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat setempat telah berbicara mengenai kelestarian alam dan menjaga ekosistem hutan dan laut. Artinya telah tumbuh rasa kesadaran bahwa alam beserta isinya harus dijaga dan dilestarikan.

2) Kecemburuan sosial antar desa

Tidak hanya dampak positif saja yang terjadi, namun seiring dengan meningkatnya perkembangan dan pendapatan masyarakat baik dari segi wisata dan konservasi terkait dengan pengelolaan hutan dan laut terjadi konflik sosial antar desa atau individu. Permasalahan antar desa ataupun individu yang terjadi yaitu kecemburuan sosial baik karena konservasi ataupun wisatanya. Mas Heru Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM LSM Sahabat Alam menjelaskan bahwa:

“Antara desa ini dengan desa lainnya apakah ada kecemburuan? akhirnya ikut-ikutan ini wilayahku kok, jadi saling kecemburuan. Desa ini populer karena desa konservasi misalkan, sukses ekonomi naik trus desa ini cemburu, sedengkan sebenarnya kawasan yang ada disini ini kawasan yang harus dipertahankan” (Tanggal 3 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Kecemburuan bisa tidak terjadi jika masyarakat mengerti akan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya serta potensi daerah masing-masing. Jika pengetahuan dan kesadaran masyarakat sudah ada otomatis pendapatan

masyarakat akan meningkat. Selain itu perlunya pendampingan dari pemerintah ataupun LSM dan pihak akademis dalam berlangsungnya aktivitas masyarakat.

f. Dampak dari Segi Lingkungan

Aspek penting lainnya dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan. Keberlanjutan dan kelestarian alam harus dipertahankan demi keberlangsungan antar generasi. Selain itu, aspek lingkungan merupakan faktor baru dalam pembangunan yang sangat diperhatikan karena terkait dengan kondisi fisik udara, air, tanah dan keanekaragaman hayati. Dampak dari segi lingkungan hubungan antar *stakeholder* antara lain sebagai berikut:

1) Keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan dan laut membaik

Hutan lindung Kondang Merak yang merupakan hutan lindung satu satunya di Jawa Timur masih memiliki keanekaragaman hayati didalamnya. Berbanding lurus pula dengan tingkat perburuan keanekaragaman hayati. Dengan adanya sinergi antar aktor dan mengertinya peran masing-masing tingkat perburuan liar semakin menurun. Pak Sulis Divisi Wisata KPH Malang Perum Perhutani, menjelaskan bahwa: “Dari 421 Ha hutan meliputi ada 4 desa. Setelah dilakukan pengamanan satwa, kita sudah ketemu kaya monyet, kaya musang, kaya trenggiling itu sering ketemu dengan anaknya” (Tanggal 27 September 2015 pukul 15.53 WIB).

Dari dampak lingkungan kelautan semakin membaik karena adanya sinergi antara LSM dan masyarakat yang telah sadar akan kelestarian

lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Sriyadi Ketua kelompok nelayan, bahwa:

“Dulu pake bom karangnya mati semua. Dulunya bagus karna dibom itu. sekarang udah gak berani pake jaring sama kail. Enakan sekarang demi terjaga kelestarian laut. Kalo sekarang pake jaring dikit dikit ikannya lancar. Kalo dulu sekali aja abis itu ikannya gamau dateng lagi” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Indikator lautnya mulai membaik selain banyaknya ikan adanya terumbu karang yang membaik pula. Seperti yang dikatakan oleh Mas Bagyo sebagai masyarakat kampung nelayan dan anggota kelompok nelayan, bahwa: “Sekarang terumbu karangnya uda bagus kita muter otak aja apa yang bisa dijual. Sebelah sini ketengahan dikit kan uda wilayah konservasi” (Tanggal 3 Januari 2016 pukul 12.00 WIB).

Dari dampak lingkungan telah menunjukkan perubahan yang positif. Dari aspek kehutanan, telah terlihat satwa-satwa yang beraktivitas di hutan. Sedangkan dari aspek kelautannya, mulai banyaknya ikan dan terumbu karang yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir Kondang Merak



Gambar 16. Salah Satu Jenis Burung dan Ikan Laut di Kondang Merak

2) Limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik di kampung nelayan

Hal ini menjadi dampak langsung terhadap lingkungan Kondang Merak yaitu limbah rumah tangga maupun wisatawan yang berkunjung ke pantai Kondang Merak. Seperti yang dikatakan salah satu anggota lapangan *Aspinal Foundation* bahwa pengelolaan sampah di Kondang Merak dengan cara dibakar. Hal ini menyebabkan rusaknya tanah dan pasir jika terus menerus dilakukan pembakaran sampah.

Selain itu juga sampah rumah tangga menumpuk hingga kira-kira 5 meter ke belakang rumah. Otomatis sampah ini bersinggungan langsung dengan hutan lindung. Hutanpun semakin terkikis dan polusi udara semakin menjadi. Sampah juga menjadi pemandangan di sebagian rumah karena belum adanya pengelolaan yang baik. Sampah merupakan dampak yang ditimbulkan dari pembukaan pariwisata di Kondang Merak. Minimnya kerjasama dengan pemerintah daerah yang menangani sampah di desa. Ini dikarenakan lokasi kampung nelayan yang sulit dijangkau dan terlalu jauh masuk ke dalam hutan lindung. Artinya aksesnya masih kurang memadai.

3) Berkurangnya lahan hutan alami

Hutan ditentukan oleh kerapatan vegetasi dan keanekaragaman hayati dan ekosistem didalamnya. Ketika adanya pembukaan hutan, secara langsung telah merusak habitat dan keanekaragaman hayati dan

ekosistemnya. Di Kondang Merak banyak dilakukan pembukaan hutan dengan kepentingan pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Mas Sutrisno Ketua LMDH Desa Sumber Bening, bahwa: “Aktivitas kita swadaya buat jalan mas. Setiap minggu numpuk batu buat jalan” (Tanggal 2 Januari 2016 pukul 16.30 WIB).

Hal ini menjadi keresahan dan ketimpangan juga ketika potensi pariwisata dibuka otomatis memerlukan jalan untuk wisatawan. Cara yang digunakan adalah membuka lahan hutan untuk membuat jalan mulai jalan setapak hingga jalan besar. Jalur lintas selatan juga menjadi dampak dari kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata di pesisir selatan Jawa. Karena dengan dibukanya JLS, maka pembukaan hutan untuk jalan bertambah sehingga habitat satwa semakin terancam.

Tabel 7. Dampak Sinergitas Stakeholder dalam Konservasi Lingkungan

Dimensi/Aspek	Uraian
Ekonomi	1. Peningkatan penghasilan perekonomian 2. Adanya alternatif pekerjaan bagi masyarakat
Sosial	1. Kesadaran masyarakat mengenai konservasi lingkungan 2. Kecemburuan sosial antar desa
Lingkungan	1. Keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan dan laut membaik 2. Limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik di kampung nelayan 3. Berkurangnya lahan hutan alami

C. Analisis Data

1) Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

a. Aktor yang Terlibat dalam Konservasi Lingkungan

Stakeholders yang terlibat dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir pantai Kondang Merak terdiri dari Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, Kelompok Nelayan Karya Mina, LMDH Sumber Bening dan masyarakat Desa Sumber Bening. Masing-masing badan atau instansi memiliki fungsi dan peran tersendiri yang saling melengkapi.

Dalam *quintuple helix* terdapat lima subsistem yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Kelima subsistem ini saling berinteraksi dan bertukar pengetahuan satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Carayannis and Campbell (2010), dalam Carayannis, Barth, Campbell (2012:5) bahwa:

The Quintuple Helix, thereby, visualizes the collective interaction and exchange of knowledge in a state (nation-state) by means of the following five subsystems (i.e., helices): (1) education system, (2) economic system, (3) natural environment, (4) media based and culture-based public (also civil society), (5) and the political system.

1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat

Subsistem pendidikan merupakan akademisi, peneliti dan LSM yang mempunyai tujuan penelitian dan pengembangan keilmuan. Sistem pendidikan, merupakan subsistem pertama, mendefinisikan sebagai akademisi, universitas, sistem pendidikan tinggi, dan sekolah. Dalam helix ini, yang diperlukan adalah 'modal manusia' (misalnya: siswa, guru, ilmuwan/peneliti, kewirausahaan akademik) (Carayannis, Bath, Campbell, 2012:5). Di Kondang Merak terdapat dua LSM yaitu LSM Sahabat Alam dan *Aspinal Foundation*. LSM Sahabat Alam bergerak dibidang konservasi hutan dan laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan *Aspinal Foundation* bergerak dibidang konservasi hutan. Dari masing-masing LSM ini memiliki pihak akademisi ataupun peneliti dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan peneliti burung yang sekaligus anggota dari LSM Sahabat Alam, diketahui banyak penelitian terkait hutan lindung dan laut yang telah dilakukan. Di kawasan hutan lindung, laut dan masyarakat, peneliti-peneliti berasal dari perguruan tinggi di Malang dan sekitarnya lembaga tertentu ataupun independent.

2) Swasta

Subsistem ekonomi terkait erat dengan swasta. Sistem ekonomi, sebagai subsistem kedua, terdiri dari industri, perusahaan, layanan dan bank. Helix ini memfokuskan pada 'modal ekonomi' (misalnya; kewirausahaan, mesin, produk, teknologi, uang) (Carayannis, Bath,

Campbell, 2012:5). Kegiatan perekonomian di wilayah Kondang Merak merupakan kegiatan dari masyarakat setempat. Kelas perekonomian baru usaha kecil dan menengah. Aktivitas perekonomian/swasta yang juga matapencarian masyarakat antara lain warung makan, sewa alat *snorkeling*, pembukaan wisata pantai. Semuanya ini dilakukan oleh masyarakat pesisir tanpa ada investasi atau swasta luar yang masuk.

Dalam hal ini sisi lain dari Perum Perhutani sebagai BUMN yang mencari keuntungan dari pengelolaan dan penguasaan hutan lindung dan produksi juga dapat masuk kedalam kategori swasta. Hal ini dikarenakan Perhutani yang berbentuk perusahaan juga mencari keuntungan untuk negara dengan pembukaan pariwisata berbasis wisata alam.

3) Masyarakat

Subsistem masyarakat sebagai subsistem keempat adalah masyarakat berbasis media dan masyarakat berbasis budaya. Subsistem keempat ini, mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk 'modal'. Di satu sisi, helix ini memiliki 'modal sosial', melalui masyarakat berbasis budaya (misalnya: tradisi, nilai-nilai, dan lainnya). Di sisi lain, helix ini memiliki modal informasi melalui masyarakat berbasis media (misalnya: televisi, internet, surat kabar, dan lainnya) yang berisi informasi mengenai berita, komunikasi, jaringan sosial (Carayannis, Bath, Campbell, 2012:5). Masyarakat berbasis media telah terlibat di Kondang Merak. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa media yang meliput aktivitas masyarakat di

Kondang Merak antara lain media televisi ada TVRI nasional, Jtv, Metro tv, R tv. Selain itu juga Koran dan surat kabar dan media *online* pun juga terlibat untuk menginformasikan kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan Kondang Merak.

Sedangkan masyarakat berbasis budaya dibagi menjadi dua berdasarkan lokasi dan kepentingannya. Pertama, masyarakat di perkampungan pesisir yang mayoritas beraktivitas sebagai nelayan atau disebut kampung nelayan. Masyarakat ini membentuk suatu lembaga yaitu Kelompok Nelayan Karya Mina yang beranggotakan masyarakat sendiri yang didampingi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Mayoritas masyarakat pesisir adalah pendatang yang menetap disana dan menjadi masyarakat desa setempat. Kampung nelayan berbatasan langsung dengan hutan lindung dan laut samudera hindia. Kedua, masyarakat Desa Sumber Bening. Masyarakat ini menetap dan asli dari Desa Sumber Bening yang beranekaragam matapencarian berternak, berladang, nelayan, pegawai negeri dan berdagang. Masyarakat ini berbatasan langsung dengan hutan lindung malang selatan. Masyarakat ini membentuk suatu lembaga yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang didampingi oleh Perum Perhutani.

4) Pemerintah

Berdasarkan konsep *quintuple helix* pemerintah termasuk ke dalam subsistem politik. Sistem politik, sebagai subsistem kelima dalam *quintuple helix* sangat penting, karena merumuskan kehendak, untuk negara masa sekarang dan masa depan. Demikian juga mendefinisikan untuk mengatur serta administrasi kondisi umum negara. Oleh karena itu, helix ini memiliki 'modal politik dan hukum' (misalnya: ide, hukum, rencana, politisi) (Carayannis, Bath, Campbell, 2012:5).

Di Kondang Merak, pemerintah yang terlibat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Masing-masing mengatur administrasi dan mengelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini juga terkait dengan kebijakan yang diambil, hukum, perencanaan juga telah dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan. Perum Perhutani mempunyai dua sisi muka, di satu sisi berperan sebagai pemerintah yang mengelola dan menguasai hutan dengan hukum dan politisinya, di sisi lain juga memberikan pemasukan kepada kas negara sebagai pihak swasta.

Subsistem selanjutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam sebagai subsistem ketiga adalah menentukan untuk pembangunan berkelanjutan pembangunan dan memfokuskan pada 'modal alam' (misalnya; sumber daya alam, tanaman-tanaman, satwa-satwa) (Carayannis, Bath, Campbell, 2012:5). Kondang Merak merupakan kawasan pesisir yang

berbatasan dengan samudera hindia dan hutan lindung malang selatan. Dari segi lingkungan alam, terdapat keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna baik di hutan lindung maupun di laut samudera hindia.

Dari penjelasan di atas, unsur-unsur dari *quintuple helix* telah ada di Kondang Merak. Hal ini bisa merupakan subsistem untuk pembangunan berkelanjutan. Kriteria ini menjadi syarat adanya konsep *quintuple helix* pada kawasan Kondang Merak.

b. Aktivitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan

1) Akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat

a) LSM Sahabat Alam

LSM Sahabat Alam merupakan lembaga konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai visi yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara khusus. Dengan misinya yaitu:

- a) Melakukan perlindungan hutan dan laut;
- b) Berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan lingkungan;
- c) Memberikan edukasi tentang pelestarian lingkungan;
- d) Menciptakan kader-kader pemerhati lingkungan;
- e) Mengumpulkan *data base* potensi biodiversitas dan menginformasikan ke masyarakat luas;
- f) Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam secara lestari.

Dalam mencapai visi dan menjalankan misi tersebut, LSM Sahabat Alam melakukan program kerja setiap tahunnya mulai tahun 2010 sampai sekarang. Dengan pendekatan etnografi kepada masyarakat, LSM Sahabat Alam mulai masuk ke masyarakat Kondang Merak. Pendekatan etnografi maksudnya berbaur dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Berawal dengan memberikan solusi mengenai apa yang mereka butuhkan dari aspek ekonomi.

Sampai saat ini LSM Sahabat Alam masih melakukan aktivitas/kegiatan berupa sebagai berikut:

- a. Melakukan aktifitas-aktifitas rehabilitasi dan perlindungan alam (transplantasi terumbu karang, karantina penyu, penanaman mangrove, pengelolaan sampah terpadu, dan lainnya);
- b. Melakukan pengumpulan *data base* keanekaragaman hayati di hutan pesisir Kabupaten Malang;
- c. Mendampingi dan mensosialisasikan pengetahuan akan pentingnya kelestarian hutan dan laut baik pada warga sekitar, pengunjung wisata atau luar wilayah dengan membuat rumah baca, mading, *leaflet*, poster dan lainnya;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kawasan bersama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait (LMDH, Pokmaswas, Perum Perhutani, karang taruna, masyarakat nelayan).

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melibatkan peran aktif masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan kawasan hutan tersisa malang selatan sebagai kawasan perlindungan alam dan laut; dan menjadikan kawasan perlindungan alam ini sebagai kawasan ekowisata dan eduwisata yang bisa dimanfaatkan masyarakat tanpa di eksploitasi secara berlebihan

b) Aspinal Foundation

Aspinal Foundation merupakan lembaga konservasi yang berasal dari Inggris yang mempunyai program repatriasi atau pengembalian satwa ke habitat asalnya. *Aspinal Foundation* yang mempunyai kebun binatang di Inggris, karena kelebihan populasi satwa endemik Indonesia khususnya Jawa yaitu lutung Jawa maka dilakukan program repatriasi dengan nama *Javan Primate Project*.

Kegiatan/aktivitas yang dilakukan di Kondang Merak adalah pelepasliaran lutung jawa ke habitat aslinya yaitu hutan lindung pesisir Kabupaten Malang. *Aspinal Foundation* berkegiatan di Kondang Merak pada tahun 2014 dan telah melakukan pelepasliaran lutung sebanyak dua kali dengan sekali pelepasliaran sebanyak lima atau enam lutung jawa ke hutan. Setelah dilakukan pelepasliaran, anggota *Aspinal Foundation* melakukan monitoring dan evaluasi di hutan setiap hari secara berkala.

Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat, LMDH dan petugas Perum Perhutani yang bertugas. Selain itu, *Aspinal Foundation* juga

mengikutsertakan masyarakat lokal Desa Sumber Bening untuk menjadi anggotanya yang dapat memonitoring setiap saat. Harapannya masyarakat yang terlibat dapat menyebarluaskan rasa dan tindakan menjaga kelestarian hutan kepada lainnya.

Pentingnya keterlibatan NGO dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1996), bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, seperti LSM baik lokal maupun nasional, mempunyai potensi dan peran besar pemberdayaan masyarakat. NGO dapat juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut LSM Sahabat Alam dan *Aspinal Foundation* telah melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat mengenai kehidupan sehari-hari dan konservasi lingkungan. Kedua LSM ini terus menerus melakukan pendampingan masyarakat dan lingkungan alam setiap waktu. Peran pemerintah terkait dengan pemberdayaan masyarakat juga terbantu oleh adanya LSM untuk mempermudah masuknya kebijakan dan program dari pemerintah jika terjadi sinergi antara pemerintah dan LSM.

Sejalan dengan hal tersebut lebih lanjut Kartasasmita (1996) mengungkapkan bahwa, mengenai peran lembaga pendamping seperti LSM, peran mereka sangatlah membantu masyarakat karena mereka dekat dan tahu akan kondisi masyarakat yang dihadapinya, hal ini memudahkan pemerintah/dinas mengimplementasikan kebijakannya. LSM merupakan

dinamisator dan fasilitator cukup berperan dengan membantu pengenalan program atau kegiatan dinas/pemerintah. Untuk itu perlu adanya komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan LSM dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain LSM, keterlibatan peneliti dan universitas dalam pengembangan inovasi pengetahuan sangatlah penting. Berkolaborasi satu dengan lainnya untuk membuat atau menemukan pengetahuan baru, teknologi, produk dan jasa. Dalam model inovasi ini, universitas dan peneliti mempunyai peran yang kuat dalam pengetahuan. (Etzkowitz 1998, 2003; Leydesdorff & Meyer 2006 dalam Arnkil dkk, 2010:12). Universitas atau peneliti sebagai aktor intelektual mendorong lahirnya karya cipta dalam industri kreatif. Hal ini dapat diwujudkan melalui fungsi utamanya dengan melakukan penelitian sebagai masukan tentang model pengembangan inovasi dan instrumen yang dibutuhkan atau langsung menjadi penyebar pengetahuan. Untuk itu dalam suatu kegiatan pembangunan berkelanjutan perlu adanya akademisi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan yang dalam model *quintuple helix* sebagai penghubung antar *stakeholder* dengan sirkulasi pengetahuan (*circulation of knowledge*).

Dengan mulai berkembangnya penelitian di kawasan Kondang Merak baik itu peneliti satwa, tumbuhan, laut, hutan, masyarakat dan lain sebagainya perlu pengembangan lebih lanjut agar terciptanya pembangunan berkelanjutan. Artinya penelitian terus dikembangkan dan *stakeholder*-

stakeholder harus mau menerima kekurangan dan kelebihan serta mau merubah sesuai perputaran pengetahuan dengan mengesampingkan ego sektoral.

2) Swasta

Swasta termasuk dalam sistem ekonomi. Dimana perputaran uang dan usaha dilakukan pada *stakeholder* ini. Menurut Carayannis, Barth, Campbell, (2012:5) industri memfokuskan pada modal ekonomi (misalnya: kewirausahaan, mesin, produk, teknologi dan uang). Untuk itu seluruh usaha yang dikaitkan dengan hal tersebut dimasukkan dalam *stakeholder* ini.

Di Kondang Merak, swasta yang bergerak dari masyarakat sendiri seperti warung makan/perdagangan, persewaan alat snorkeling/jasa, dan pembukaan tempat wisata. Semuanya ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri yang ingin mengembangkan kewirausahaannya. Disini kelasnya adalah usaha kecil dan menengah. Sejalan dengan hal tersebut Etzkowitz (1998), (2003); Leydesdorff & Meyer (2006) dalam Arnkil dkk, (2010:12) mengungkapkan bahwa industri/swasta mengembangkan strategi dan pemasaran produk serta melakukan produksi dan proses inovasi.

Industri perdagangan wisata kuliner dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan Kondang Merak ataupun masyarakat desa. Masyarakat memproduksi kuliner laut yang khas dan memasarkan produknya dengan berjualan tetap dilokasi dengan mandiri. Begitu pula dengan jasa persewaan alat *snorkeling* yang juga dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan

Kondang Merak ataupun masyarakat desa. Mereka melakukan beberapa strategi dan pemasaran produk kepada wisatawan yang berkunjung ke Kondang Merak.

Sedangkan untuk pembukaan tempat wisata dilakukan oleh LMDH sumber bening dan Perum Perhutani dengan sistem bagi hasil. Untuk pengelolaan secara konsep diserahkan kepada LMDH, sedangkan Perum Perhutani hanya memberikan batasan seperti ruang, kegiatan dan lainnya yang tertuang dalam sebuah MOU atau perjanjian. Kerjasama dilakukan antara Perum Perhutani bidang PHBM dan dilanjutkan kepada bidang wisata dengan LMDH Sumber bening. Proses inovasi pengembangan wisata diserahkan kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengetahuan tentang pengelolaan wisata dan pendampingan kepada masyarakat. Strategi dan pemasaran produk tetap berkoordinasi dengan Perum Perhutani. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan yang membuka paket wisata seperti *diving* dan melihat lumba-lumba di laut. Belum adanya sinkronisasi pariwisata antar instansi.

Perum perhutani di sisi lain juga dapat masuk kedalam katagori swasta. Hal ini dikarenakan perusahaan negara ini berfungsi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pengelolaan hutan untuk pendapatan negara sesuai UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara dan PP No.72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Dari hal tersebut Perum Perhutani melakukan kegiatan pariwisata berbasis wisata

alam di Kondang Merak. Masih kurang inovasi dalam pengembangan pariwisata yang dijalankan oleh Perum Perhutani dan LMDH Sumber Bening.

3) Masyarakat

Masyarakat Kondang Merak dibagi dua yaitu, masyarakat kampung nelayan yang di koordinir oleh Kelompok Nelayan Karya Mina dan masyarakat Desa Sumber Bening yang di koordinir oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Keduanya masuk wilayah administrasi Desa Sumber Bening. Sejalan dengan hal tersebut Carayannis and Campbell (2009) dalam Carayannis, Bath, Campbell, (2012:5) menjelaskan bahwa masyarakat yang berbasis budaya berkembang dengan nilai-nilai, pengalaman, tradisi, dan visi yang memunculkan pengetahuan bagi pengetahuan masyarakat.

Masyarakat kampung nelayan Kondang Merak merupakan masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan dan laut. Masyarakat yang kebanyakan pendatang ini bermatapencarian sebagai nelayan. Dari hasil wawancara dengan Pak Sriyadi Ketua Kelompok Nelayan Karya Mina, jumlah nelayan disini ada 18 orang dan memiliki kapal sendiri. Dahulu masyarakat menangkap ikan dengan cara mengebom, meracuni ikan, dan menggunakan kompresor untuk menyelam. Namun saat ini penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan yaitu dengan pancing, kail dan rumpon.

Selain nelayan, ibu-ibunya membuat hasil olahan tangkap dengan membuat warung makan. Warung makan merupakan pekerjaan yang dilakukan dari hasil tangkapan nelayan selain diberikan ke pengepul ikan. Tidak hanya warung makan, saat ini setelah adanya kegiatan penanaman terumbu karang dan mangrove, masyarakat mendapatkan peluang pekerjaan baru yaitu dengan menyewakan alat selam dan snorkeling. Masyarakat juga membuat paket-paket wisata untuk *diving* dan melihat lumba-lumba.

Di kampung nelayan tersebut terdapat Kelompok Nelayan Karya Mina yang dibentuk atas inisiatif sendiri oleh masyarakat. Aktivitas yang dilakukan mengkoordinir kebutuhan masyarakat untuk berkoordinasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan serta mendiskusikan dan membantu pemecahan masalah yang terjadi di kampung nelayan tersebut. Kelompok Nelayan Karya Mina terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota, pembina dan pendamping. Kelembagaan tersebut dijabat oleh masyarakat sendiri dan LSM. Harapannya masyarakat dapat mandiri dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Selain kampung nelayan, masyarakat yang terlibat adalah masyarakat Desa Sumber Bening yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Masyarakat desa dikoordinir oleh LMDH. LMDH bekerjasama dengan Perum Perhutani untuk pengelolaan hutan dan wisata. Untuk pengelolaan hutan, LMDH hanya menjaga jika ada yang membawa senjata untuk berburu dan *illegal logging* akan dilaporkan. Aktivitasnya kebanyakan terkait

dengan wisata pantai. LMDH baru mengelola wisata pantai jembatan panjang yang berbatasan dengan laut dan hutan. Untuk pantai Kondang Merak masih dikelola Perum Perhutani secara langsung.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat telah memasuki fase partisipatoris. Artinya pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat. Menurut Pranaka dan Priyono (1996), Fase Partisipatoris adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.

Hal tersebut juga terekam dalam kegiatan masyarakat yang telah mempunyai kesadaran untuk maju dan berkembang. Selain itu masyarakat juga telah mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana peran pemerintah seharusnya. Mereka telah tau posisinya sebagai masyarakat dan sadar serta memahami apa yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan. Tetapi dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan belum mengoptimalkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Selain masyarakat lokal yang berbasis budaya dan nilai-nilai luhur, adapula masyarakat berbasis media. Carayannis and Campbell (2009) dalam Carayannis, Bath, Campbell, (2012:5) menjelaskan bahwa masyarakat berbasis media mendukung penyebaran pengetahuan dalam negara,

(misalnya: televisi, internet, surat kabar, dan lainnya) yang berisi informasi mengenai berita, komunikasi, jaringan sosial dan lain sebagainya.

Penyebaran informasi dan pengetahuan begitu mudah dan cepat saat ini. Dengan media *online* atau *offline* berita tersebar sampai ke pelosok desa. Sama halnya dengan kawasan Kondang Merak yang telah banyak diliput oleh media koran, surat kabar dan televisi seperti TVRI nasional, Jtv, Metro tv, R tv, koran lokal malang dan media *online*. Dengan konten kritikan atau kebanggaan yang merupakan harapan agar berbenah diri masing-masing *stakeholder* yang berkegiatan di Kondang Merak. Karena media berfungsi sebagai penghubung dan penyalur aspirasi masyarakat yang tidak dengar atau diabaikan pemerintah selaku pemegang kebijakan.

Selain itu, media juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun dan mengembangkan isu-isu sosial dan lingkungan hidup atau isu publik. Dengan semakin meluas penyebaran informasi mengenai potensi, aktivitas, dan konservasi lingkungan di Kondang Merak, maka masalah Kondang Merak akan menjadi masalah bersama baik masalah lokal, regional ataupun nasional. Isu yang berkembang luas di masyarakat akan mendorong pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan hutan dan laut Kondang Merak dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini yang telah dilakukan oleh LSM Sahabat Alam dan masyarakat bekerjasama dengan media lokal, regional maupun nasional dalam bentuk *online* maupun *offline*.

Seperti yang dikatakan oleh anggota LSM Sahabat Alam yang sekaligus peneliti bahwa yang dilakukan selain penelitian dan pemberdayaan masyarakat juga *soft campaign* untuk memunculkan kebijakan agar kawasan Kondang Merak menjadi kawasan konservasi karena merupakan hutan tersisa di pesisir Kabupaten Malang yang banyak menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang dapat dilindungi, diawetkan dan dimanfaatkan secara adil dan bijaksana.

4) Pemerintah

a) Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mempunyai tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya laut dan perikanan. Sesuai dengan Peraturan Bupati No.18 Tahun 2008 tentang organisasi dan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang. Pada masyarakat pesisir Kondang Merak, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan kegiatan terkait dengan konservasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain; pembentukkan kelembagaan masyarakat, pelatihan penangkapan ikan, sosialisasi kebijakan dan peraturan serta pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan ikan.

Pembentukkan kelembagaan dilakukan dengan inisiatif masyarakat sendiri. Maksudnya kelompok nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan buatan masyarakat yang di sahkan oleh pemerintah/Dinas Kelautan dan Perikanan. Di Kondang Merak,

POKMASWAS tidak berjalan optimal melainkan yang berjalan adalah Kelompok Nelayan Karya Mina. Walaupun berbeda nama dan kelompok, tapi fungsinya tetap sama yaitu untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pelatihan dan sosialisasi penangkapan ikan dilakukan baik oleh pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Kementrian. Setiap ada pelatihan masyarakat nelayan diikutsertakan. Tapi informasi mengenai pelatihan apa saja dan keikutsertaan masyarakat nelayan Kondang Merak tidak ada. Dari hasil wawancara pelatihan yang diikuti yaitu BPSPL untuk pelatihan jenis-jenis ikan yang dilarang/punah. Proses penyampaian informasi pun kurang berjalan optimal oleh pendelagasi yang didelegasikan kelompok nelayan kepada masyarakat..

Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun adalah pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan mengirimkan proposal oleh kelompok nelayan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Bantuan biasanya berupa jaring, pancing, panel surya, solar sel dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi terhadap larangan dan peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

a) Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) selaku pengelola kawasan hutan lindung di pulau Jawa khususnya Jawa Timur di pesisir Kabupaten Malang diatur melalui Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Berdasarkan peraturan tersebut pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

- a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b) Pemanfaatan hutan;
- c) Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d) Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Perum Perhutani merupakan penanggungjawab pengelolaan hutan negara baik hutan produksi maupun hutan lindung di Pulau Jawa. Khusus hutan lindung tidak ada perencanaan dan tata kelola hutan, melainkan hanya dibiarkan tanpa ada penanganan khusus. Karena prinsip Perum Perhutani bahwa hutan lindung harus tetap lestari tanpa adanya pengelolaan.

Realita lapangan menunjukkan bahwa hutan lindung yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah semakin berkurang luasannya. Luas hutan lindung pesisir Kabupaten Malang hanya 1.989 ha yang melingkupi 6 Desa, yaitu Ds. Srigonco, Ds. Sumberbening, Ds. Bandungrejo, Ds. Tulungrejo, Ds. Banjarrejo, dan Ds. Kedungsalam serta termasuk kedalam 2 kecamatan

yaitu Kec. Bantur dan Kec. Donomulyo. Berkurang luasannya dapat terjadi dari faktor legal maupun illegal. Faktor legal merupakan penggunaan dan pengelolaan hutan lindung atau produksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010. Sedangkan faktor illegal merupakan aktivitas masyarakat/pemerintah terkait hutan lindung dengan tidak mengikuti aturan hukum seperti *illegal logging*, perburuan fauna endemik, penggantian fungsi lahan dari hutan lindung menjadi hutan produksi secara illegal dan hal lainnya yang melanggar aturan hukum. Pengawasan dan pengamanan faktor illegal yang harus diperketat dan faktor legal yang harus ditinjau kembali. Perencanaan dan tata kelola hutan lebih banyak diarahkan kepada hutan produksi dan sektor pariwisata pantai sekitar hutan lindung.

Berdasarkan penelitian di lapangan, Perum Perhutani melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan terkait konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu perencanaan pengelolaan hutan produksi dan wisata pantai, pengamanan hutan, sosialisasi ke masyarakat dan kerjasama dengan berbagai instansi dan masyarakat.

Kegiatan pengamanan meliputi patroli di hutan lindung maupun produksi. Patroli di hutan lindung tidak rutin tergantung pada kondisi lapangan. Pengamanan hutan juga melibatkan peran serta masyarakat. Melalui kelompok masyarakat binaan Perum Perhutani yaitu LMDH, masyarakat diikutsertakan secara langsung dan tidak langsung menjaga fungsi hutan. Secara langsung artinya dengan pengawasan dan pengamanan

nyata yang dilakukan masyarakat. Sedangkan tidak langsung melalui perjanjian-perjanjian untuk menjaga hutan agar lestari. Hal ini tertuang dalam perjanjian MOU antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perjanjian ini berupa bentuk pengamanan, bagi hasil produksi dan lainnya.

Selain pengamanan, kegiatan lainnya yaitu sosialisasi melibatkan berbagai instansi *stakeholder* dan masyarakat. Sosialisasi dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung artinya sosialisasi dapat berbentuk formal seperti forum rapat dengan masyarakat atau berbentuk non formal seperti diskusi dan tanya jawab langsung di lapangan. Sosialisasi dilakukan di berbagai lokasi dan desa yang berdampingan dengan hutan lindung.

Pemerintah yang berinteraksi di kawasan Kondang Merak ada dua; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan Perum Perhutani. Analisis mengenai aktivitas pemerintah menurut Dwipayana dan Eko, (2003:14) menjelaskan bahwa pemerintah bertugas merumuskan rangkaian tujuan proses memerintah. Sebagai institusi yang berwenang mengalokasikan nilai-nilai ke dalam masyarakat, pemerintah memainkan peranan merumuskan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan tuntutan dari masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan, terutama bertanggungjawab dalam hal hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam arena masyarakat yang kompetitif

dan kompleks, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai aktor-aktor politik dan ekonomi dalam masyarakat. Dari pendapat tersebut dapat dibagi menjadi tiga point, pertama; pemerintah memainkan peranan merumuskan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan tuntutan dari masyarakat, kedua; pemerintah juga bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan, terutama bertanggungjawab dalam hal hasil dan dampaknya terhadap masyarakat, ketiga; Dalam arena masyarakat yang kompetitif dan kompleks, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai aktor-aktor politik dan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dan hasil penelitian, menerangkan beberapa hal. Pertama pembahasan akan diawali dengan ‘perumusan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan tuntutan dari masyarakat’. Dinas Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam menyusun perumusan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terekam dari pendapat masyarakat kampung nelayan mengenai kebutuhan yang diperlukan dengan kebijakan/bantuan yang diberikan. Dinas Kelautan dan Perikanan setiap memberikan bantuan berupa alat tangkap dan lainnya selalu tidak sesuai kebutuhan masyarakat, maksudnya dari segi kualitas yang buruk ataupun diberikannya alat yang tidak dibutuhkan. Begitupun dengan Perum Perhutani, belum optimal dalam merumuskan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan tuntutan dari masyarakat. Hal ini terekam dari masyarakat yang tergabung dalam LMDH Sumber Bening yang

mengungkapkan bahwa terlalu berat bagi hasil antara LMDH dengan Perum Perhutani yang semua sumber daya baik rill maupun materil dilimpahkan kepada pihak LMDH. Serta harapan dan keinginan masyarakat untuk berbicara secara baik dan rutin dengan pemerintah (Perum Perhutani dan Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam hal kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk pembangunan.

Pembahasan kedua mengenai ‘pemerintah juga bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan, terutama bertanggungjawab dalam hal hasil dan dampaknya terhadap masyarakat’. Dinas Kelautan dan Perikanan belum optimal dalam hal implementasi dan tanggung jawab terhadap hasil dan dampaknya. Monitoring hasil pemberian bantuan dan pendampingan masyarakat kampung nelayan masih kurang. Karena menurut pendapat masyarakat kampung nelayan, bantuan yang dikirim tidak termonitor dari segi kualitasnya serta kurang pendampingan penggunaan alat dan kelembagaan kelompok masyarakatnya. Selain itu sosialisasi yang dilakukan pun kurang bermanfaat untuk masyarakat karena hanya sekali atau dua kali dalam setahun mengenai kebijakan, peraturan ataupun program dan kegiatan. Sedangkan Perum Perhutani dalam implementasi dan tanggung jawab terhadap hasil dan dampaknya cukup optimal. Hal ini terlihat dari pendampingan yang dilakukan Perum Perhutani kepada LMDH dari segi wisata. Tetapi mengenai hasil dan dampak dari pengelolaan hutan lindung belum optimal, karena tidak ada rencana yang jelas terkait pengelolaan hutan

lindung dan pantai dan berakibat tidak ada implementasi serta monitoring dan evaluasi yang jelas pula.

Pembahasan ketiga mengenai ‘dalam arena masyarakat yang kompetitif dan kompleks, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai aktor-aktor politik dan ekonomi dalam masyarakat. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dan Perum Perhutani dalam merumuskan kebijakan juga harus melihat faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini yang kurang diperhatikan karena pengelolaan usaha yang dilakukan di masyarakat pesisir kampung nelayan maupun wilayah wisata pantai Kondang Merak belum tertata dengan baik. Selain masyarakat kampung nelayan yang kurang di akomodir dalam pengembangan pengelolaan hasil tangkap laut, penataan warung dan sewa alat snorkeling juga belum tertata baik. Artinya masyarakat saling mencari keuntungan tanpa adanya kebijakan dari segi ekonomi.

c. Bentuk Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Stakeholder yang terkait dengan konservasi laut dan hutan Kondang Merak ada 6 yaitu Perum Perhutani, Dinas Kelautan dan Perikanan, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, kelompok masyarakat karya mina,

LMDH Sumber Bening. *Stakeholder* yang beraktivitas ke konservasi laut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, kelompok masyarakat karya mina dan LSM Sahabat Alam. Sedangkan *stakeholder* yang beraktivitas ke konservasi hutan yaitu Perum Perhutani, LMDH Sumber Bening dan LSM Sahabat Alam. Berikut merupakan bagan sinergi antar *stakeholder*.

Parameter sinergi menurut Doctoroff dalam Tschacher (1992:359), persyaratan utama bagi suatu sistem yang sinergi adalah:

- e) Kepercayaan, dengan adanya kepercayaan diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat tercipta sinergi karena dengan kepercayaan akan menimbulkan perasaan nyaman dan tidak menimbulkan kecurigaan.
- f) Komunikasi yang efektif, harus adanya komunikasi yang efektif diantara pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada pesan yang salah diartikan.
- g) *Feedback* yang cepat, ada *feedback* yang cepat supaya diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat mengetahui respon dari pihak lain secara cepat.
- h) Kreativitas diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkuat sinergi yang telah terjalin dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dinilai dapat menghancurkan sinergi itu sendiri.

Konservasi alam di Kondang Merak dibagi menjadi dua bagian, yaitu konservasi laut dan konservasi hutan. Artinya masing-masing *stakeholder* masih mengurus apa yang menjadi bidangnya tanpa melibatkan bidang lainnya. Belum ada keterpaduan hubungan dalam suatu kawasan yang membentuk suatu interaksi. Parameter tersebut dianalisis untuk menempatkan tingkatan hubungan antar stakeholder berdasarkan tingkatan sinergi menurut English (2005:48) meliputi :

- 1) *Defensive*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang rendah akan menimbulkan pola hubungan komunikasi kerja sama yang bersifat pasif atau hati-hati.

a) Perum Perhutani dengan LSM Sahabat Alam

Perum Perhutani merupakan BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan lindung Kondang Merak. Sedangkan SALAM merupakan LSM yang bergerak di bidang konservasi. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya parameter sinergi yang baik yaitu kepercayaan yang kurang baik dari LSM Sahabat Alam terhadap Perum Perhutani juga sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif karena tidak adanya rasa saling percaya dan tidak adanya MOU atau perjanjian antara LSM Sahabat Alam dengan Perum Perhutani, *feedback* yang lama atau *slow respon* dan tidak adanya kreatifitas karena ego masing-masing instansi atau lembaga yang tinggi.

Hal ini terjadi karena perbedaan dasar ideologi. LSM Sahabat Alam merupakan LSM yang bergerak dibidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat sedangkan Perum Perhutani merupakan BUMN yang mengelola dan memanfaatkan hutan untuk mendapatkan keuntungan walaupun tetap menggunakan kaidah konservasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu terkadang

timbul masalah jika adanya pemberian izin dan kegiatan pembukaan lahan hutan guna pembukaan jalan dan tempat wisata.

b) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Nelayan Karya Mina

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya laut dan perikanan. Hasil penelitian, menjelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yaitu pembentukan kelembagaan masyarakat, pelatihan penangkapan ikan, sosialisasi kebijakan dan peraturan serta pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan ikan. Dalam setiap kegiatan tersebut masyarakat pesisir diikutsertakan. Masyarakat pesisir mempunyai Kelompok Nelayan Karya Mina yang berkoordinasi dengan pemerintah.

Setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ada tindak lanjut nyata dan pendampingan terkait kebijakan, sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok nelayan dan masyarakat pesisir. Barang bantuan yang diberikan banyak yang tidak digunakan karna tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang, komunikasi tidak efektif karna tidak ada tindak lanjut dari kegiatan pemerintah dan *feedback* yang lama dari pemerintah mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- 2) *Respectful*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan yang baik memunculkan suatu pola komunikasi diantara pihak yang bekerja sama bersifat saling menghargai.

a) LSM Sahabat Alam dengan LMDH Sumber Bening

LSM Sahabat Alam dengan LMDH Sumber Bening memasuki tahap *respectful*. Artinya masing-masing saling percaya dan bekerjasama. Hal ini terekam dari kegiatan bersama yang dilakukan oleh LSM Sahabat Alam, LMDH dan perangkat desa saat melakukan studi banding pengelolaan wisata di pantai-pantai pesisir malang. Selain itu, komunikasi yang berjalan pun efektif dilihat dari komunikasi yang dihasilkan dua arah dan saling memberi masukan dan dukungan.

LSM Sahabat Alam dengan dasar kegiatan pemberdayaan masyarakat otomatis merangkul masyarakat desa khususnya yang tergabung dalam LMDH Sumber Bening. Take and give yang berjalan sudah terlihat dari adanya tanggapan dan kegiatan bersama oleh keduanya.

b) LMDH Sumber Bening dengan Perum Perhutani

Antar lembaga ini saling bekerjasama dan percaya masing-masing. Dalam hal ini Perum Perhutani sebagai pengelola hutan lindung membuat suatu perjanjian atau MOU mengenai pengelolaan hutan dan wisata. Perjanjian ini dilakukan antara Perum Perhutani

dengan LMDH Sumber Bening untuk menjalin kerjasama pengelolaan hutan dan pantai. Dari hal tersebut telah ada komunikasi dua arah antara masing-masing instansi.

Perjanjian dilakukan secara global terlebih dahulu, kemudian di khususkan pada pengelolaan kayu di hutan produksi dan wisata pantai di kawasan pantai. Untuk pantai Kondang Merak saat ini masih murni pengelolaan Perum Perhutani. LMDH masih belum berani untuk mengelolanya. Untuk itu, Perum Perhutani mempunyai kewajiban untuk memberdayakan dan mendampingi masyarakat.

Dalam hal kepercayaan dirasa masih kurang, hal ini terkait dengan keluhan dan tuntutan dari masing-masing lembaga yang tidak terakomodir dalam perjanjian. LMDH mengeluhkan masalah beban kerja dan bagi hasil yang tidak adil, sedangkan Perum Perhutani mengeluhkan kerja yang kurang optimal dari LMDH dalam mengelola hutan dan wisata.

c) *Aspinal Foundation* dengan Perum Perhutani

Aspinal Foundation merupakan LSM yang bergerak di bidang konservasi. Khususnya pelepasliaran lutung ke habitat asalnya di Pulau Jawa. *Aspinal Foundation* telah bekerjasama dengan Perum Perhutani dengan suatu MOU kerjasama kedua belah pihak. Sebelum kerjasama dengan Perum Perhutani *Aspinal Foundation* membuat MOU terlebih dahulu dengan kementerian kehutanan dikarenakan

Aspinal Foundation merupakan lembaga dari luar negeri yang berkegiatan di Indonesia dengan tema konservasi.

Kerjasama dilakukan dengan komunikasi yang baik antar dua instansi. Kendalanya ketika Perum Perhutani melakukan pergantian petugas lapangan maka pihak *Aspinal Foundation* harus mengulang kembali dan member pemahaman mengenai konservasi lingkungan dan kawasan Kondang Merak kepada petugas lapangan yang baru. Menurut ketua *Aspinal Foundation* Jawa Timur itu hanya persoalan teknis yang sering terjadi tidak hanya dengan Perum Perhutani tapi juga pemerintah.

d) LSM Sahabat Alam dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepercayaan dan kerjasama yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada LSM Sahabat Alam terlihat dari dipermudahkannya perizinan dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dinas terbantuan dengan adanya LSM Sahabat Alam. Komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik antar lembaga/instansi ini.

Hal tersebut terekam dari wawancara dengan ketua LSM Sahabat Alam bahwa setiap melakukan aktivitas di laut seperti, penanaman mangrove dan terumbu karang LSM Sahabat Alam selalu mengajak pemerintah untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan LSM Sahabat Alam pihak Dinas selalu hadir dalam acara tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisir dan laut.

- 3) *Synergistic*. Tingkat kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerja sama yang terjalin akan menghasilkan “*output*” yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak.

- a) LSM Sahabat Alam dengan Kelompok Nelayan Karya Mina

Antara LSM Sahabat Alam dengan masyarakat ataupun Kelompok Nelayan Karya Mina telah terjadi *synergistic*. Dilihat dari kepercayaan dan komunikasi yang diberikan kedua belah pihak. LSM Sahabat Alam mulai melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakatnya tahun 2010 dengan pendekatan etnografi, maksudnya berbaur dengan masyarakat. Bisa diterima baik dan telah terlihat perubahan di tahun 2013. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat mengenai konservasi telah ada.

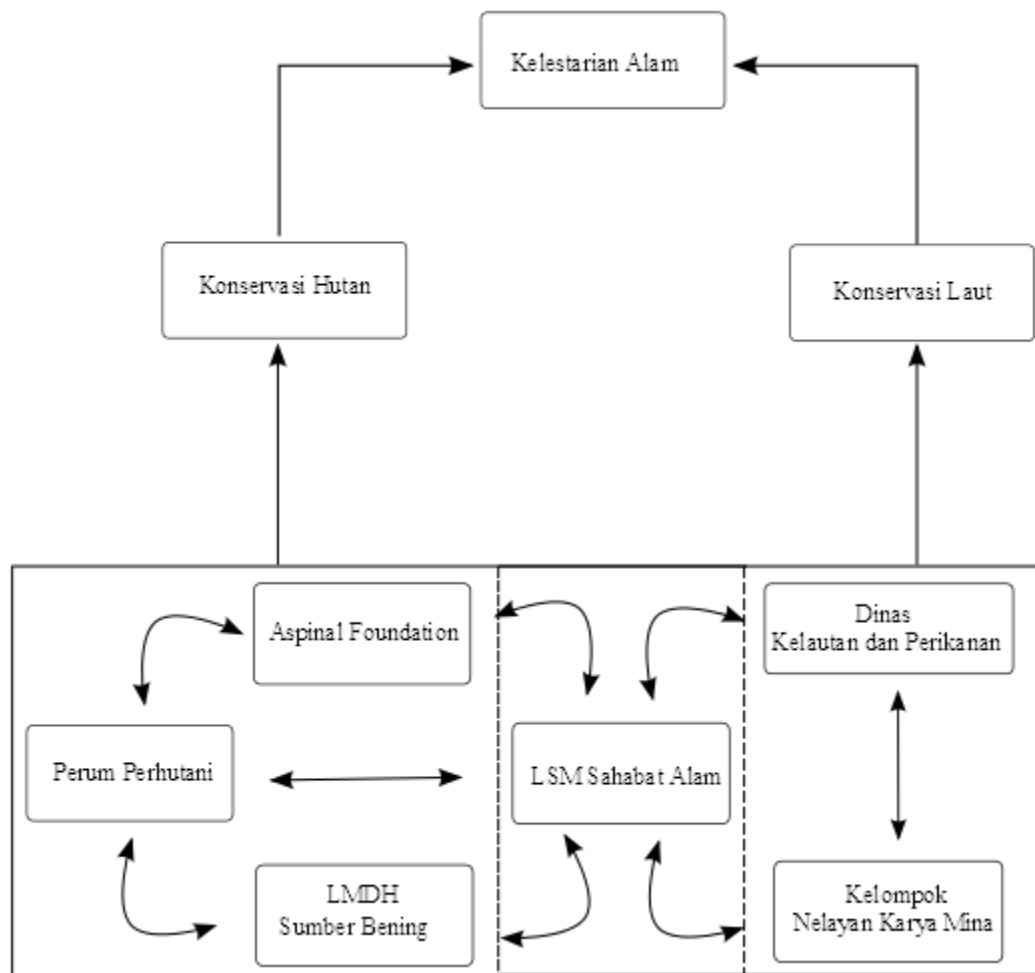
Hubungan keduanya menghasilkan output yang lebih besar dari keluaran masing-masingnya. Terekam dari kebiasaan masyarakat yang dahulunya perusak alam menjadi pejuang atau penjaga alam. Selain itu, penangkapan ikan yang ramah lingkungan, alternatif pekerjaan yang lebih baik dan lainnya. Kedua belah pihak pun

mendapatkan keuntungan dari hubungan yang terjalin seperti baiknya kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

b) LSM Sahabat Alam dengan *Aspinal Foundation*

Dengan kesamaan dasar ideologi yaitu konservasi lingkungan untuk kelestarian alam kepercayaan dan komunikasi yang saling menguntungkan terjalin. Hasil yang diperoleh dari hubungan ini adalah terjaga dan terpantaunya kondisi hutan lindung.

Kedua belah pihak mempunyai *basic* yang sama yaitu konservasi lingkungan jadi terdapat hubungan yang saling menguntungkan dari interaksi keduanya. Saling melengkapi satu sama lain terjadi antar LSM ini. Output besarnya adalah terjaganya hutan lindung karena masing-masing kepentingan yang menjadi satu.



Gambar 17. Bentuk Sinergitas Stakeholder dalam Konservasi lingkungan di Kondang Merak

Berdasarkan analisis *quintuple helix*, menurut carayannis, Barth, Campbell, (2012:4), *quintuple helix* merupakan model yang menyeluruh dan mengkhususkan pada sejumlah interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan dalam bernegara untuk mempromosikan dan memvisualisasikan sistem kerjasama dalam ilmu pengetahuan, keluaran pengetahuan, dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Artinya dalam *quintuple helix* diperlukan

unsur-unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain melalui pertukaran pengetahuan dan informasi yang akan membentuk suatu sistem atau model.

Adanya interaksi satu sama lain dari masing-masing unsur/subsistem diperlukan. Dari kelima subsistem yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan alam, masyarakat berbasis media dan budaya, serta politik, seluruhnya mempunyai kedudukan yang sama sebagai *stakeholder*. Hubungan dan interaksi dari masing-masing subsistem ataupun *stakeholder* belum sepenuhnya baik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat tingkatan hubungan dalam *stakeholder* yaitu *defensive*, *respectful* dan *synergistic* (English,2005:48) yang terjadi antar subsistem dan antar *stakeholder*. Hubungan yang baik adalah *synergistic* yaitu kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerja sama yang terjalin akan menghasilkan “*output*” yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Muluk (2007:312-313) bahwa sinergi memunculkan kekuatan yang dihasilkan oleh keseluruhan unsur tersebut. Kekuatan ini lebih besar dari sekedar penjumlahan unsur tersebut. Sinergi ditentukan oleh interaksi antarunsur tersebut. Interaksi berarti pengikat atau penghubung antarunsur. Dari hal tersebut perlunya interaksi yang menimbulkan sinergi untuk memunculkan kekuatan yang besar.

Kekuatan yang besar maksudnya adalah kerja sama yang terjalin akan menghasilkan “*output*” yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak. Jika dikaitkan dengan *stakeholder* dalam *quintuple helix*, seluruh subsistem yang didalamnya terdapat *stakeholder* atau sistem tersendiri harus memiliki sinergi dari masing-masingnya.

Dalam *quintuple helix*, interaksi lebih menekankan kepada pertukaran pengetahuan. Artinya masing-masing dari subsistem yang didalamnya terdapat *stakeholder* menerima dan mengeluarkan sebuah pengetahuan untuk sirkulasi pengetahuan dari seluruh subsistem. Pertukaran pengetahuan ini yang menghubungkan *stakeholder* satu dengan yang lainnya.

Pertama, sistem pendidikan memasukkan pengetahuan baru dari lingkungan keseluruhan, tempat penelitian, objek penelitian yang baru. Hal tersebut di olah (*create of knowledge*) menjadi sebuah keluaran bagi pengetahuan berupa kemampuan dari peneliti baik LSM atau universitas untuk sirkulasi pengetahuan dan informasi mengenai aktivitas *stakeholder* dan lingkungannya secara keseluruhan. Dengan kompleksnya kawasan Kondang Merak dengan *stakeholder* dan lingkungan ekosistemnya perlu adanya pembaharuan dan pengembangan keilmuan dan pengetahuan dari sistem pendidikan. Mengingat bahwa sistem pendidikan merupakan awal mula pengembangan keilmuan dan pengetahuan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, sistem ekonomi mendapat masukan dari pengetahuan adalah ide, gagasan dan nilai dari pemanfaatan alam yang berkelanjutan. Artinya perekonomian akan timbul dari masukan pengetahuan tersebut yang nantinya diolah (*create of knowledge*) menjadi keluaran pengetahuan baru yaitu alternatif pekerjaan selain nelayan seperti pembukaan tempat wisata, warung makan dan jasa persewaan alat snorkeling. Selain itu juga seharusnya dengan masukan dari pengetahuan dapat memperbaiki dan memvariasikan perekonomian. Seperti yang variasi perdagangan dan jasa yang dijual dan manajemen yang baik dalam pengelolaan wisata dan usaha lainnya.

Ketiga, sistem lingkungan alam mempunyai masukan dari pengetahuan adalah konservasi lingkungan. Artinya dalam konservasi menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjelaskan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: 1.) perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2.) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 3.) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. Hal itu menjadi masukan untuk mengelola lingkungan alam untuk diolah (*create of knowledge*) menjadi suatu keluaran pengetahuan mengenai konservasi hutan lindung dan laut.

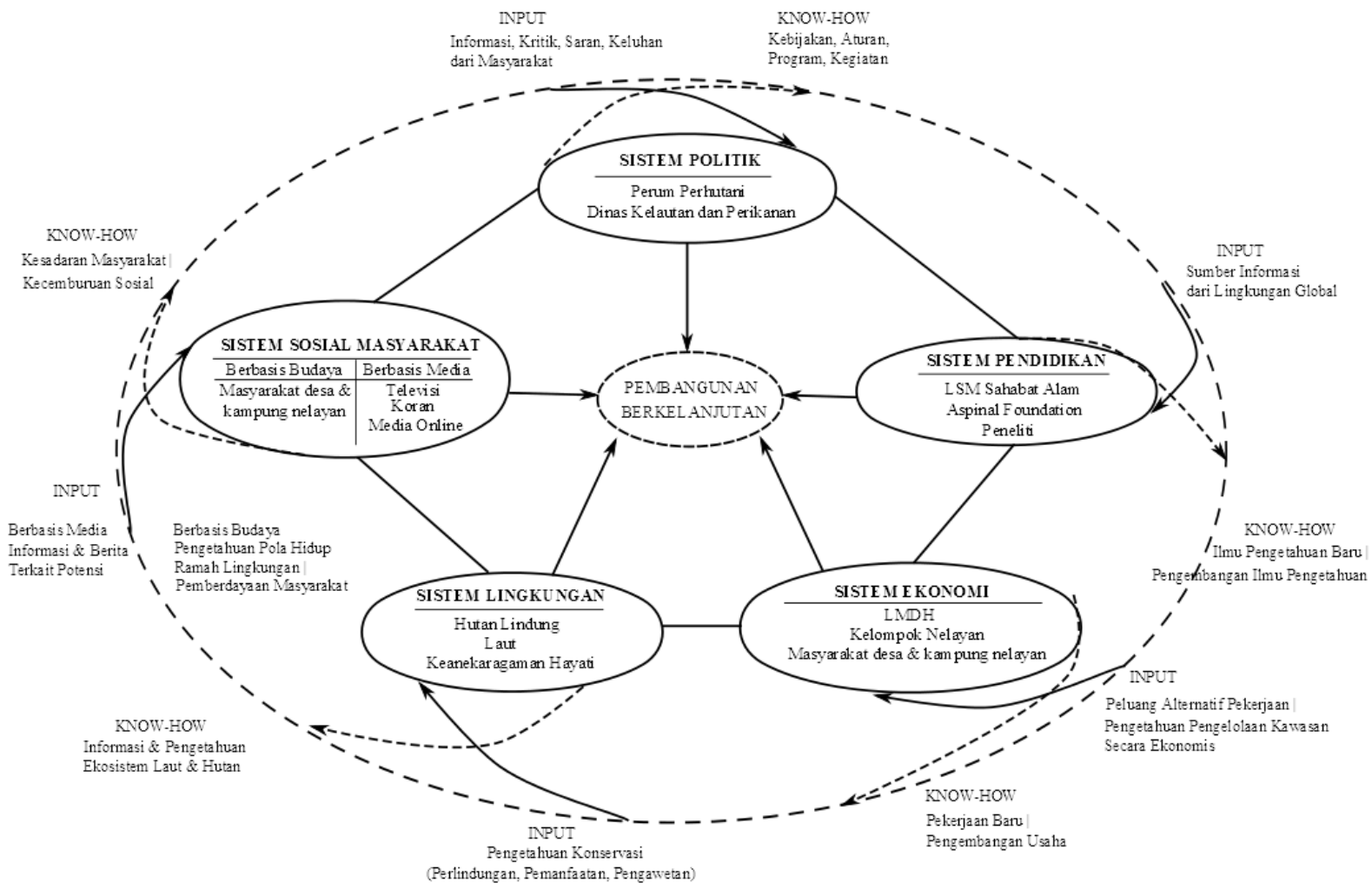
Keempat, sistem masyarakat berbasis media mendapatkan masukan pengetahuan berupa informasi dan berita mengenai aktivitas *stakeholder* dan

lingkungan di Kondang Merak, yang diolah (*create of knowledge*) menjadi informasi yang siap di sebarluaskan. Selain itu juga ada masyarakat berbasis budaya yang mendapat masukan pengetahuan berupa informasi dan pemahaman mengenai konservasi dan kebiasaan yang ramah lingkungan yang diolah (*create of knowledge*) menjadi kebiasaan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat berbasis media sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang berkepentingan jika ingin menyebarkan berita. Hal ini yang membuat salah satu hubungan antar instansi kurang komunikasi dan percaya karena pemberitaan yang menjatuhkan salah satu pihak. Untuk masyarakat berbasis budaya, kurangnya pengelolaan sampah di kampung nelayan menyebabkan lingkungan yang kotor. Sampah hanya dibakar yang makin lama akan merusak ekosistem. Untuk itu perlu adanya pengelolaan sampah yang baik.

Kelima, sistem politik menerima masukan dari pengetahuan berupa opini, keluhan masyarakat, saran, dan informasi. Pengetahuan yang diolah (*create of knowledge*) menjadi sebuah keluaran pengetahuan berupa ide dan gagasan baru, solusi, kebijakan, program kegiatan dan peraturan yang belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pengetahuan dan lingkungan. Masukan yang baik belum tentu mengeluarkan hasil yang baik pula hal ini berdasarkan bagaimana pengelolaan informasi dan pengetahuan dan ideologi serta kepentingan yang melandasinya. Pemerintah sebaiknya

memperhatikan dan memahami masukan dari sirkulasi pengetahuan agar terciptanya keluaran dan inovasi yang baik.

Dilihat dari sirkulasi pengetahuan yang menghubungkan antar subsistem, penciptaan pengetahuan dan keluaran pengetahuan, masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan masing-masing subsistem atau *stakeholder* yang ada didalam *stakeholder* belum bisa memanfaatkan sirkulasi pengetahuan secara baik sebagai masukan dan penciptaan pengetahuan baru. Faktor lain adalah masih tingginya ego sektoral atau kepentingan masing-masing instansi dalam mengelola pembangunan. Ego sektoral ini muncul akibat perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain. Misalnya LSM yang selalu menitikberatkan aspek lingkungan dan masyarakat dalam pengelolaan tetapi pemerintah atau perusahaan negara hanya mementingkan penyelesaian tugas dan keuntungan. Selain itu kurangnya interaksi yang menghasilkan sinergi antar aktor merupakan faktor penting dalam hubungan yang baik. Sinergi ini dapat muncul dengan koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam hubungan pembangunan. Hal yang menyebabkan sinergi juga dari kepercayaan, komunikasi yang efektif, kreativitas, dan *feedback* yang baik. Sejalan dengan hal tersebut Carayannis and Campbell (2010:58–62) menjelaskan kualitas manajemen yang baru untuk lebih berkelanjutan tergantung pada penciptaan pengetahuan (*creation of knowledge*), keluaran untuk pengetahuan (*know-how*) dan keseimbangan inovasi dengan alam.



Gambar 18. Model *Quintuple Helix* di Kondang Merak

d. Faktor yang Berpengaruh pada Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan

1) Faktor Pendukung

Pada sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan, terdapat faktor yang mendukung terjadinya sinergitas dalam konservasi lingkungan. Faktor pendukung merupakan faktor positif yang terjadi dalam hubungan antar *stakeholder*. Adapun faktor pendukung sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan sebagai berikut:

a) Adanya perjanjian atau *momerendum of understanding* (MOU) antar instansi /lembaga

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah selaku penanggungjawab menjamin keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan melalui perjanjian yang adil. Perjanjian ini diketahui dan dipahami dari masing-masing *stakeholder* yang bekerjasama mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan kedepannya.

Perjanjian atau MOU bersifat terikat dan memaksa karena hal ini merupakan legal secara hukum. Untuk itu setiap aktivitas selalu berkaitan dengan perjanjian tersebut. Idealnya perjanjian dilakukan dari lembaga/instansi yang mengelola dengan pendatang. Tujuannya agar segala aktivitas terpantau dan saling menguntungkan. Dalam hal ini perjanjian dilakukan oleh Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation* dan antara Perum Perhutani dengan LMDH Sumber Bening. Dengan

adanya perjanjian tersebut tugas dan wewenang dari masing-masing aktor yang saling bekerjasama dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pengelolaan kawasan Kondang Merak.

b) Dukungan dari pemerintah dan LSM

Dinas Kelautan dan Perikanan serta Perum Perhutani sebagai pemerintah telah memberikan kebijakan dan aturan mengenai pengelolaan kawasan. Dinas Kelautan dan Perikanan yang berfokus pada kelautan dan kelompok nelayan telah melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, memberikan pelatihan-pelatihan mengenai penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pemberian bantuan alat tangkap. Perum Perhutani yang berfokus pada pengelolaan hutan lindung, pantai dan LMDH telah mengadakan sosialisasi, pendampingan kelembagaan dan patroli hutan.

Hal ini sependapat dengan Dwipayana dan Eko (2003:14) bahwa pemerintah memainkan peranan merumuskan kebijakan publik berdasarkan keinginan dan tuntutan dari masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan, terutama bertanggungjawab dalam hal hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.

LSM yang ada di Kondang Merak yaitu LSM Sahabat Alam dan *Aspinal Foundation* telah melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan kepada masyarakat, pengamanan hutan dan laut, dan

penelitian flora dan fauna di hutan dan laut Kondang Merak. LSM mempunyai peranan penting dalam pengelolaan pembangunan. Pentingnya keterlibatan NGO dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1996), bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, seperti LSM baik lokal maupun nasional, mempunyai potensi dan peran besar pemberdayaan masyarakat. NGO dapat juga menjalankan fungsi sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah.

c) Kesadaran masyarakat mengenai konservasi dan kelestarian lingkungan

Masyarakat kampung nelayan Kondang Merak telah mengerti bagaimana memperlakukan alam demi keberlanjutan. Kesadaran ini diterapkan dalam kegiatan sehari-hari mereka, terlebih dalam profesi mereka sebagai nelayan. Otomatis konservasi lingkungan telah menjadi dasar masyarakat dalam kegiatan dan tau harus melakukan apa agar terciptanya kelestarian alam.

Menurut Muhammad (2012:133-134) menjelaskan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat ditujukan untuk meyakinkan masyarakat kepada masyarakat pantai khususnya nelayan akan manfaat jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus dilibatkan pada identifikasi, perancangan

dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 pasal 46 ayat 1 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan dilakukan dengan pembinaan masyarakat.

Hal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya kesadaran masyarakat mengenai konservasi dan kelestarian alam melalui pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat ataupun akademisi). Hal ini telah dilakukan masyarakat pesisir kampung nelayan Kondang Merak. Akan tetapi dari masyarakat desa yang secara khusus di kelompokkan ke dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) belum sepenuhnya sadar akan konservasi dan kelestarian lingkungan khususnya mengenai hutan, pantai dan laut. Dengan demikian ini merupakan tanggung jawab *stakeholder* terkait dalam pembinaan dan pendampingan masyarakat baik itu masyarakat pesisir dengan Kelompok Nelayan Karya Mina ataupun masyarakat secara umum dengan LMDH Sumber Bening.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan penyebab negatif munculnya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan, masih banyak terdapat hambatan dari

masing-masing instansi atau lembaga terhadap lembaga lainnya ataupun dari pemerintah ke masyarakat dan pemerintah ke LSM. Berikut merupakan faktor penghambat sinergitas *stakeholder* dalam konservasi lingkungan, yaitu:

a) Pemahaman aktor dalam perjanjian kerjasama terbatas serta minim pengetahuan konservasi lingkungan

Ketidakpahaman tugas dalam perjanjian antara LMDH dengan Perum Perhutani dan Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation*. Antara LMDH dengan Perum Perhutani berkaitan dengan tidak dijalankannya tugas untuk menjaga hutan dan keinginan LMDH untuk langsung melakukan bagi hasil usaha. Sedangkan Perum Perhutani dengan *Aspinal Foundation* berkaitan dengan kurangnya pemahaman petugas lapang Perum Perhutani mengenai konservasi yang berdampak dan tidak mengertinya perjanjian antara dua lembaga tersebut. Petugas Perum Perhutani setiap 5 tahun sekali di gilir atau diganti dengan yang baru. Hal ini menjadi diulangnya komunikasi dan koordinasi mengenai konservasi hutan lindung. Begitu pun dengan petugas lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak mengerti apa itu terumbu karang dan larangan memburu dan mengkonsumsi hiu. Hal ini karena terbatasnya pemahaman petugas lapang mengenai fungsi-fungsi dan aturan pengelolaan ekosistem laut.

Artinya pemahaman fungsi, tugas dan tanggung jawab perlu ditingkatkan dan di sinergikan dalam pengelolaan kawasan Kondang Merak yang berkelanjutan. Masyarakat, pemerintah dan LSM harus mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan kaidah masing-masing. Sesuai dengan pendapat dari Carayannis, Barth, Campbell (2012:5) bahwa "Inovasi Ekosistem," menggabungkan dan mengintegrasikan sistem sosial dan alam serta lingkungan, menekankan pentingnya pluralisme keanekaragaman suatu agen (manusia), aktor, dan organisasi: universitas, usaha kecil dan menengah, dan perusahaan-perusahaan besar, diatur sepanjang jaringan inovasi yang heterogen dan pengetahuan tiap subsistem.

Masing-masing *stakeholder* harus mengetahui tugas fungsi dan kegiatan yang dilakukan dengan berlandaskan aturan normatif dan teori konservasi lingkungan agar terciptanya keterpaduan dan keselarasan tujuan antar stakeholder serta kelestarian alam. Karena dari segi pembangunan aspek ekologis menjadi titik tekan dalam suatu pembangunan.

b) Minimnya kepercayaan dan komunikasi yang baik antar aktor

Faktor penghambat ini menjadi faktor dalam terciptanya sinergi antar instansi. Perum Perhutani dengan LSM Sahabat Alam, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Nelayan Karya Mina

merupakan hubungan dengan minimnya kepercayaan dan komunikasi dalam setiap kegiatan dan aktivitas. Sehingga terjadi konflik dan ketidakpercayaan satu sama lain. Berkaitan juga mengenai tugas dan tanggung jawab serta penyatuan tujuan mengenai kelestarian hutan dan laut.

Beberapa parameter sinergi menurut Doctoroff dalam Tschacher (1992:359), persyaratan utama bagi suatu sistem yang sinergi adalah kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan diantara pihak-pihak yang bekerjasama dapat tercipta sinergi karena dengan kepercayaan akan menimbulkan perasaan nyaman dan tidak menimbulkan kecurigaan serta dengan komunikasi yang efektif, harus adanya komunikasi yang efektif diantara pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada pesan yang salah diartikan.

Berdasarkan hasil dilapangan hal ini berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan tidak sesuai ataupun tidak berdasarkan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan yang berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Akibat perbedaan pemahaman, tujuan dan kinerja yang dilakukan masing-masing *stakeholder* menyebabkan konflik antar pelaku atau aktor dalam pengelolaan kawasan Kondang Merak. Perlu adanya kesamaan visi atau tujuan dan pemahaman dalam pengelolaan kawasan seperti yang disampaikan oleh Senge (1990) menyatakan bahwa dalam kondisi ketidak

bersamaan arah akan banyak energi yang terbuang. Sebaliknya, bila terjadi suatu kesamaan arah maka energi yang dimiliki bersama akan membentuk harmoni dan sinergi. Sinergi akan berkembang bila dikondisikan oleh kesamaan tujuan, dan visi bersama (*shared vision*). Visi bersama adalah awal untuk memungkinkan orang yang belum saling percaya untuk mulai bekerjasama. Visi bersama ini dijelaskan oleh Senge sebagai *‘the most basic level of commonality’*.

Berdasarkan hal tersebut di Kondang Merak harus menciptakan sebuah sinergi dalam hubungan antar aktor. Mengurangi ego dan kepentingan masing-masing instansi dan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif perlu dilakukan antar aktor dalam pembangunan. Hal yang diperlukan dalam keterpaduan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk di pesisir dan lautan menurut Muhammad (2012:128-129) bahwa salah satu dilakukan pada tataran koordinasi, disyaratkan perlunya kerjasama yang harmonis antara *stakeholder* (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

c) Tidak adanya *blueprint* pengelolaan kawasan Kondang Merak

Dalam formulasi dan penetapan kebijakan, perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pantai dan laut yang berdasarkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut yang tidak ada pada kawasan Kondang Merak. Di satu sisi masyarakat desa yang terlibat dalam LMDH, merumuskan sendiri konsep pengelolaan wisata

hutan dan pantai. Tetapi di satu sisi pengelolaan wisata pantai, pengelolaan masyarakat, pengelolaan hutan lindung dan pengelolaan laut belum terencana pengelolaannya. Pantai Kondang Merak hanya dijadikan wisata alam saja tanpa adanya konsep jangka panjang yang dianalisis dari potensi yang ada. Sehingga pantai Kondang Merak terlihat tidak tertata dan kurang pengelolaan dengan serius oleh Perum Perhutani.

Dalam implementasi, keluhan LMDH kepada Perum Perhutani mengenai bagi hasil dan aktivitas yang dilakukan tidak seimbang. LMDH yang tidak mempunyai modal dan kapasitas yang memadai untuk pengelolaan wisata, harus dengan usaha sendiri sedangkan bagi hasil yang dilakukan 60% Perum Perhutani, 30% LMDH dan 10% Desa dan lembaga penegakkan hukum. Hal tersebut memberatkan masyarakat.

Sedangkan keluhan masyarakat pesisir kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta butuhnya pendampingan yang optimal dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dari pendapat masyarakat atau keluhan masyarakat dalam implementasi program dan kebijakan terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan keperluan masyarakat. Seharusnya sesuai dengan apa yang dikatakan Muhammad (2012:128-129) bahwa salah satu keterpaduan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk di pesisir dan

lautan dilakukan pada tataran konsultatif yaitu segenap aspirasi dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat ataupun yang terkena dampak pembangunan di wilayah pesisir hendaknya diperhatikan sejak tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan

Dalam monitoring dan evaluasi, minimnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aktivitas yang dilakukannya seperti pemberian bantuan alat tangkap, pelatihan, sosialisasi, pengelolaan wisata berdampak kepada sia-sia aktivitas yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan pembangunan yang harapannya mencapai kemajuan menjadi stagnan bahkan kemunduran.

2. Dampak Sinergitas *Stakeholders* dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

a. Dampak dari Segi Ekonomi

Secara umum yang dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) adalah dalam pengertian mempertahankan kapital atau menjaga agar kapital (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan (Dieren, 1995 dalam Asdak, 2012:41). Hal ini juga mempunyai pesan tersirat bahwa modal lingkungan alam tidak boleh dirusak ataupun hilang karena berkaitan dengan modal ekonomi. Asdak (2012:39) juga menambahkan bahwa keseluruhan proses dalam

implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Atas dasar tersebut perekonomian diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.

1) Peningkatan Penghasilan Perekonomian

Dari hasil penelitian peningkatan pendapatan masyarakat kampung nelayan Kondang Merak meningkat. Hal ini diketahui dari peningkatan hasil tangkap ikan melalui rumpon bertambah. Sebelum menggunakan rumpon hasil tangkapan ikan 3 sampai 60 kg, setelah menggunakan rumpon meningkat hingga 150 sampai 600 kg dalam sekali melaut. Perbedaan yang cukup signifikan ini terjadi ketika perbedaan cara penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat kampung nelayan, diketahui bahwa dahulu ketika cara penangkapan ikan dengan cara mengebom, meracuni ikan dan menyelam dengan kompresor hasil yang didapat melimpah sekali melaut. Tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penjualan di pasaran. Karena hasil yang didapat banyak tapi permintaan pasar sedikit, otomatis hasil tangkap tidak terjual semua di pasaran, alhasil banyak ikan yang cepat membusuk karena penangkapan ikan menggunakan bom dan racun. Dampak dari penggunaan bom dan racun untuk penangkapan ikan juga rusaknya habitat ikan atau terumbu karang sehingga ikan berkurang setelah penangkapan menggunakan bom dan racun. Berbeda seperti saat ini, walaupun hanya dengan kail dan pancing,

masyarakat dapat mengambil ikan secukupnya dan berkelanjutan. Artinya ikan yang didapat cukup tidak terlalu banyak baik untuk dikonsumsi ataupun dijual di pasaran. Penangkapan ikan juga dapat dilakukan secara berkelanjutan keesokan harinya. Artinya pembatasan penangkapan ikan dilakukan untuk pengelolaan berkelanjutan.

2) Adanya Alternatif Pekerjaan bagi Masyarakat

Dampak lain yang terjadi karena perubahan cara penangkapan ikan yang menggunakan peralatan ramah lingkungan adalah adanya alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dilakukan oleh masyarakat. Hubungan dan interaksi antar instan/lembaga yang efektif juga menjadi faktor terbuka peluang usaha baru. Selain sebagai nelayan masyarakat kampung nelayan juga membuka warung makan yang diolah oleh ibu-ibu nelayan. Hasil tangkapan ikan tidak langsung dijual ke pengepul melainkan diolah sendiri menjadi masakan yang dijual ke wisatawan. Tidak hanya itu, dengan adanya penanaman terumbu karang dan adanya ikan hias maka terdapat peluang pekerjaan baru yaitu jasa persewaan alat snorkeling. Tujuan utamanya adalah pengembangan kapasitas masyarakat untuk siap melakukan ekowisata. Hal ini seperti dilansir oleh anggota LSM Sahabat Alam bahwa masyarakat telah menjalani dan belajar untuk menjadi *guide* dari tamu. Paket-paket wisata telah dibuka seperti melihat lumba-lumba dan *diving*. Hal ini masih merupakan pekerjaan sampingan disela waktu pekerjaan sebagai nelayan.

Dampak ekonomi tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Dahuri dkk (2008:144), secara ekonomi, konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa, manfaat yang diperoleh dari kegiatan penggunaan suatu wilayah pesisir serta sumber daya alamnya harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan terutama mereka yang termasuk dalam ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Ini merupakan hasil sinergitas antara LSM Sahabat Alam dengan masyarakat dan dengan dukungan yang belum optimal dari pemerintah baik Perum Perhutani maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang.

b. Dampak dari Segi Sosial

Kombinasi dari kohesi sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, moralitas, akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk dikuantitaskan, tapi penting untuk diperhatikan (Asdak, 2012:40). Dari pendapat tersebut di dapat beberapa aspek dari modal sosial yaitu interaksi sosial, budaya masyarakat, kelembagaan, kepercayaan masyarakat, hukum, disiplin dan moralitas atau kemanusiaan.

1) Kesadaran Masyarakat Mengenai Konservasi

Dalam interaksi sosial, teridentifikasi ada beberapa *stakeholder* utama yang berkaitan dengan kawasan Kondang Merak. Melalui pendekatan *quintuple helix* terdapat peneliti flora fauna hutan lindung dan laut dan

peneliti masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dari universitas maupun LSM (sistem pendidikan); pembukaan tempat wisata (LMDH dan Perum Perhutani), warung makan dan persewaan alat snorkeling oleh masyarakat (sistem ekonomi), sumber daya hutan dan laut baik flora fauna ataupun sumber daya alam lainnya (sistem lingkungan alam); media televisi, koran dan media *online* yang pernah meliput seperti TVRI nasional, Jtv, Metro tv, R tv, koran lokal malang dan media *online* (masyarakat berbasis media) dan LMDH Sumber Bening, Kelompok Nelayan Karya Mina serta masyarakat setempat yang mempunyai kearifan lokal (masyarakat berbasis budaya); dan Perum Perhutani dan Dinas Kelautan Perikanan (sistem politik). Masing-masing saling terkait atau berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang dilakukan belum seluruhnya mencapai tahap sinergi tetapi baru terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang belum optimal.

Dari segi kebudayaan, masyarakat Desa Sumberbening merupakan masyarakat suku Jawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Nasional (Bahasa Indonesia, digunakan pada waktu tertentu biasanya untuk acara-acara formal) dan Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sumberbening dalam bermasyarakat sangat baik, warga yang lebih muda memberikan penghormatan kepada warga yang lebih tua terutama kepada para sesepuh, tokoh adat dan pemimpin.

Kehidupan budaya masyarakat Desa Sumberbening yang merupakan Suku Jawa, sangat menjunjung adat istiadat Jawa atau lokal, penggunaan bahasa tata krama sesuai dengan tingkat masing-masing sangat kental dan melekat pada masyarakatnya. Sebagian besar dari masyarakat terutama orang-orang tua masih teguh memegang tradisi. Tradisi yang masih dilaksanakan setiap tahun adalah Bersih Desa.

Bersih desa diadakan setiap tahun baru pada penanggalan Jawa yaitu pada Bulan Syuro atau Bulan Muharram pada penanggalan Islam. Menurut masyarakat, upacara Bersih Desa dilaksanakan untuk membersihkan desa dan membuang sial (keburukan) sehingga desa aman dari gangguan. Tetapi seiring perkembangan zaman, sebagian masyarakat menganggap acara ini merupakan acara syukuran atas berlimpahnya hasil alam. Biasanya masyarakat kampung nelayan melakukan pemberian sesembahan kepada ‘penunggu pantai selatan’ dengan melempar kepala kambing ke tengah laut setiap 1 syuro.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya interaksi yang menimbulkan sinergi antara LSM Sahabat Alam dan masyarakat kampung nelayan adalah perubahan pola pikir dan kebiasaan yang dilakukan dari ‘perusak alam’ menjadi ‘penjaga alam’. Dari yang dulunya aktivitas masyarakat mengebom laut, meracuni ikan, menyelam dengan kompresor, mengambil telur penyu, mengambil burung di hutan dan lain sebagainya. Saat ini kebiasaan itu telah ditinggalkan dan muncul kebiasaan baru yang ramah lingkungan dalam

kehidupan sehari-hari dan mata pencarian. Pandangan mengenai konservasi lingkungan telah ada dan menjadi pondasi utama dalam beraktivitas. Oleh karena itu masyarakat telah memahami mengenai kelestarian alam.

Sejalan dengan hal tersebut, Putnam dalam Asdak, (2012:40) menjelaskan bahwa keberlanjutan sistem sosial dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis. Lebih lanjut menegaskan bahwa dimensi sosial mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi keuntungan secara adil, partisipasi, pemberdayaan masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Dengan kesadaran akan konservasi dan mendapat pendampingan dari LSM, masyarakat mulai belajar untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan di wilayahnya.

2) Kecemburuan Sosial Antar Desa

Dengan kesadaran masyarakat mengenai konservasi lingkungan dan menjadi sorotan publik, maka terjadi kecemburuan sosial antara kampung nelayan dengan desa atau masyarakat lain. Seperti yang diungkapkan oleh anggota LSM Sahabat Alam bahwa kecemburuan terjadi karena iri melihat kampung nelayan bisa terkenal, telah sadar lingkungan dan mulai berkembang. Padahal rencana dari LSM adalah menyadarkan semua masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan dan laut serta mengembangkan potensi lokal. Dampak negatif akan selalu ada ketika ada salah satu masyarakat yang berkembang atau maju.

c. Dampak dari Segi Lingkungan

Dimensi ekologis pada dasarnya menyajikan informasi tentang daya dukung sistem alam wilayah pesisir dalam menopang setiap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia. Dalam hal ini dimensi ekologis lebih kearah konservasi. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 konservasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan. Berdasarkan fungsi pokoknya, Dahuri, dkk (2008) menjelaskan dalam aspek lingkungan terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan yaitu: 1) keharmonisan spasial, 2) kapasitas asimilasi dan 3) pemanfaatan berkelanjutan.

1) Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya Hutan dan Laut Membaik

Pemanfaatan berkelanjutan menafsirkan bahwa setiap kegiatan pembangunan dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai sehingga membentuk suatu pemanfaatan yang harmonis (Dahuri dkk: 2008). Kawasan pemanfaatan umum merupakan merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, sosial budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri, maritim, pariwisata, permukiman dan pertambangan.

Kawasan Kondang Merak pemanfaatan dilakukan untuk; 1.) kegiatan perikanan yaitu dengan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kail dan pancing serta penanaman terumbu karang dan mangrove; 2.) pariwisata

yang dilakukan oleh Perum Perhutani bekerjasama dengan LMDH Sumber Bening dengan wisata alam pantai Kondang Merak; 3.) pemukiman penduduk yang dihuni oleh masyarakat Kampung Nelayan Kondang Merak yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

Aturan mengenai pengelolaan perlu dibakukan melalui peraturan ataupun kebijakan baik dari Perum Perhutani maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang yang berkoordinasi terlebih dahulu mengenai pengelolaan konservasi kawasan Kondang Merak. Aturan ini nantinya akan mengatur tata kelola yang baik dan berkelanjutan serta berbasis kearifan lokal.

Dampak lain yang terlihat adalah hutan tersisa malang selatan merupakan sebutan lain hutan lindung di kabupaten malang, saat ini satwa-satwa liar telah terlihat kembali seperti trenggiling, burung-burung, lutung dan lain sebagainya. Hali ini disampaikan oleh petugas lapang Perum Perhutani, masyarakat dan LSM yang berkegiatan di Kondang Merak. Ini dikarenakan oleh kerjasama dan pemantauan dari masyarakat, LSM dan Perum Perhutani yang melarang dan menghimbau aktivitas *illegal logging* dan pemburuan serta menangkap pemburu-pemburu liar agar diberi peringatan dan penyitaan senjata. Selain hutan, lautpun semakin baik ekosistemnya. Tidak ada lagi kerusakan-kerusakan ekosistem laut akibat ulah manusia. Yang ada termanaftkannya keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

2) Limbah Rumah Tangga Tidak Terkelola dengan Baik

Untuk menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir syarat berikutnya adalah kapasitas asimilasi. Kapasitas asimilasi adalah kemampuan sesuatu ekosistem pesisir untuk menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi (Krom dalam Dahuri dkk, 2008:144). Ketika wilayah pesisir dimanfaatkan sebagai tempat untuk pembuangan limbah, maka harus ada jaminan bahwa jumlah total dari limbah tersebut tidak boleh melebihi kapasitas daya asimilasinya.

Limbah yang dihasilkan dari masyarakat kampung nelayan yang belum terkelola adalah sampah. Sampah rumah tangga menumpuk hingga kira-kira 5 meter ke belakang rumah. Otomatis sampah ini bersinggungan langsung dengan hutan lindung. Sesuai dengan pendapat Wardhana (2011:103) bahwa dengan bertambah luasnya tempat pembuangan akhir berarti akan makin mengurangi luas daratan yang dapat dimanfaatkan untuk untuk daerah pemukiman, daerah industri, daerah pertanian dan lain-lainnya. Hutanpun semakin terkikis dan pencemaran daratan semakin bertambah. Sampah juga menjadi pemandangan di sebagian rumah karena belum adanya pengelolaan yang baik. Biasanya sampah di bakar, hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan pasir dan tanah. Menurut Wardhana (2011:150) Dampak pencemaran daratan yang secara langsung dirasakan oleh manusia adalah dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan

rumah tangga dan juga industri olahan bahan makanan. Untuk itu lebih lanjut menjelaskan bahwa pemanfaatan kembali limbah padat ternyata banyak memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Limbah (bahan buangan) padat yang semula tidak berharga, setelah dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang menjadi bernilai ekonomis. Caranya dengan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Selain itu juga pemulihan dan penentuan lokasi pembuangan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mencemari badan air dan merusak lingkungan wilayah pesisir (Dahuri dkk, 2008:221).

3) Berkurangnya Lahan Hutan Alami

Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan, hendaknya tidak seluruhnya dimanfaatkan menjadi zona pemanfaatan tetapi juga dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi. Hal ini juga diperkuat oleh Asdak (2012:39), dimensi ekologi lebih menekankan pada pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekologi (*ecological service*). Oleh karenanya tuntutan ke arah konservasi ekosistem makin besar karena meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati oleh pertumbuhan jumlah penduduk, anomaly iklim, pola konsumsi dan oleh sebab antropogenik lainnya.

Di Kondang Merak belum ada zona-zona untuk kawasan konservasi baik di hutan maupun lautnya. Perlu adanya zona-zona dikawasan Kondang Merak untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan hutan dan laut. Hal

ini seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjelaskan pola pengelolaan kawasan pesisir dilakukan dalam bentuk zonasi. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Dari uraian di atas mengungkapkan bahwa kurangnya kegiatan keharmonisan spasial yang mensyaratkan dalam suatu wilayah pembangunan, hendaknya tidak seluruhnya dimanfaatkan menjadi zona pemanfaatan tetapi juga dialokasikan untuk zona preservasi dan konservasi. Selain itu, kapasitas asimilasi juga belum terkendali yaitu kemampuan suatu ekosistem pesisir untuk menerima suatu jumlah limbah tertentu sebelum ada indikasi terjadinya kerusakan lingkungan atau kesehatan yang tidak dapat ditoleransi. Hendaknya hal ini menjadi perhatian serius masing-masing *stakeholder* dan khususnya pemerintah selaku pembuat kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Identifikasi *stakeholder* di kawasan Kondang Merak

Dalam model *quintuple helix* terdapat subsistem seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan alam, masyarakat dan politik. Dalam setiap subsistem terdapat sistem juga dari beberapa *stakeholder*.

Stakeholder dalam **subsistem pendidikan** yaitu: peneliti flora fauna hutan lindung dan laut serta peneliti masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dari universitas maupun LSM; **subsistem ekonomi**, pembukaan tempat wisata (LMDH dan Perum Perhutani), warung makan dan persewaan alat snorkeling oleh masyarakat; **subsistem lingkungan alam**, sumber daya hutan dan laut baik flora fauna ataupun sumber daya alam lainnya; **subsistem masyarakat berbasis media**, media televisi, koran dan media *online* yang pernah meliput seperti TVRI nasional, Jtv, Metro tv, R tv, koran lokal malang dan media *online* dan **subsistem masyarakat berbasis budaya**, LMDH Sumber Bening, Kelompok Nelayan Karya Mina serta masyarakat setempat yang mempunyai kearifan lokal; **subsistem politik**, dan Perum Perhutani dan Dinas Kelautan Perikanan.

2. Aktivitas *stakeholder* di kawasan Kondang Merak

Kegiatan yang dilakukan dari beberapa *stakeholder*. Kegiatan yang dilakukan Perum Perhutani antara lain pengamanan hutan lindung dan produksi dengan cara patroli, sosialisasi ke masyarakat, pendampingan kelembagaan LMDH dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan aktivitasnya antara lain dan pendampingan kelembagaan POKMASWAS/Kelompok nelayan, mengikutsertakan masyarakat untuk pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kebijakan dan peraturan serta pemberian bantuan. Dalam melakukan aktivitas, pemerintah kurang optimal hal ini karena masih adanya keluhan dan kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akademisi dalam hal ini LSM dalam beraktivitas telah berfungsi pelaksana program pemerintah dan pembantu masyarakat dalam program pemerintah. Seperti yang dilakukan LSM Sahabat Alam antara lain pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, penelitian dan *soft campaign* untuk membangun isu publik. Selain itu juga ada *Aspinal Foundation* yang melakukan aktivitas berupa pelepasliaran dan monitoring lutung jawa dan satwa hutan secara keseluruhan serta sosialisasi kepada masyarakat. Peneliti dan universitas pun melakukan kegiatan untuk pengembangan pengetahuan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Masyarakat terdiri dari 2 lembaga yaitu LMDH Sumber Bening dan Kelompok Nelayan Karya Mina. LMDH melakukan aktivitas berupa pengelolaan dan pengembangan wisata pantai dan perlindungan hutan lindung. Sedangkan

kelompok nelayan melakukan profesi sebagai nelayan, diversifikasi produk olahan ikan dan menghimpun informasi kebutuhan nelayan. Kesadaran masyarakat sudah terlihat dalam kontribusinya bagi pembangunan. Untuk itu masyarakat telah memasuki fase partisipatoris. Artinya pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat. Proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Aspek swasta juga dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu dengan pengelolaan wisata, perdagangan wisata kuliner, jasa persewaan alat *snorkeling* dan paket wisata.

3. Bentuk sinergitas antar stekholder di kawasan Kondang Merak

Di Kondang Merak terdapat 6 lembaga/instansi yang berkegiatan yaitu Perum Perhutani, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, LSM Sahabat Alam, *Aspinal Foundation*, LMDH Sumber Bening, Kelompok Nelayan Karya Mina.

Ada 8 hubungan interaksi dari 6 *stakeholder*. Ini menandakan belum keseluruhan *stakeholder* berinteraksi satu dengan yang lain. Selain itu, terdapat tiga tingkatan sinergi yaitu: *defensive*, *respectful* dan *synergistic*. Pertama, hubungan dan interaksi antar *stakeholder* dalam tingkatan *defensive* antara lain Perum Perhutani dengan LSM Sahabat Alam dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Nelayan Karya Mina. Kedua, hubungan antar *stakeholder* dalam tingkatan *respectful* antara lain LSM Sahabat Alam dengan LMDH

Sumber Bening; LMDH Sumber Bening dengan Perum Perhutani; dan LSM Sahabat Alam dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Ketiga, hubungan antar *stakeholder* dalam tingkatan *synergistic* antara lain LSM Sahabat Alam dengan Kelompok Nelayan Karya Mina; LSM Sahabat Alam dengan *Aspinal foundation*. Analisis hubungan *stakeholder* menggunakan parameter sinergi yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat atau *take and give* dan kreativitas.

4. Faktor pendukung dan penghambat konservasi lingkungan

Faktor pendukung merupakan faktor yang menjadi kelebihan atau keunggulan dalam hubungan antar *stakeholder*. Faktor pendukung antara lain perjanjian antar instansi, dukungan dari pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan kesadaran masyarakat mengenai konservasi dan kelestarian lingkungan. Faktor-faktor ini yang mendukung dalam hubungan antar *stakeholder*.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam hubungan antar *stakeholder* antara lain pemahaman aktor dalam perjanjian kerjasama terbatas dan minimnya pemahaman tentang konservasi, minimnya kepercayaan dan komunikasi antar aktor, dan tidak adanya *blueprint* pengelolaan kawasan Kondang Merak. Faktor penghambat ini mempengaruhi hubungan antar *stakeholder* dan faktor pendukung yang telah ada.

5. Dampak sinergi antar *stakeholder* dalam konservasi lingkungan

Dampak hubungan antar *stakeholder* ini akan dianalisis melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan terdapat tiga aspek yang ditinjau yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Tinjauan dari aspek ekonomi, dampaknya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan adanya alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat.

Tinjauan dari aspek sosial, beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain kesadaran masyarakat mengenai konservasi, kecemburuan sosial antar desa karena adanya kemajuan di kampung nelayan dan terkenalnya kampung nelayan sebagai masyarakat yang sadar lingkungan. Sedangkan tinjauan dari aspek lingkungan yaitu kenakeragaman hayati dan ekosistem hutan lindung dan laut mulai membaik, limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik di kampung nelayan, dan berkurangnya lahan hutan alami. Berdasarkan fungsi pembangunan berkelanjutan pada aspek ekologis yaitu keharmonisan spasial yang belum nampak di kawasan Kondang Merak antara zona pemanfaatan dan zona lindung; kapasitas asimilasi belum terukur dan berjalan optimal di Kondang Merak karena limbah rumah tangga dan sampah masih belum terkelola; terakhir pemanfaatan berkelanjutan yang mulai berkembang di kawasan pesisir Kondang Merak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul sinergi antar *stakeholder* dalam konservasi lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan interaksi yang mencapai sinergi. Sinergi yang dicapai adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, *take and give* dan kreativitas yang dihasilkan. Masing-masing *stakeholder* dapat saling berkolaborasi meninggalkan ego dan kepentingan sektoral untuk kepentingan pembangunan. Semua *stakeholder* sebaiknya berinteraksi dan berkoordinasi satu dengan lainnya agar pemahaman tujuan bersama dapat tercapai dan tidak adanya tumpang tindih kebijakan, program atau kegiatan. Pemerintah pusat juga dapat memberikan kebijakan dan regulasi konkret terkait hubungan antar *stakeholder*. Agar masing-masing interaksi dan kerjasama diperkuat melalui aspek legal.
2. Peningkatan kapasitas aktor (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam konservasi lingkungan. Hal ini terkait lokasi pengelolaan (Kondang Merak) terdapat faktor lingkungan dan alam. Petugas lapangan baik Perum Perhutani ataupun Dinas Kelautan dan Perikanan sebaiknya mempunyai kapasitas mengenai lokasi kawasan Kondang Merak dan juga kapasitas mengenai konservasi. Selain itu pemahaman mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* perlu di *review* secara berkala karena berkaitan dengan pemantauan kegiatan yang dilakukan.

3. Pemerintah yang bertanggung jawab dan bertindak atas pembuat kebijakan, program dan kegiatan hendaknya melaksanakan dan meningkatkan kaidah pembangunan dengan optimal. Kaidah pembangunan yang dimaksud adalah 1.) perencanaan (*planning*), artinya merumuskan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan/sesuai dengan realita; 2.) pelaksanaan, artinya mengaplikasikan rencana yang sesuai dengan kebutuhan dengan adil dan bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam; 3.) monitoring dan evaluasi, artinya pemantauan dan pendampingan kepada masyarakat baik LMDH, kelompok masyarakat, masyarakat desa, LSM dan swasta secara berkelanjutan/terus menerus. Baik dalam hal pemberian bantuan, pembentukan kelembagaan, sosialisasi aturan/kebijakan, dan hal lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tidak lupa juga melaksanakan evaluasi atas apa yang telah direncanakan dengan realita sebenarnya serta dampak yang dirasakan.
4. Pembuatan aturan normatif dan dokumen perencanaan (*blueprint*) pengelolaan kawasan Kondang Merak. Pengelolaan yang berbasis konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara komperhensif dan berkelanjutan. Maksudnya, pertama menelaah aspek konservasi (perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pemanfaatan keanekaragamanhayati dan ekosistemnya secara lestari); kedua, menelaah aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pelibatan masyarakat secara adil, bijaksana dan transparan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi; ketiga, komperhensif yaitu mengelola secara bersama-sama/kolaborasi dari *stakeholders* yang terlibat sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, program dan kegiatan; kelima, berkelanjutan yaitu pengelolaan untuk jangka panjang dan terus menerus.

5. Sosialisasi yang dilakukan baik pemerintah ataupun LSM mengenai konservasi lingkungan ataupun aturan kebijakan tidak hanya di kampung nelayan saja. Sosialisasi juga dapat dilakukan pada masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hutan dan laut. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan ke sekolah-sekolah dasar, karena anak sekolah prospek keberlanjutannya lebih pasti. Artinya akan teringat sampai dewasa dan akan menyampaikannya kepada orang tua, teman atau siapapun yang didekatnya. Wisatawan yang berkunjung pun perlu di sosialisasikan baik secara aktif maupun pasif dengan slogan dan larangan-larangan. Sosialisasi juga dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan agar dampak yang nyata dapat terasa.
6. Untuk kawasan hutan lindung khususnya wilayah Kabupaten Malang, sebaiknya Perum Perhutani melaksanakan pengelolaan hutan berdasarkan kaidah konservasi menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan kegiatan konservasi dapat berupa perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Artinya tidak hanya didiamkan saja sebagai salah satu kegiatan perlindungan, melainkan pengawetan dan pemanfaatannya secara adil dan bijaksana juga perlu dilakukan. Yang dikelola berdasarkan UU No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004. Juga perlu peninjauan ulang mengenai pengelolaan dan penguasaan hutan lindung oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa berkaitan dengan dasar perusahaan umum negara yang mencari keuntungan di hutan lindung.

7. Untuk kawasan laut sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan membuat rencana teknis mengenai rencana strategis (*strategic plan*), rencana zonasi (*zonasi plan*), rencana pengelolaan (*management plan*), dan rencana aksi (*action plan*) berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.
8. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan antar *stakeholder* dalam model pengembangan. Selain itu penelitian-penelitian lain juga dibutuhkan terkait keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta masyarakat. *Stakeholder* pun jangan seakan ‘menutup mata’ dari hasil penelitian. Jika dirasa baik dan memungkinkan untuk dilaksanakan dan dikembangkan, perlu dilaksanakan. Karena dengan banyaknya penelitian maka pengetahuan dan inovasi akan muncul serta peluang tercapainya pembangunan berkelanjutan menjadi lebih nyata.

KEPUSTAKAAN

- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Arnkil, et all. 2010. *Exploring Quadruple Helix (Outlining User-Oriented Innovation Models)*. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project. <https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65758/978-951-44-8209-0.pdf?sequence=1>
- Awang, San Afri. 2007. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Center for Critical Social Studies (CCSS) bekerjasama dengan Kreasi Wacana.
- Bakri, Masykuri. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Malang: Lembaga Penelitian UIN Malang. Visipress Offset.
- Carayannis, EG, & Campbell, DFJ. 2010. *Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology*. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development,. <http://www.igi-global.com/bookstore/article.aspx?titleid=41959>.
- Carayannis, EG, & Campbell, DFJ. 2012. *Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. 21st-century democracy, innovation, and entrepreneurship for development*. SpringerBriefs in business (Vol. 7). New York: Springer. <http://www.springer.com/business+%26+management/book/978-1-4614-2061-3>
- Carayannis, EG, Barth, TD Campbell, DFJ. 2012. *The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming as a Challenge and Driver For Innovation*. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. <http://download.springer.com/static/pdf/905/art%253A10.1186%252F2192-5372-1-2.pdf>
- Creswell. John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: Sage Publication.
- Dahuri, Rokhmin, Rais Jacub, Ginting Putra Sapta, Sitepu. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwipayana, Ari dan Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta. IRE.
- English, Larry. 2005. *The Habits of Highly Effective Information Professionals* dalam DM Review, 15 (2) 48
- Farinha, L dan Ferreira, JJ. 2013. *Triangulation Of The Triple Helix: A Conceptual Framework*. University of Beira Interior (UBI). Covilhã, Portugal. <https://www.triplehelixassociation.org/wp-content/uploads/2013/01/Triangulation-of-the-Triple-Helix-A-Conceptual-Framework.pdf>
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh. Rajawali. Jakarta.
- Hetifah, Sumarto, Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance “20 Pakarsa Inovatif dan Partisipasi Indonesia”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hmp_Humas_USAHID. 2008. *Mengenal Stakeholder*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2015 dari <http://hmp-humas-usahid.blogspot.com/2008/09/mengenal-stakeholder.html>.
- Indradi, S.S. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agritek YPN.
- Iversen, M. 1997. *Concept of Synergy-Towards a Clarification*. Working paper for the DRUID-seminar. Department of Industrial Economics and Strategy Copenhagen BusinessSchool. Denmark.
- Ishak. Awang Faroeq. 2003. *Paradigma Hutan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Jakarta: Indomedia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- _____. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Keban, Yeremiar, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Issu*. Yogyakarta: Gava Media.


- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: LKis.
- Lasker, R.D dan Weiss, E.S. 2003. *Creating Partnership Synergy: The Critical Role Of Community Stakeholder*. Diakses pada 11 Juni 2015 melalui www.utexas.edu/courses/.../Lasker_1.pdf.
- Muchdie dkk. (ed.) 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Teknologi*. Jakarta: BPPT.
- Muhadjir, Neong. 2000. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial Pengembangan Sumber Daya Manusia Telaah Cross Discipline*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhtaman, Aliadi, A dan Kartika S. 1999. *Pembajakan Sumber Daya Hayati*. Bogor: Latin.
- Muluk, M R K. 2010. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berbikir Sistem)*. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA UNIBRAW dan Bayumedia Publishing.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Nusa Tenggara Barat: Badan Penerbit Bappeda Provinsi NTB.
- Muhammad, Sahri. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir-Model kemitraan Socio Ecocentrisme*. Malang: UB Press
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indopress.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2003. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2008 Tentang *Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2010 Tentang *Perusahaan Umum Kehutanan Negara*.

- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 Tentang *Konservasi Sumber Daya Ikan*.
- Prijono, Onny S dan A.M.W Pranaka (penyunting). 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purwanto E. 2007. *Nasionalisme Lingkungan: Pesan Konservasi dari Lambusango*. Buton: Opwall Trust.
- Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan – Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang: UIN Malang Press.
- Senge, P.M. 1990. *The Fifth Discipline*. Double Day. New York.
- Setyowati, Abidah B., et al. 2008. *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi, USAID dan ESP.
- Sembiring, Sulaiman N., et al. tt. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat*. Technical Report: Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Pengembangan Lingkungan Hidup Indonesia dengan Natural Resources Management Program.
- Sumodiningrat, G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan IDEA.
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugandhy, Aca. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugijoko, Budhy Tjahjati S. dan BS. Kusbiantoro ed. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono . 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmi, Siti. 2009. *Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Ekuitas Vol.13 No.2 Juni 2009: 219-237.

- Sulistiyani, Ambar teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Surjono, Agus dan Trilaksono, Nugroho. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Banyumedia publishing.
- Tscacher, W. Schiepek, G. Brunner, E.J. 1992. *Self-Organization and Clinical Psychology- Emperical Approach to Synergetics in Psychology*. ISBN 3-540-055502 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya*.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*.
- Wahab, Solichin Abdul. Fadhilah Putra. Saiful Arif. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian social, ekonomi, dan politik untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan daerah*. Surabaya: SIC.
- Wardhana, Wisnu Arya. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Wrihatnolo, Randy. R dan R.N Dwidjowijoto.2007. *Manajemen Peberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- www.bps.go.id. *Indonesia Dalam Angka Tahun 2010*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.
- www.bakosurtanal.go.id. *Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat*. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.
- www.Greenpeace.or.id. *Laut Indonesia dalam Krisis*. Diakses 15 Mei 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN
Nomor : 072/ 535 /421.205/2015
Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 11485/UN.10.3/PG/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Riset/Survei

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Survei** oleh :

Nama / Instansi : Muhammad Reza Tricahya / Mhs. Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Sinergitas Stakeholders dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pantai Kondang Merak Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang

Daerah/tempat kegiatan : Pantai Kondang Merak Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Bening, Kec. Bantur, Kab. Malang

Lamanya : 1 September s.d. 31 Desember 2015

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 27 Agustus 2015


An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
BUDIANTO HERMAWAN SH.Msi
Pembina
NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Malang
4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Malang
5. Sdr. Camat Bantur Kab. Malang
6. Sdr. Kepala Desa Sumber Bening Kec. Bantur Kab. Malang

Lampiran 2. Surat Disposisi Kepala Perum Perhutani Jawa Timur


PERHUTANI

Nomor : 707 / 016.5/SDM/Mlg/Divre-Jatim
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Malang, 7 Sept. 2015

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jl.MT.Haryono No.163
di- **MALANG**

Menarik surat Divre Jatim No.395/016.5/Sekdivre/Jatim tanggal 31 Agustus 2015 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Muhammad Reza Tricahya	115030600111033	Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Penelitian untuk Tugas Akhir dengan judul “Sinergitas Stakeholders Dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus: Pantai Kondang Merak Dusun Sumber Rejo, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang) mulai tgl. 1 September – 31 Desember 2015 di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pada satuan kerja KPH Malang .


2. Segala biaya, akomodasi dan ijin ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan dan wajib mentaati segala tata tertib dan peraturan yang berlaku di Perum Perhutani KPH Malang.


3. Kepada mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan praktek diwajibkan menyerahkan 2 (dua) eksemplar laporan kegiatan dimaksud, ke Perum Perhutani KPH Malang dan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jatim – Surabaya.

4. Hal – hal yang bersifat Khusus harus mendapat ijin tertulis dari Administrator/KKPH Malang.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan Kepada Yth :
1. Wakil Adm/KSKPH Malang Timur
2. Kasi PSDH
3. Kepala Tata Usaha
4. Mahasiswa yang tercantum diatas

Administratur,
Divisi Regional Jawa Timur

IF ARIF HERLAMBA, MM.
PNT 19671029 199303 1



KPH Malang Jl. Dr. Cipto No.14 A, Malang
T. +62 341 366317 F. +62 341 356408

Lampiran 3. Surat Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani dengan LMDH

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUM PERHUTANI
DENGAN
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN DHUDO LESTARI
DESA SUMBER BENING KECAMATAN DONOMULYO
KABUPATEN MALANG
TENTANG
Nomor LMDH/Mlg/2012**

Pada hari ini, tanggalBulan dua ribu sebelas bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

1 Nama : Ir. RIYANTO YUDHOTOMO
Jabatan : Administratur/KKPH Malang
Alamat : Jl. Dr. Cipto 14 A Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----

2 Nama : SIYAR HARTONO
Jabatan : Ketua Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan Desa Sumber Bening
Alamat : Ds. Sumber Bening Kec. Donomulyo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya berkedudukan di Desa Sumber Bening Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengadakan adendum Perjanjian kerjasama Pola Kemitraan Pengelola Hutan (PKPH) sebagaimana tersebut diatas pada pasal-pasal sebagai berikut :-----

**Pasal 1
DASAR PERJANJIAN**

(1) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.-----

(2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan -----

(3) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436/KPTS/Dir/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu -----

(4) Surat keputusan Gubernur Jawa Timur No. 1888/Kpts/013/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur -----

(5) Nota Kesepahaman antara Perum Perhutani KPH Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang No : 86/001.2/PMDH tanggal 4 Pebruari 2004 dan

Lampiran 4. Media Publikasi

Media Online



Keterangan : Berita Tentang Kondang Merak oleh Berita Jatim.com dengan Judul "Pencurian Batu Gua Marak di Malang"

Media Cetak





Keterangan : Beberapa Media Cetak Berbentuk Koran Meliput Aktivitas dan Potensi Kawasan Kondang Merak Antara Lain Radar Malang

Media Televisi



Keterangan : Beberapa Media Televisi yang Meliput Kegiatan di Kondang Merak
Antara Lain Acara 1000 Meter dan Negeri Indonesia

Lampiran 5. Pedoman wawancara

Draft Wawancara LSM

1. LSM Sahabat Alam/Aspinal Foundation, bergerak di bidang apa?
2. Apa peran LSM dalam konservasi hutan malang selatan?
3. Apa saja perencanaan dan implementasi dalam konservasi lingkungan atau pemberdayaan masyarakat di Pantai Kondang Merak?
4. Bagaimana pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut?
5. Adakah kendala atau hambatan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasinya?
6. Apakah setiap program dan kegiatan bekerjasama atau sinergi dengan instansi lainnya di Kondang Merak?
7. Bagaimana bentuk atau jalannya sinergi tersebut serta hasilnya? Efektif apa tidak?
8. Adakah kendala atau dukungan dalam proses sinergi kepada instansi lain?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat?

Draft Wawancara Pemerintah

1. Apakah ada dokumen perencanaan mengenai pengelolaan hutan lindung dan laut pantai Kondang Merak?
2. Apa saja program dan kegiatan yang telah dilakukan di kawasan hutan dan laut pantai Kondang Merak? Khususnya terkait konservasi dan pemberdayaan
3. Kalau ada, bagaimana pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasinya?
4. Adakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan perencanaan, implementasi dan evaluasi?
5. Apakah setiap program dan kegiatan bekerjasama atau sinergi dengan instansi lainnya?
6. Bagaimana bentuk atau jalannya sinergi tersebut serta hasilnya? Efektif apa tidak?
7. Adakah kendala atau dukungan dalam proses sinergi kepada instansi lain?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat?
9. Apa saja kendala atau hambatan dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat?

Draft Wawancara Masyarakat

1. Adakah organisasi masyarakat di Kondang Merak?
2. Apa saja aktivitas masyarakat di Kondang Merak? Terkait konservasi
3. Bagaimana menurut anda adanya LSM, Perhutani, Dinas kelautan dan perikanan, bksda, yang telah ada di Kondang Merak terhadap kondisi disini?
4. Dengan siapa saja masyarakat berinteraksi? Bagaimana interaksinya
5. Bagaimana hubungannya dengan instansi pemerintahan atau LSM?
6. Ada permasalahan apa tidak selama berinteraksi dengan pemerintah/LSM?
7. Apa saja dampak ekonomi, sosial dan lingkungan terkait hubungan pemerintah, LSM dan masyarakat?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir?
9. Apa saja kendala atau hambatan dalam konservasi lingkungan kawasan pesisir?

Lampiran 6. Dokumentasi Lapangan

Dokumentasi Aktivitas Kondang Merak



Keterangan: Bersama Mas Sutrisno Ketua LMDH di Loket Wisata



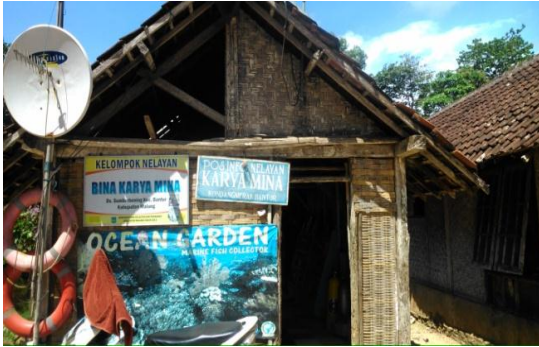
Keterangan: Bersama dengan Mas Sriyadi Ketua Kelompok Nelayan Karya Mina Kampung Nelayan



Keterangan: Wawancara Pak Iwan *Aspinal Foundation* di Coban Talun, Batu



Keterangan: Pendekatan Kepada Warga Desa dan Peneliti *Aspinal Foundation* di *Base Camp* Kondang Merak



Keterangan: Pusat Informasi Kelompok Nelayan Karya Mina sekaligus Rumah Baca Kampung Nelayan



Keterangan: Bersama Pak Edi, salah satu tokoh masyarakat di Rumah Baca, Kampung Nelayan



Keterangan: Salah Satu Wisata Kuliner Kondang Merak "Sate Tuna"



Keterangan: Proses Pelepasliaran Lutung Jawa ke Hutan Lindung Kondang Merak



Keterangan: Mas Andi dan Mas Bagyo Bertemu dengan Peneliti Elang Internasional



Keterangan: Kegiatan *Sharing* dan Diskusi oleh Mas Andi Salam

Lampiran 7. Curriculum Vitae**CURRICULUM VITAE****A. Data Personal**

Nama Lengkap : Muhammad Reza Tricahya
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 6 November 1993
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Puyuh Blok D 118 Jaka Mulya, Bekasi Selatan
 E-mail : reza_tricahya@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

Tahun 1999-2005 : SD Gondangdia 01
 Tahun 2005-2008 : SMPN 1 Jakarta
 Tahun 2008-2011 : SMAN 42 Jakarta

C. Pengalaman Organisasi

Tahun 2012-2013 : Seksi Olahraga dan SAR IMPALA UB
 Tahun 2013-2014 : Sekretaris Umum IMPALA UB

D. Pengalaman Kepanitiaan

Tahun 2012 : Koordinator Lapangan Ekspedisi Pencakar Langit
 IMPALA UB
 Tahun 2013 : Tim Peneliti Ekspedisi Gua dan Karst Nusantara
 Pulau Seram
 Tahun 2014 : Tim Evaluasi DIKLATSAR 38 IMPALA UB
 Tahun 2015 : Ketua Badan Usaha IMPALA UB